

Laporan Kinerja Insansi Pemerintah

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2023

BPBD @ 2024 by fpy



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang telah selesai disusun. LKjIP merupakan bentuk komitmen BPBD Kabupaten Jombang dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana dimuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan kinerja instansi pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama oleh seluruh jajaran BPBD Kabupaten Jombang sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi dan pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja BPBD Kabupaten Jombang diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan dan bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui LKjIP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip pelayanan masyarakat dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah serta sebagai bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penentuan kebijakan, program/kegiatan dan perwujudan Kinerja BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu BPBD Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat, dukungan unsur Pentahelix Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jombang baik unsur pemerintah, lembaga relawan, akademisi, pers dan dunia usaha merupakan suntikan semangat untuk terus berbenah diri. Selanjutnya, kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa dinantikan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam pelayanan masyarakat di tahun mendatang untuk mewujudkan Jombang yang Tanggap, Tangkas, Tangguh Bencana.

Akhir kata, laporan ini disusun dengan harapan menjadi manfaat bagi banyak pihak dan catatan per baikan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang kedepan. Bencana urusan bersama, tetapkan tangguh demi kemanusiaan. Intine, tetep semangat tanpo sambat.

Jombang, 8 Januari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jombang



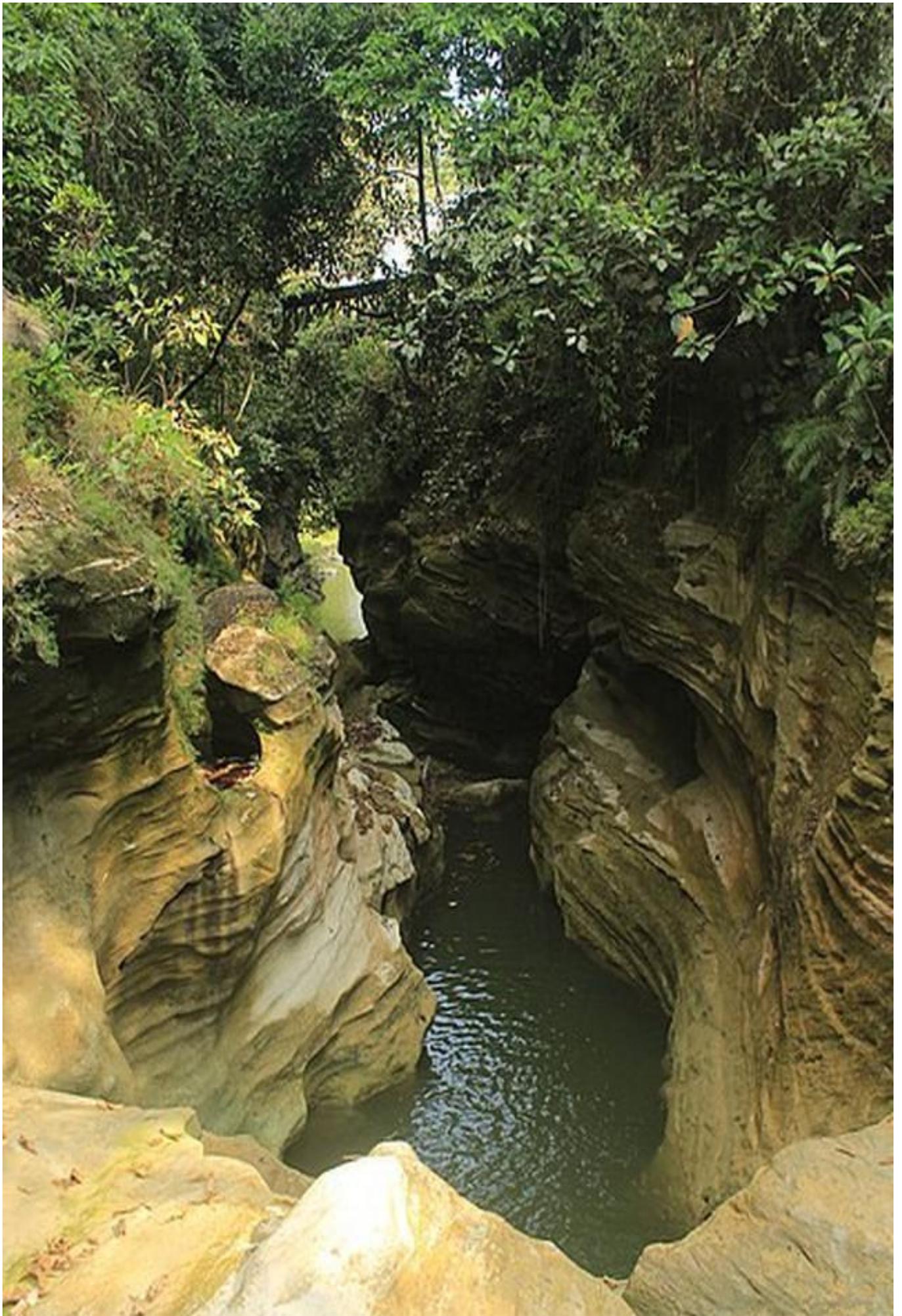
BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660531 199703 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Struktur Organisasi.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	2
1.3. Isu Strategis	4
1.4. Cascading	7
1.5. Peta Proses Bisnis	7
1.6. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	8
BAB II PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja	11
2.1.1. Rencana Strategis	11
2.1.2. Rencana Kinerja Tahun 2023	13
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	
3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	17
3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.....	27
3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah	28
3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja level nasional/ internasional.....	29
3.1.5. Analisis atas realisasi kinerja	30
3.2. Realisasi Anggaran	
3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran	37
3.2.2. Efisiensi penggunaan sumber daya	38
3.3. Upaya Perbaikan Kinerja.....	42
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	44
4.2. Rekomendasi	44
Lampiran-Lampiran	
I. Peta Proses Bisnis	
II. Pendanaan Indikatif pada Renstra	
III. Rencana Kinerja Tahun 2023	
IV. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
V. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	
VI. Bukti Dukung Capaian Kinerja Sasaran	
VII. Bukti Dukung Capaian Kinerja Program	



BAB 1

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Struktur Organisasi

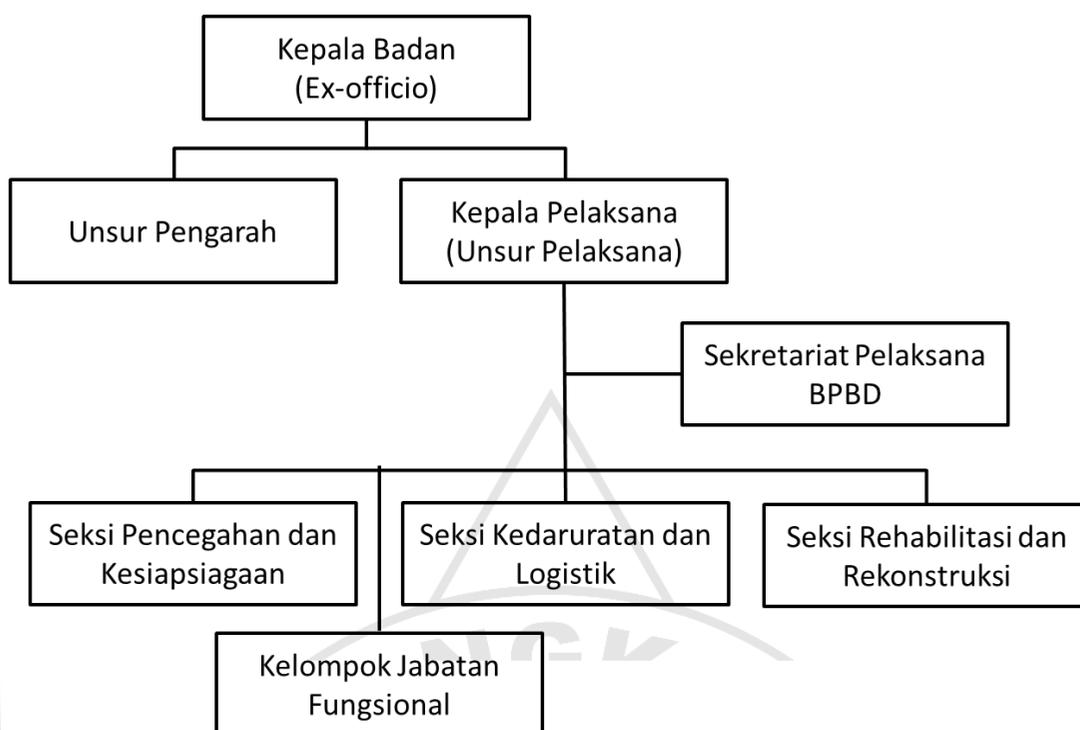
Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Jombang, berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/D) dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 18/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18/D), maka Pemerintah Kabupaten Jombang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, yang selanjutnya merupakan dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dengan Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah yaitu :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli;
3. Unsur Pelaksana sebagai berikut :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat,
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik,
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang menurut Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI



Sumber : Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2011

1.2. Tugas dan Fungsi

Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi .

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
Fungsi Komando sebagaimana dimaksud merupakan fungsi komando unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan unsur sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Perangkat Daerah

lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Unsur Pelaksana BPBD :

- a. Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas :
 - Memimpin, mengawasi, membina, mengendalikan dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sekretaris Pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :
 - Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Pelaksana BPBD;
 - Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan BPBD;
 - Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Pelaksana BPBD;
 - Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Pelaksana BPBD;
 - Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah BPBD;
 - Pengkoordinasian dan penyusunan laporan BPBD.
- c. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik serta peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana;

- Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

1.3. Isu Strategis

Tugas BPBD Kabupaten Jombang adalah untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kabupaten Jombang yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter *Good Governance*.

BPBD Kabupaten Jombang memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jombang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD sebagai lembaga Penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Jombang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut adalah:

- a. Belum adanya Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra, tanggap, pasca) dan lintas sektor sebagai petunjuk teknis turunan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Masih terbatasnya SDM yang terlatih dan tersertifikasi teknis dan manajemen kebencanaan dan kebakaran;
- c. Dokumen perencanaan penanggulangan bencana (Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Mitigasi, Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, Rencana Kontingensi berbasis Ancaman, Rencana Operasi, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana) masih belum lengkap sesuai jenis dan kebutuhannya;
- d. Tidak sesuainya ketersediaan anggaran perawatan kendaraan jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
- e. Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- f. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
- g. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;

Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kabupaten Jombang, diuraikan dalam tabel pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Banjir Luapan DAS Brantas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sedimentasi sungai yang terus meningkat; 2. Pola hidup masyarakat yang menyebabkan kerusakan lingkungan; 3. Kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana masih rendah. 	Curah hujan tinggi di musim penghujan pada daerah pegunungan yang mengakibatkan debit air di aliran sub Das Brantas naik dan masuk ke pemukiman

2.	Kebakaran Pemukiman, hutan dan lahan	Tingkat Kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bahaya kebakaran masih rendah.	Masyarakat melakukan pembakaran sampah, konsleting listrik, Titik hot spot musim kemarau
3..	Kekeringan dan Kekurangan Air Bersih	1. Sumber air jauh dari masyarakat; 2. Infrastruktur terkait perpipaan air pada daerah kekeringan masih minim; 3. Belum diketemukan sumber air baru pada daerah kekeringan.	Sumber air habis di saat musim kemarau di beberapa daerah dan resapan air berkurang akibat alih fungsi lahan untuk pemukiman dan industri
4..	Daerah Potensi Longsor tinggi	1. Perlu pemetaan daerah rawan longsor; 2. Tingkat Kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman lonsor masih rendah.	Adanya retakan tanah di daerah perbukitan dan alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman atau industri
5..	Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	1. Peralatan PB masih belum lengkap; 2. Kondisi Kendaraan Pemadam sudah tua	Pendanaan penyediaan sarpras masih rendah
6..	Sumber Daya Manusia di Bidang kebencanaan	1. Kapasitas SDM di bidang Kebencanaan dan kebakaran perlu ditingkatkan; 2. Terbatasnya personil di bidang kebencanaan dan kebakaran.	Jumlah personil PB dan Pemadam kebakaran semakin berkurang
7.	Fungsi Koordinasi dan Komunikasi dalam penanganan bencana	1. Peraturan daeran tentang Penanggulangan bencana belum ada; 2. Dokumen-dokumen kebencanaan belum lengkap	Kelembagaan BPBD Kabupaten Jombang masih Type c
8.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	Adanya Korban Bencana alam dan Kebakaran yang kehilangan Kebutuhan dasar	Kejadian bencana yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian

			baik secara materiil dan non materiil.
--	--	--	--

Sumber : PUSDALOPS BPBD Kabupaten Jombang.

1.4. Cascading

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan berdasarkan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Jombang terkait pencapaian misi ketiga dari RPJMD Kabupaten Jombang yaitu Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri dengan tujuan meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Indikator tujuan RPJMD dari misi ketiga ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman. BPBD Kabupaten Jombang mendukung sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman.

Sasaran OPD merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan RPJMD. Sasaran OPD merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Tujuan BPBD Kabupaten Jombang adalah Pengurangan Risiko Bencana dan Kebakaran dengan Indikator Tujuan meliputi: (1) Indeks Risiko Bencana dan (2) Persentase Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis dari tujuan meliputi:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana.	1. Persentase capaian Indikator Ketahanan Daerah.
2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.	2. Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi.
3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	3. Nilai AKIP BPBD.

1.5. Peta Proses Bisnis

BPBD Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi

antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis BPBD Kabupaten Jombang dapat digambarkan secara garis besar sebagaimana terlampir.

1.6. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Nomor: X.700/5758/415.15/2023, tanggal 23 Agustus 2023, nilai akuntabilitas kinerja BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah 71.01 yang termasuk kategori BB dengan predikat “Sangat Baik” dengan rincian komponen:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	23,17	77,23	B
2.	Pengukuran Kinerja	30%	22,52	75,08	B
3.	Pelaporan Kinerja	15%	6,88	45,83	D
4.	Evaluasi Kinerja	25%	18,44	73,75	B
	Total	100%	71,01		

Sumber: LHE SAKIP BPBD 2023, Inspektorat.

Catatan atas hasil evaluasi dapat disajikan sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja:
 - a. Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana” belum memenuhi kriteria SMART pada aspek Spesifik karena belum menggambarkan parameter kinerja secara khusus;
 - b. Target Kinerja yang ditetapkan pada Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana” belum cukup menantang karena menggunakan formulasi/ perhitungan yang kurang sesuai;
 - c. Atas penetapan target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya namun hanya menganalisa capaian pada Tahun 2022, sedangkan realisasi tahunan tidak disajikan pada Berita Acara Monitoring maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022;
 - d. Telah terdapat Standar Operasional Prosedur monitoring capaian target jangka menengah namun jadwal pelaksanaan monitoring belum tersaji;
 - e. Upaya perbaikan yang disajikan pada Berita Acara Reviu Renstra belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
 - a. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/penghasilan (pemberian/pengurangan) sebagaimana penggunaan aplikasi aplikasi TPP melalui e-office kabupaten, namun berdasarkan rekapitulasi penilaian kinerja pegawai yang dilampirkan dalam rangka pemberian reward dan

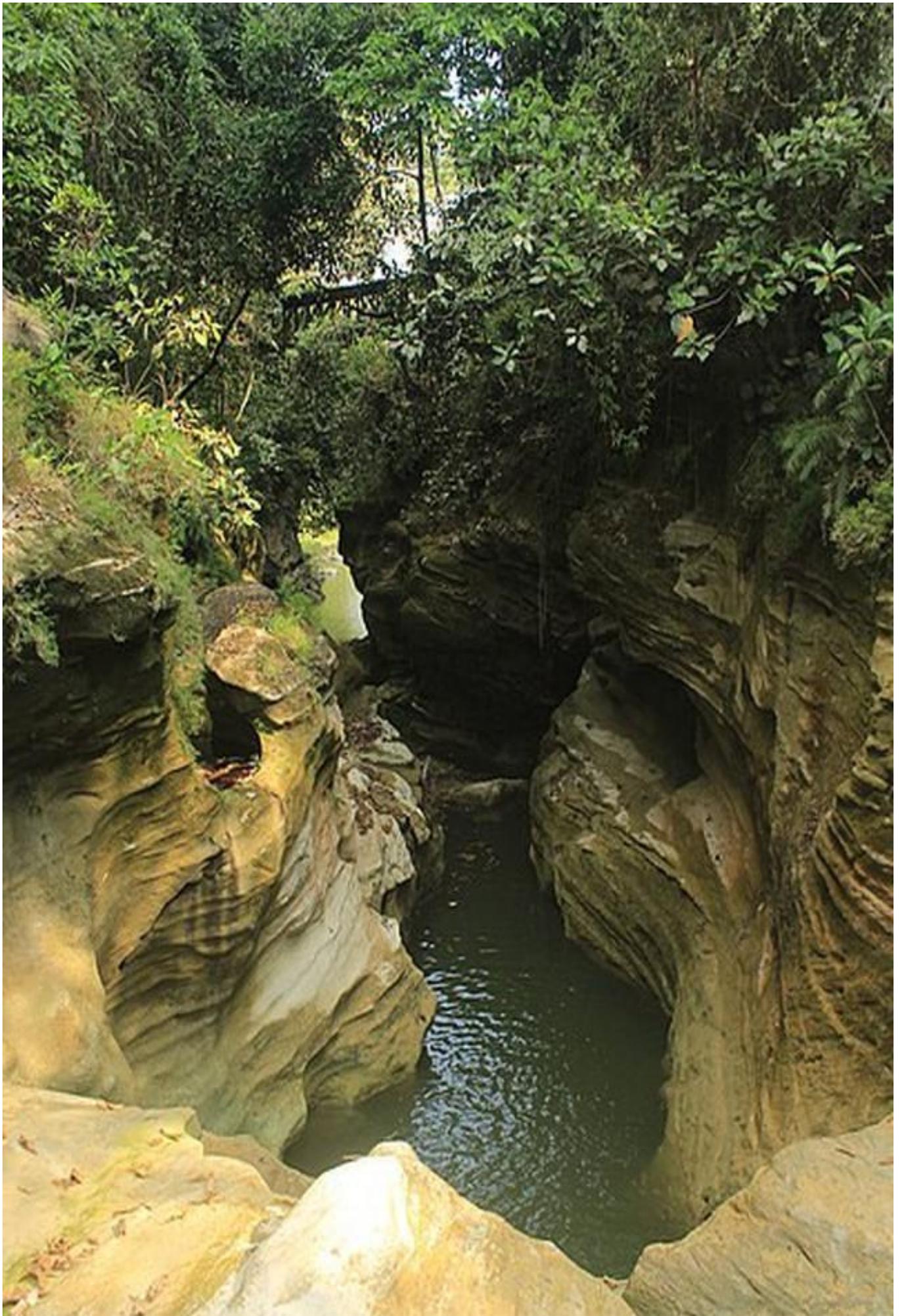
- punishment tidak didapati standar yang jelas dalam pengukuran kualitas kinerja yang dihasilkan oleh individu pegawai sebagai salah satu parameter dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan;
- b. Pengukuran Kinerja yang telah dilakukan sampai dengan tribulan II belum didapati bukti yang cukup bahwa hasil evaluasi atas pengukuran kinerja berdampak secara maksimal atas penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja pada periode berikutnya.
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
 - a. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan yaitu belum menyajikan efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang menjelaskan kondisi perbandingan antara kebutuhan standar SDM dan sarana dan prasarana dengan kondisi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang;
 - b. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk dasar dilakukan penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja sebagai contoh dalam melakukan penyesuaian anggaran hanya didasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah.
 4. Evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi yang diterima dan dalam rangka lebih mengefektifkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, beberapa catatan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk implementasi SAKIP selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Melakukan evaluasi kembali dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang atas indikator kinerja, formulasi, dan target yang digunakan pada sasaran Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dengan indikator Persentase Capaian Indikator Ketahanan Daerah untuk ditetapkan pada Renstra periode selanjutnya;
2. Menyusun mekanisme Monitoring Target Jangka menengah meliputi proses evaluasi dan jadwal monitoring sebagai pedoman untuk monitoring pada periode selanjutnya sehingga hasil monitoring dapat menyajikan secara detail hambatan, upaya, dan rekomendasi yang dapat memberikan perbaikan;
3. Menyusun mekanisme reward and punishment dengan menyajikan parameter hasil pengukuran kinerja untuk memilih dan memilah

yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja, serta menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu kondisi atau keadaan;

4. Mengusulkan kepada BKPSDM Kabupaten Jombang agar menambahkan parameter standar atas kinerja sebagai kriteria pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
5. Meningkatkan kualitas evaluasi pengukuran kinerja untuk selanjutnya memanfaatkan hasil evaluasi pengukuran kinerja sebagai bahan untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja;
6. Menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja;
7. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran, maupun perencanaan kinerja;
8. Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target.



BAB 11

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja



BAB II

IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter Good Governance. Dalam perspektif perubahan paradigma dan ditetapkannya penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang bertanggung jawab untuk menjawab tantangan Good Governance di bidang kebencanaan yang uncontrolable dengan kebijakan dan program yang nyata, sehingga resiko bencana yang timbul dapat diminimalisir.

2.1. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

2.1.1. Rencana Strategis

Tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan fungsi utama BPBD kurun waktu 2018-2023 yaitu :

Misi 3 :

Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri.

Tujuan :

Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Sasaran:

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman.

Dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran RPJM yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 ditetapkan yaitu Pengurangan resiko bencana (berdasarkan indeks resiko bencana kabupaten).

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana;
2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan;
3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang menetapkan program - program nya sesuai RPJMD periode 2018-2023, yaitu;

1. Program utama (teknis); program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam proses sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, dan ;
2. Program penunjang; program ini juga digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua (Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sebagai lembaga penanggulangan bencana.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Jombang dalam mewujudkan sasaran RPJMD dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

2. Program Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.1.2. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja Tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana Kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam lampiran.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang dalam hal ini, perjanjian kinerja dilakukan antara Bupati Jombang dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen dan kesepakatan atas pelaksanaan kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi hanya pada hasil kinerja tahun berkenaan, tetapi termasuk hasil kinerja yang terwujud karena kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Wujud komitmen nyata antara Bupati Jombang dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pelaksanaan melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang telah melakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 untuk mewujudkan target kinerja yang selaras antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja sebagai berikut:

**Penetapan Kinerja BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2023
(Sasaran)**

Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	100%
2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	100%
3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP	BB

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Jombang

**Penetapan Kinerja BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2023
(Program)**

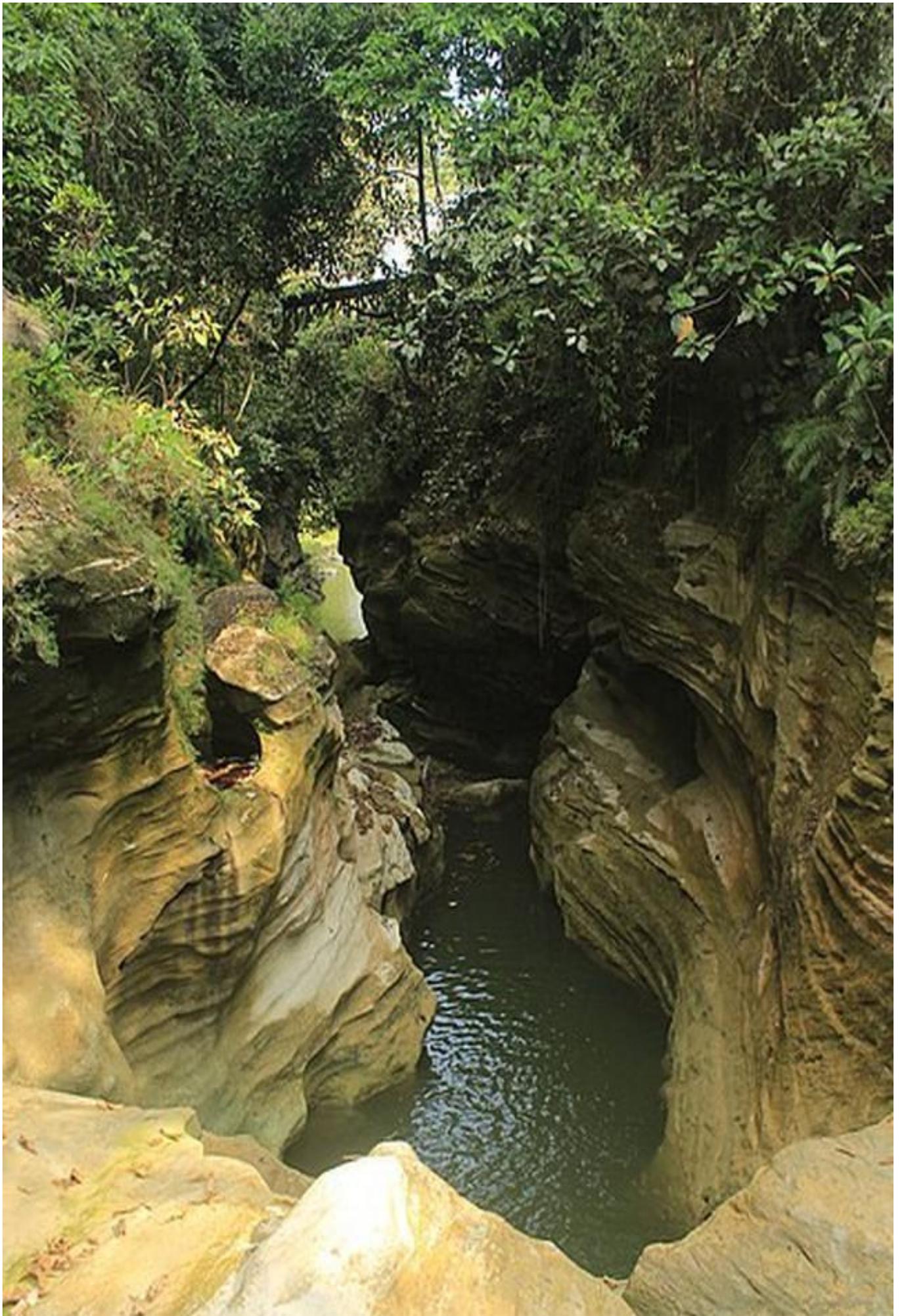
Program	Sasaran Program	Indikator	Target
1. Program Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya pelayanan dasar penanggulangan bencana	Persentase jumlah jenis layanan penanggulangan bencana yang dipenuhi	100%
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terpenuhinya pelayanan dasar penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dalam Waktu Tanggap (Respon Time)	100%
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Unsur-Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%

**Penetapan Kinerja BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2023
(Kegiatan)**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya antisipasi dan kesiapsiagaan kejadian bencana	Persentase Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%
2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana	100%
3. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasi pemadaman kebakaran, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Capaian Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%
4. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%
5. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%

Dalam melaksanakan perjanjian kinerja telah yang telah disepakati, BPBD Kabupaten Jombang melaksanakan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan dengan dukungan APBD Kabupaten Jombang sebesar Rp.6.562.833.886,- (enam miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).



BAB 999

Akuntabilitas Kinerja



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan laporan yang memberikan gambaran perkembangan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan secara transparan akuntabel.

Pada Tahun Anggaran 2023, BPBD Kabupaten Jombang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai capaian kinerja organisasi dan dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

A. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja Sasaran BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Capaian Kinerja (Sasaran) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian thd Target Tahunan	Capaian tahun 2023
1. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	100%	100%	100%	100%
2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Tahun N	BB (70)	BB (71.01)	101%	101%

Sumber: diolah, BPBD Kabupaten Jombang 2023

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diampu oleh BPBD Kabupaten Jombang mempunyai 3 (tiga) Sasaran yang masing-masing capaian kinerja dianalisis berikut:

1. Indeks Ketahanan Daerah

Capaian Persentase Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

Pada Tahun 2023 terdapat perubahan Indikator Sasaran dari Indikator Ketahanan Daerah menjadi Persentase Capaian Indikator Ketahanan Daerah dengan Formulasi: Jumlah Indikator Ketahanan Daerah yang terpenuhi / Jumlah Indikator Ketahanan Daerah yang ditargetkan terpenuhi x 100%. Target yang direncanakan akan dicapai pada Tahun 2023 adalah memenuhi 6 indikator sehingga capaian target diharapkan dapat maksimal yaitu 100%. Adapun target yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan;
- b. Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat;
- c. Menginisiasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB);
- d. Menginisiasi RSAB dan Puskesmas Aman Bencana;
- e. Membangun dan melaksanakan uji sistem peringatan dini bencana banjir;
- f. Membangun dan melaksanakan uji sistem peringatan dini bencana tanah longsor.

Upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2023 menghasilkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Jombang sebesar 0,41 dengan tingkat kapasitas daerah Sedang dengan capaian:

Capaian Indeks Prioritas penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023

No.	Prioritas	Indeks Prioritas
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,88
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,33
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,58

4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,51
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,18
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,50
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20

Sumber: diolah, BPBD Kabupaten Jombang 2023

Dari penetapan target Renstra, Indeks Ketahanan Daerah telah dicapai dengan baik dengan perolehan Nilai indeks sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target Renstra dapat dipenuhi dengan pendekatan pemahaman bahwa bencana adalah urusan bersama.

2. Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi

Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi adalah salah satu hal penting dalam keberhasilan kegiatan penanganan kebakaran dimana pelayanannya dilaksanakan selama 24 jam dalam 7 hari kerja sehingga diharapkan seluruh kejadian Kebakaran, Kondisi Membahayakan Manusia dan Bahan Berbahaya dan Beracun dapat ditangani dengan baik.

Adapun Kejadian Kebakaran, Kondisi Membahayakan Manusia, Bahan Berbahaya dan Beracun dapat disajikan sebagai berikut:

Kebijakan Kebakaran, Kondisi Membahayakan Manusia, Bahan Berbahaya dan Beracun

No	Wilayah Kecamatan	Jenis Kejadian	Jumlah Kejadian
1	Mojoagung	Kebakaran Hutan	1
2	Kabuh		1
3	Wonosalam		1
1	Jombang	Kebakaran Pemukiman	6
2	Bandar Kedungmulyo		1
3	Mojoagung		4
4	Ngoro		3
5	Diwek		4
6	Mojowarno		1
7	Sumobito		5
8	Peterongan		2
9	Megaluh		1
10	Jogoroto		3
11	Perak		1
12	Ploso		1

1	Jombang	Kebakaran Tempat Usaha	7
2	Tembelang		2
3	Mojoagung		4
4	Plandaan		1
5	Ngoro		2
6	Diwek		2
7	Mojowarno		3
8	Sumobito		2
9	Peterongan		1
10	Perak		3
11	Wonosalam		1
12	Kesamben		3
1	Jombang	Kebakaran Lahan	10
2	Tembelang		4
3	Gudo		4
4	Bandar kedungmulyo		2
5	Mojoagung		8
6	Plandaan		2
7	Ngoro		5
8	Diwek		2
9	Kabuh		5
10	Mojowarno		7
11	Sumobito		4
12	Peterongan		2
13	Megaluh		1
14	Jogoroto		3
15	perak		3
16	ploso		4
17	kudu		1
18	wonosalam		1
19	kesamben		2
1	Jombang	Kebakaran Fasilitas Umum	1
2	Mojoagung		1
3	Ngoro		1
4	Diwek		3
5	Peterongan		1
6	Kudu		1
7	Kabuh		1
8	Megaluh		1
1	Mojowarno	Kondisi Membahayakan Manusia	2
2	Sumobito		1
3	Ngoro		1
4	Jombang		2
1	Jombang	Penanganan Hewan Buas, Berbisa dan berbahaya	36
2	Tembelang		6
3	Gudo		17
4	Bandar kedungmulyo		5
5	Mojoagung		26
6	Plandaan		4

7	Ngoro	Penanganan Hewan Buas, Berbisa dan berbahaya	24	
8	Diwek		13	
9	Kabuh		2	
10	Mojowarno		11	
11	Sumobito		19	
12	Peterongan		9	
13	Megaluh		5	
14	Jogoroto		7	
15	Perak		3	
16	Ploso		13	
17	Ngusikan		1	
18	Kesamben		7	
19	Bareng		7	
1	Jombang		Pelayanan di luar Tupoksi (Kecelakaan lalu lintas dan evakuasi jenazah)	7
2	Mojoagung			2
3	Ngoro			1
4	Mojowarno			4
5	Sumobito			3
6	Peterongan			1
7	kesamben	1		
8	Megaluh	2		
Total			91	

Sumber: Pusdalops PB BPBD Kabupaten Jombang 2023

Dari penetapan target Renstra, pada tahun 2023 seluruh Kejadian Kebakaran, Kondisi Membahayakan Manusia, Bahan Berbahaya dan Beracun dapat ditangani sehingga dapat disimpulkan target dapat dicapai 100%.

3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Jombang diharapkan dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat dengan orientasi kerja pada outcome. Sebagai bagian dari proses implementasi SAKIP, maka pelaksanaan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja yang ada di perjanjian kinerja adalah sebuah tahapan yang harus dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana target-target yang ada dalam indikator kinerja sudah tercapai, mengetahui hambatan atau permasalahan yang dihadapi serta dapat menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun 2023, Hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang memperoleh nilai **71,01** dengan Kategori **Sangat Baik**, sebagaimana data berikut:

**Nilai Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tahun 2023**

No.	Komponen	Nilai Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	23,17
2	Pengukuran Kinerja	22,52
3	Pelaporan Kinerja	6,88
4	Evaluasi Internal	18,44
5	Capaian Kinerja	23,17
Total		71,01

Sumber: Inspektorat Kab Jombang, 2023

Dari penetapan target Renstra, Nilai hasil evaluasi SAKIP dapat dicapai diatas target yang ditetapkan yaitu 70.00 sehingga persentase capaian target dapat dihitung sebesar 101%.

B. Analisis Capaian Kinerja Program

Capaian kinerja Sasaran BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

**Analisa Capaian Kinerja (Program)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jombang
Tahun 2023**

Sasaran/Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian thd Target Tahunan	Capaian tahun 2023
1. Program Penanggulangan Bencana	Persentase layanan penanggulangan bencana yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dalam Waktu Tanggap (Respon Time)	100%	100%	100%	100%
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%

Sumber: diolah, BPBD Kabupaten Jombang 2023

Pada Tahun 2023, BPBD Kabupaten Jombang mempunyai 3 (tiga) Program, dengan masing-masing capaian kinerja yang dapat dianalisis berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana

Kinerja Program Penanggulangan Bencana yang tercapai 100% melalui capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang dapat disajikan sebagai berikut:

**Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jombang
Tahun 2023**

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%
1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dok	1 Dok	100%
1.2. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	875 Orang	875 Orang	100%
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase layanan Pusdalops PB	100%	100%	100%
2.1. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	365 Lap.	365 Lap.	100%
2.2. Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2 Dok	2 Dok	100%
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kejadian bencana yang tertangani dalam masa tanggap darurat	100%	100%	100%
3.1. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dok	2 Dok	100%

3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250 Orang	250 Orang	100%
---	---	-----------	-----------	------

Sumber: Pusdalops PB BPBD Kabupaten Jombang 2023

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Program Penanggulangan Bencana sebesar 100% dihitung melalui capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercapai 100% sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Capaian kinerja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran adalah sebesar 100% yang dicapai berdasarkan hasil capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang dapat disajikan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pemadaman kebakaran, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditangani dalam waktu tanggap	100%	100%	100%
1.1. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Lap	12 Lap	100%

Sumber: Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kabupaten Jombang 2023

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar 100% dihitung melalui capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercapai 100% sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar 100% yang dicapai berdasarkan hasil capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang dapat disajikan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100%
1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok	100%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	10 Orang	100%
2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok.	12 Dok.	100%
2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	1 Lap.	100%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%

3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 Paket	46 Paket	100%
3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100%
3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	100%
3.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
3.6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dok.	4 Dok.	100%
3.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Lap.	10 Lap.	100%
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang direncanakan	12 Lap.	12 Lap.	100%
4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa pelayanan umum kantor yang direncanakan	12 Lap.	12 Lap.	100%
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100%
5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	100%

5.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit	100%
--	--	---------	---------	------

Sumber: Sekretariat BPBD Kabupaten Jombang 2023

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100% dihitung melalui capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercapai 100% sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2021 – 2023 disajikan pada tabel berikut:

REALISASI KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021-2023

Sasaran/Program	Indikator	2021	2022	2023
1. Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	N/A	N/A	100%
1.1. Program Penanggulangan Bencana	Persentase layanan penanggulangan bencana yang dipenuhi	N/A	N/A	100%
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	N/A	N/A	100%
2.1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dalam Waktu Tanggap (Respon Time)	N/A	N/A	100%
3. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Tahun N	N/A	N/A	101%
3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	N/A	N/A	100%

Sumber: Sekretariat BPBD Kabupaten Jombang 2023

Pada Tahun 2023 terdapat perubahan Indikator Sasaran dari Indikator Ketahanan Daerah menjadi Persentase Capaian Indikator Ketahanan Daerah sehingga capaian realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya.

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Capaian Realisasi Kinerja dalam Periode Renstra

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian					Target Akhir Renstra	Kemajuan
		2021	2022	2023				
				Tar get	Rea lisa si	Ha sil		
Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persentase capaian Indikator Ketahanan Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Tahun N	B (60)	BB (65,56)	BB (70)	BB (70,01)	101%	BB (75)	94.68%

Sumber : IRBI BNPB, 2023, IRB Prov Jatim, 2023, Inspektorat Kab Jombang, 2023

Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana yang dihitung dengan Indeks Ketahanan Daerah yang merupakan salah satu komponen penyusun yang paling cepat dicapai dari penghitungan Indeks Risiko Bencana, Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah. Penilaian secara berkala dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu yang berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Timur melalui IRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Jombang sebesar 0,41 pada Tahun 2023 dapat diartikan bahwa Indeks Ketahanan Daerah telah dicapai dengan baik dengan perolehan Nilai indeks sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target Renstra dapat dipenuhi.

Upaya pencapaian sasaran Meningkatkan Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan dalam bentuk Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi berupa pelaksanaan kegiatan penanganan kebakaran yang dilaksanakan selama 24 jam dalam 7 hari kerja telah berhasil dicapai dengan sempurna dengan tertanganinya seluruh kejadian Kebakaran, Kondisi Membahayakan Manusia dan Bahan Berbahaya dan Beracun dengan baik. Capaian Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi sebesar 100% pada Tahun 2023 dapat diartikan bahwa meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan

Penyelamatan di Kabupaten Jombang mencapai 100% sepanjang periode Renstra atau 100% pada tahun 100.

Capaian hasil evaluasi SAKIP masih terhambat permasalahan-permasalahan yang timbul, akan tetapi munculnya permasalahan diharapkan dapat diselesaikan dengan melakukan tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi perbaikan dan masih mengalami peningkatan dalam periode Renstra. Capaian Nilai Evaluasi SAKIP dari nilai 65.56 pada Tahun 2022 menjadi 70.01 dapat diartikan bahwa meningkatnya Capaian Nilai Evaluasi SAKIP pada BPBD Kabupaten Jombang mencapai 94,68% sepanjang periode Renstra atau 101% pada Tahun 2023.

Penghitungan sasaran Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah dan Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan dengan indikator Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi tahun 2021 dan 2022 tidak bisa dijadikan komponen dasar dalam penghitungan persentase kemajuan capaian realisasi kinerja, hal ini diakibatkan karena adanya perubahan nomenklatur Sasaran Strategis dan Indikatornya sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuanga Daerah.

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja level nasional/ internasional

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Provinsi dan Nasional

Sasaran	Indikator	Realisasi Kab. Jombang Tahun 2023	Realisasi Prov. Jatin Tahun 2023	Realisasi Nasional	Ket.
Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,41	0,65	0,79	(+)
Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	100%	100%	100%	(+)

Sumber: BNPB, 2023, BPBD Prov. Jatin, 2023, Satpol PP Prov. Jatin, 2023.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2023, capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang berkontribusi positif pada capaian Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur dan nasional. Meningkatnya ketangguhan/ketahanan Kabupaten Jombang menjadi faktor penambah dan pendorong Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Indeks Ketahanan Nasional. Penanganan seluruh kejadian kebakaran yang dilaksanakan di Kabupaten Jombang juga menjadi faktor untuk mempertahankan pelayanan pencegahan bahaya kebakaran di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

3.1.5. Analisis atas realisasi kinerja

Pencapaian target kinerja pada BPBD Kabupaten Jombang, tidak terlepas dari terlaksananya program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat dianalisis yaitu:

A. Program Penanggulangan Bencana:

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana:
 - a. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana:
 - a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
 - b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

B. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran:

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dijabarkan sebelumnya tidak terdapat permasalahan yang berarti. Hal ini dibuktikan bahwa seluruh target kinerja Program dan kegiatan dengan capaian 100%.

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang tetap menghadapi hambatan-hambatan yang dapat disajikan sebagai berikut:

1. Masih minimnya kebijakan daerah tentang penanggulangan bencana;
2. Struktur organisasi BPBD yang masih Type B;
3. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu yang belum memuat peta dan analisa penyelenggaraan penanggulangan bencana

4. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik masih dikonsentrasikan pada internal BPBD;
5. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana masih berkuat pada Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
6. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana masih belum dilaksanakan;
7. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana masih berkonsentrasi pada penanganan darurat bencana;
8. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana hanya pada penggantian bahan material;
9. Pemadam Kebakaran dan Penyelamat belum berdiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah tersendiri yang mengakibatkan tidak seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan;
10. Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang sudah disusun pada tahun 2013 membutuhkan update, sehingga tidak lagi dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan;
11. Pos Pemadam Kebakaran Ploso dan Ngoro yang telah diaktifkan belum memiliki bangunan fisik Pos Damkar yang laik sehingga keamanan peralatan dan kendaraan sangat mengkhawatirkan;
12. Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana” belum memenuhi kriteria SMART pada aspek Spesifik karena belum menggambarkan parameter kinerja secara khusus;
13. Target Kinerja yang ditetapkan pada Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana” belum cukup menantang karena menggunakan formulasi/ perhitungan yang kurang sesuai;
14. Atas penetapan target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya namun hanya menganalisa capaian pada Tahun 2022, sedangkan realisasi tahunan tidak disajikan pada Berita Acara Monitoring maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022;
15. Telah terdapat Standar Operasional Prosedur monitoring capaian target jangka menengah namun jadwal pelaksanaan monitoring belum tersaji;
16. Upaya perbaikan yang disajikan pada Berita Acara Reviu Renstra belum menunjukkan perbaikan yang signifikan;
17. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/penghasilan (pemberian/pengurangan) sebagaimana penggunaan aplikasi aplikasi TPP melalui e-office kabupaten, namun berdasarkan rekapitulasi penilaian kinerja pegawai yang dilampirkan dalam rangka pemberian reward dan punishment tidak didapati standar yang jelas dalam pengukuran kualitas kinerja yang dihasilkan oleh individu pegawai sebagai

salah satu parameter dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan;

18. Pengukuran Kinerja yang telah dilakukan sampai dengan tribulan II belum didapati bukti yang cukup bahwa hasil evaluasi atas pengukuran kinerja berdampak secara maksimal atas penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja pada periode berikutnya;
19. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan yaitu belum menyajikan efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang menjelaskan kondisi perbandingan antara kebutuhan standar SDM dan sarana dan prasarana dengan kondisi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang;
20. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk dasar dilakukan penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja sebagai contoh dalam melakukan penyesuaian anggaran hanya didasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah;
21. Evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja

3.2. Realisasi Anggaran

Capaian realisasi keuangan atas pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada BPBD Kabupaten Jombang secara keseluruhan tercapai sebesar 92,69% yang dialokasikan untuk 3 (tiga) program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.6.563.073.886,- dan capaian realisasi keuangan sampai dengan Rp.6.083.175.616,-.

Realisasi keuangan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Realisasi Keuangan Tiap Sub Kegiatan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
I	Program Penanggulangan Bencana	2.370.569.401	2.229.908.621	94,07%
I.1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	409.350.000	407.870.000	99,64%
I.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	247.550.000	246.320.000	99,50%

I.1.2	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	161.800.000	161.550.000	99,85%
I.2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.682.789.400	1.543.619.886	91,73%
I.2.1	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.682.289.400	1.543.119.886	91,73%
I.2.2	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	500.000	500.000	100,00%
I.3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	278.430.001	278.418.735	100,00%
I.3.1	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	84.700.001	84.689.235	99,99%
I.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	193.730.000	193.729.500	100,00%
II	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.431.897.200	1.317.646.073	92,02%
II.1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.431.897.200	1.317.646.073	92,02%

II.1.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kab/Kota	1.431.897.200	1.317.646.073	92,02%
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.760.607.285	2.535.620.922	91,85%
III.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.140.000	5.752.000	93,68%
III.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.510.000	3.392.000	96,64%
III.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.630.000	2.360.000	89,73%
III.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.605.920.100	1.424.200.974	88,68%
III.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.503.467.350	1.329.310.974	88,42%
III.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.262.500	93.125.000	92,88%
III.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.190.250	1.765.000	80,58%
III.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.561.788	261.925.588	94,71%
III.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	10.018.888	10.018.800	100,00%
III.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	22.050.900	22.048.500	99,99%
III.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.237.000	10.181.350	99,46%
III.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.182.500	117.295.230	90,80%

III.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.580.500	12.495.550	99,32%
III.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000	1.860.000	83,78%
III.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.272.000	88.026.158	97,51%
III.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.160.009	603.488.288	95,62%
III.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	120.200.009	107.571.440	89,49%
III.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510.960.000	495.916.848	97,06%
III.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.825.388	240.254.072	99,76%
III.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.900.000	40.849.975	99,88%
III.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.260.000	115.255.214	100,00%
III.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.665.388	84.148.883	99,39%
Jumlah		6.563.073.886	6.083.175.616	92,69%

Sumber: diolah, BPBD Kab. Jombang 2023

Dari tabel tersebut diatas, persentase realisasi keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Persentase Realisasi Keuangan Tahun 2023

No	Persentase Realisasi keuangan	Jumlah	Ket.
1	95,01 – 100%	15	Sub Kegiatan
2	90,01 – 95,00%	4	Sub Kegiatan
3	00,00 – 90,00 %	5	Sub Kegiatan
	Jumlah	24	Sub Kegiatan
			100%

Sumber: diolah, BPBD Kab. Jombang 2023

Capaian realisasi yang tidak mencapai 100% disebabkan karena beberapa faktor yaitu:

1. Pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan riil;
2. Efisiensi anggaran dari masing-masing kegiatan.

3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

Dalam memberikan layanan penanggulangan bencana dan kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang bertanggung jawab mencapai target kinerja dan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023. Capaian realisasi kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2023 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023

Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Program Penanggulangan Bencana	Persentase layanan penanggulangan bencana yang dipenuhi	100%	100%	100%	2.760.607.285	2.535.620.922	91,85%
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dalam Waktu Tanggap (Respon Time)	100%	100%	100%	2.370.569.401	2.229.908.621	94,07%
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	1.431.897.200	1.317.646.073	92,02%
Total		100%	100%	100%	6.563.073.886	6.083.175.616	92,69%

Sumber: diolah, BPBD Kabupaten Jombang 2023

Sebagaimana tabel di atas, dapat dijabarkan bahwa pada Tahun 2023 capaian kinerja program dapat dicapai 100% yang

diartikan bahwa seluruh pelayanan penanggulangan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran serta pemenuhan kebutuhan pegawai dan administratif rutin dapat dipenuhi sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 92,69% sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja dapat dicapai dengan meminimalkan penggunaan anggaran berbasis pengeluaran riil.

3.2.2. Efisiensi penggunaan sumber daya

A. Efisiensi Penggunaan SDM

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dikukung oleh sumber daya manusia untuk mencapai sasaran kinerja tahunan dapat disajikan sebagai berikut:

No	Jenis Jabatan	Keter sediaan	Kebu tuhan	Selisih
1	Kepala Pelaksana	1	1	0
2	Analisis Kebakaran Ahli Madya	0	3	-3
3	Perencana Ahli Muda	0	1	-1
4	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	0	6	-6
5	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	0	3	-3
6	Analisis Kebakaran Ahli Muda	0	3	-3
7	Sekretaris	1	1	-1
8	Perencana Ahli Pertama	0	1	-1
9	Bendahara	0	1	-1
10	Pengelola Keuangan	1	0	0
11	Pengelola Barang Milik Negara	0	1	-1
12	Pengelola Kendaraan	0	1	-1
13	Pengelola Gudang	0	1	-1
14	Pengelola kepegawaian	0	1	-1
15	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	0	1	-1
16	Pengadministrasi Persuratan	0	1	-1
17	Pramu Kebersihan	0	1	-1
18	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	1	0
19	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	0	4	-4
20	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	0	1	-1
21	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	0	5	-5
22	Pemadam Kebakaran Penyelia	0	4	-4
23	Pemadam Kebakaran Mahir	0	30	-30
24	Pemadam Kebakaran Terampil	0	51	-51
25	Pemadam Kebakaran Pemula	0	60	-60
26	Pranata Bencana	0	4	-4
27	Pranata Pemadam Kebakaran	3	3	0
28	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	1	1	0
29	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	0	4	-4

30	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	0	1	-1
31	Pranata Bencana	0	35	-35
32	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	1	0
33	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	0	2	-2
34	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	0	1	-1
35	Pranata Bencana	0	4	-4
Jumlah		9	239	-230

Sumber: Sekretariat BPBD Kabupaten Jombang 2023

Capaian kinerja tahun 2023 yang tercapai 100% sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan dapat diraih walaupun ketersediaan ASN di BPBD hanya sejumlah (sembilan) orang, akan tetapi didukung oleh Pegawai Non ASN sejumlah 71 (tujuh puluh satu orang) sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai target kinerja dapat dilakukan dengan tidak mengurangi capaian kinerja BPBD Kab. Jombang.

B. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah dimiliki yang dapat disajikan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Keter sediaan	Kebu tuhan	Selisih
1	excavator lainnya (dst)	1	1	0
2	alat pengangkat lainnya (dst)	1	1	0
3	Water Treatment (Mesin Proses)	1	1	0
4	Transportable Generating Set	2	2	0
5	Portable Generating Set	6	6	0
6	Transportable Water Pump	1	1	0
7	Pompa Air	1	1	0
8	pompa lainnya (dst)	10	10	0
9	Breathing Aparatus (Tabung 10 kg)	11	11	0
10	Jeep	1	1	0
11	Station Wagon	4	4	0
12	Truck + Attachment	1	1	0
13	Pick Up	1	1	0
14	Sepeda Motor	23	23	0
15	Mobil Ambulance	4	4	0
16	Mobil Pemadam Kebakaran	6	6	0
17	Mobil Tangki Air	2	2	0
18	Kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	4	4	0
19	Speed Boat / Motor Tempel	1	1	0
20	Perahu Penumpang	1	1	0

21	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	1	1	0
22	Mesin Gerinda	1	1	0
23	Mesin Gergaji	2	2	0
24	Gergaji Chain Saw	6	6	0
25	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	1	0
26	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2	2	0
27	Lemari Besi/Metal	1	1	0
28	Lemari Kayu	5	5	0
29	Rak Besi	5	5	0
30	Rak Kayu	3	3	0
31	Filing Cabinet Besi	5	5	0
32	Brandkas	1	1	0
33	Alat Penghancur Kertas	1	1	0
34	Mesin Absensi	1	1	0
35	Papan Nama Instansi	1	1	0
36	Kursi Kayu	1	1	0
37	Sice	1	1	0
38	Meja Rapat	1	1	0
39	Meja Tambahan	2	2	0
40	Meja 1/2 Biro	36	36	0
41	Kursi Biasa	11	11	0
42	Kursi Lipat	5	5	0
43	Sofa	1	1	0
44	Meubeleur lainnya	25	25	0
45	Mesin Pemotong Rumput	1	1	0
46	Lemari Es	1	1	0
47	A.C. Split	7	7	0
48	Kipas Angin	4	4	0
49	Exhause Fan	2	2	0
50	Televisi	5	5	0
51	Wireless	1	1	0
52	Tangga Aluminium	1	1	0
53	Alat Pemadam/Portable	4	4	0
54	Hidran Kebakaran	1	1	0
55	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0
56	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	0
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	0
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	2	2	0
60	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	1	1	0
61	Buffet Kaca	1	1	0
62	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	1	0
63	Camera Electronic	3	3	0
64	Layar Film/Projector	2	2	0
65	Camera Conference	1	1	0
66	Alat Studio Video Lainnya	9	9	0
67	Alat Studio Lainnya	7	7	0
68	Handy Talky (HT)	41	41	0
69	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	1	0

70	Unit Tranceiver VHF Portable	1	1	0
71	Unit Tranceiver UHF Portable	1	1	0
72	Satellite Link (Up/Down Link)	1	1	0
73	switcher/menara antena lainnya (dst)	1	1	0
74	Alat Kedokteran umum lainnya	2	2	0
75	Meja Kerja	2	2	0
76	Alat Khusus Keamanan Lainnya	4	4	0
77	alat keamanan lainnya (dst)	1	1	0
78	Tameng	3	3	0
79	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	1	0
80	P.C Unit	4	4	0
81	Lap Top	6	6	0
82	Note Book	2	2	0
83	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	1	0
84	Monitor	1	1	0
85	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	14	0
86	Peralatan Komputer lainnya	1	1	0
87	Tenda	17	17	0
88	alat sar lainnya lainnya (dst)	2	2	0
89	Monitor Display Ruang Pertemuan	0	4	4
90	Kamera Zoom Ruang Pertemuan	0	1	1
91	Monitor Pusdalops	0	8	8
92	Meja Kayu Workstation Pusdalops	0	1	1
93	Komputer Pusdalops	0	1	1
94	Kursi Staf n Pusdalops	0	10	10
95	HP Pusdalops	0	1	1
96	Kompresor ban	0	1	1
97	Kursi pimpinan ruang pertemuan	0	3	3
98	Kursi peserta ruang pertemuan	0	50	50
99	Mesin Finger Print	0	1	1
100	Mesin Standpet	0	1	1
101	Mesin Penghancur kertas	0	1	1
102	Printer Multi A3	0	1	1
103	Almari arsip Dorong	0	2	2
104	Underwater Searching Device	0	1	1
105	Aqua eye	0	1	1
106	Laptop Bendahara	0	1	1
107	Sound lapangan	0	1	1
108	Manekin RJP	0	1	1
109	Alat klem selang damkar	0	1	1
110	Selang Pemadam Kebakaran 1,5"	0	20	20
111	Printer Epson L121	0	2	2
112	AC Split 2 pk	0	2	2
Jumlah		372	488	116

Sumber: Sekretariat BPBD Kabupaten Jombang 2023

Capaian kinerja tahun 2023 yang tercapai 100% sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan dapat diraih dengan memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sarana

dan prasarana dalam mencapai target kinerja dapat dilakukan dengan tidak mengurangi capaian kinerja BPBD Kab. Jombang.

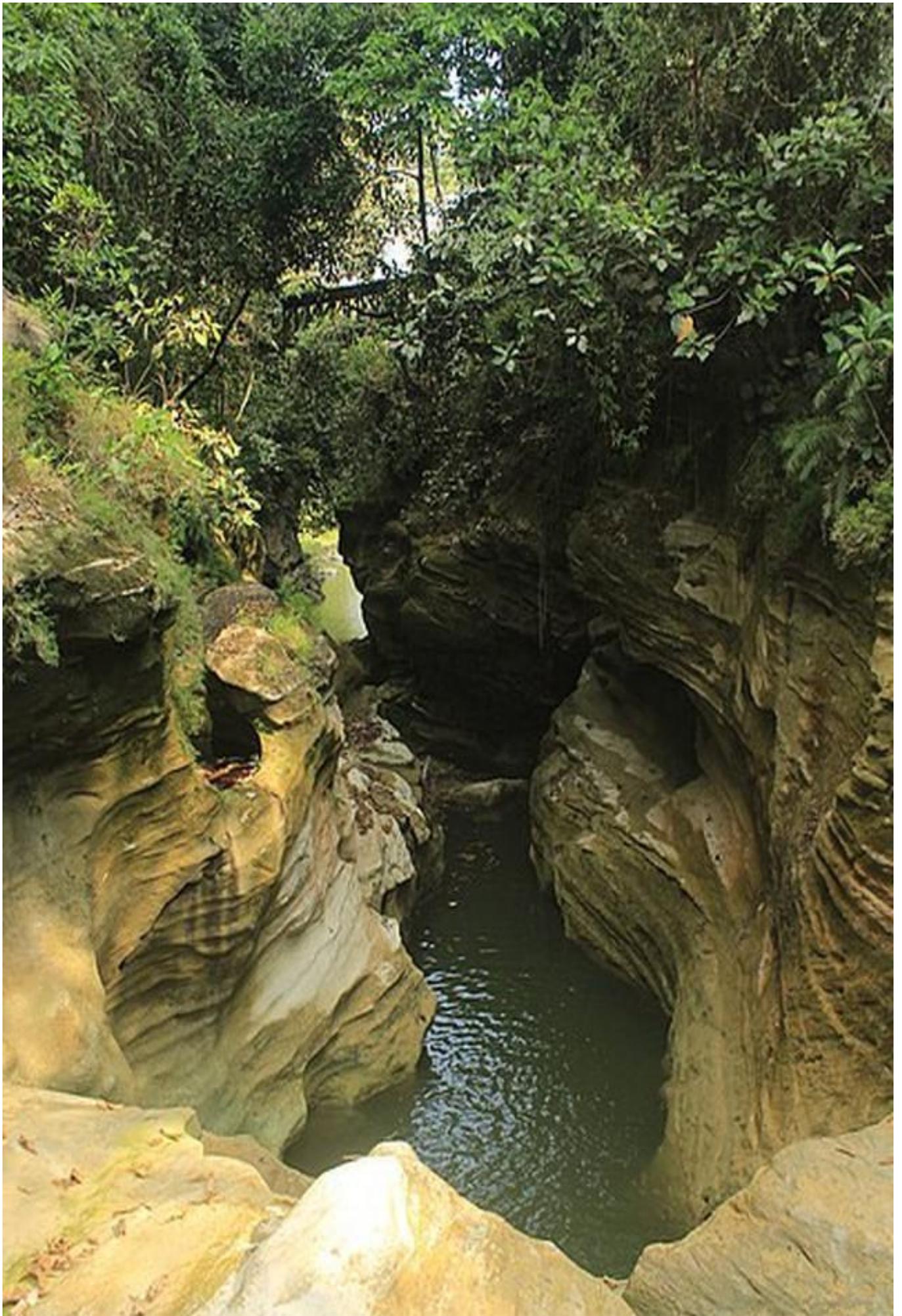
3.3. Upaya Perbaikan kinerja

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat, diperlukan solusi-solusi alternatif sebagai upaya-upaya perbaikan kinerja yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Diperlukan keikutsertaan unsur legislatif dalam penyusunan perundang-undangan dengan berbasis pada pengurangan resiko bencana;
2. Pelibatan unsur akademisi dalam hal penyusunan kajian teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana akan dapat membantu pemenuhan kebutuhan dokumen kajian, perencanaan kebencanaan;
3. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan dan Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari unsur pentahelix;
4. meningkatkan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana dalam hal Penerapan sumur resapan dan/atau biopori, Perlindungan daerah tangkapan air, Restorasi sungai, Penguatan lereng, Optimalisasi pemanfaatan air permukaan, Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi, Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota dan Konservasi vegetatif DAS rawan longsor;
5. Penguataan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam bentuk penyusunan Rencana Kontinjensi dan pengaktifasian sistemperingatan dini untuk masing-masing ancaman;
6. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dalam bentuk Pemulihan pelayanan dasar pemerintah, Pemulihan infrastruktur penting, Perbaikan rumah penduduk dan Pemulihan Penghidupan masyarakat
7. Mengusulkan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kabupaten Jombang agar pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan sebagai salah satu Urusan Wajib Pelayanan dasar dapat dilaksanakan dengan maksimal;
8. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dapat dilakukan bekerjasama dengan unsur-unsur Pentahelix Penanggulangan Bencana.
9. Melakukan evaluasi kembali dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang atas indikator kinerja, formulasi, dan target yang digunakan pada sasaran Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dengan indikator Persentase Capaian Indikator

Ketahanan Daerah untuk ditetapkan pada Renstra periode selanjutnya;

10. Menyusun mekanisme Monitoring Target Jangka menengah meliputi proses evaluasi dan jadwal monitoring sebagai pedoman untuk monitoring pada periode selanjutnya sehingga hasil monitoring dapat menyajikan secara detail hambatan, upaya, dan rekomendasi yang dapat memberikan perbaikan;
11. Menyusun mekanisme reward and punishment dengan menyajikan parameter hasil pengukuran kinerja untuk memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja, serta menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu kondisi atau keadaan;
12. Mengusulkan kepada BKPSDM Kabupaten Jombang agar menambahkan parameter standar atas kinerja sebagai kriteria pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
13. Meningkatkan kualitas evaluasi pengukuran kinerja untuk selanjutnya memanfaatkan hasil evaluasi pengukuran kinerja sebagai bahan untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja;
14. Menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja;
15. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran, maupun perencanaan kinerja;
16. Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target.



BAB IV
Penutup



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, telah berupaya mengelola sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada BPBD. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang yang meliputi capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan.

Dari uraian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, secara ringkas disampaikan bahwa diawali dari memilah isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran yang sesuai dengan isu strategis yang dilanjutkan dengan menetapkan target kinerja dan melakukan analisis terhadap kinerja tersebut melalui pengukuran capaian kinerja maupun akuntabilitas keuangan. Setelah dilaksanakan analisis bahwa seluruh target/sasaran yang ditetapkan telah tercapai maka dapat disimpulkan bahwa kinerja sesuai tupoksi maupun tugas tambahan yang dipercayakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang telah dilaksanakan dengan baik.

4.2. Rekomendasi

Menyikapi tantangan yang dihadapi selama ini, maka beberapa strategi perlu dirumuskan kembali untuk pencapaian dan peningkatan kualitas Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jombang, antara lain:

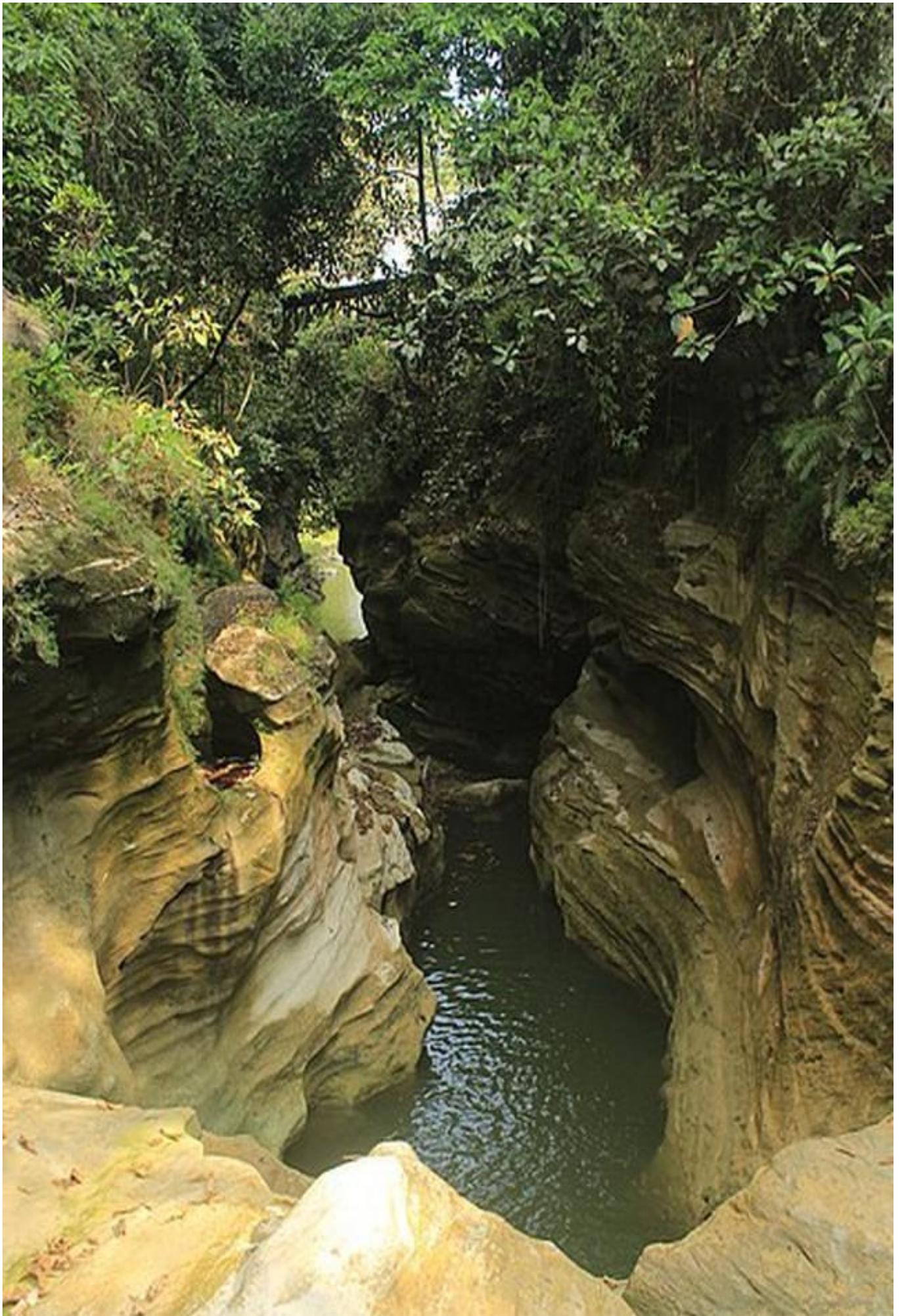
1. Meningkatkan jumlah dan jenis dokumen perencanaan kebencanaan;
2. Meningkatkan kemampuan teknis penanggulangan bencana melalui pendidikan dan latihan;
3. Melakukan perluasan jangkauan edukasi pengurangan risiko bencana dan kebakaran;

4. Memaksimalkan Pembentukan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana;
5. Memberikan pelatihan secara tepat kepada unsur Pentahelix Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dalam semua fasenya;
6. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan bidang kebencanaan dan kebakaran baik yang bersifat operasional maupun teknis administratif kepada aparatur pemerintah, sehingga kegiatan menjadi lebih akuntabel dan transparan;
7. Mendorong restrukturisasi kelembagaan BPBD Kabupaten Jombang untuk lebih memaksimalkan pelayanan pada masyarakat;
8. Meningkatkan dan mendorong kerjasama antara pemangku kepentingan penanggulangan bencana dan kebakaran terutama pada peran masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media;
9. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jombang dan DPRD Kabupaten Jombang untuk pengalokasian anggaran yang tepat pada upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di Kabupaten Jombang;
10. Melakukan kerjasama dengan lembaga donor nasional maupun internasional untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat, Program Corporate Social Responsibility (CSR) di berbagai lembaga usaha juga dapat dikelola sebagai bagian dukungan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk perbaikan kinerja dan pelayanan yang akan datang.

SALAM TANGGUH DAN SALAM KEMANUSIAAN.

INTINE TETEP SEMANGAT TANPO SAMBAT.

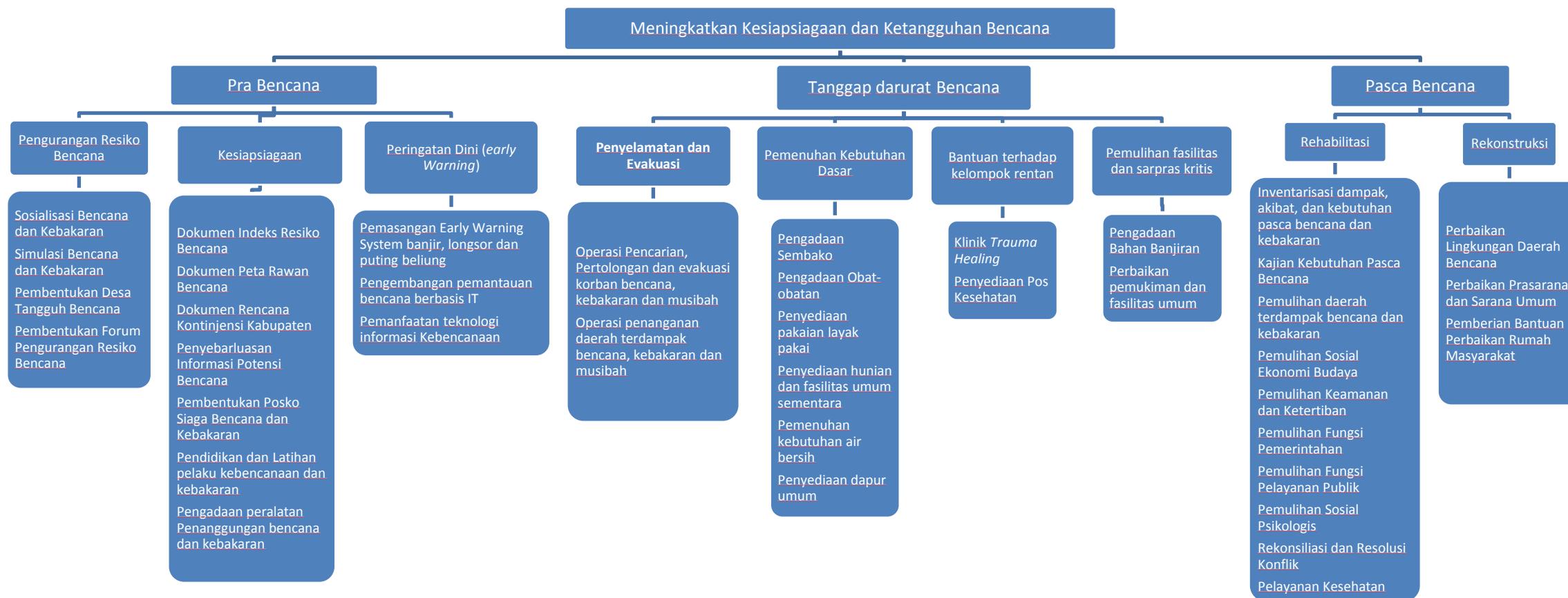


Lampiran 1

Peta Proses Bisnis



PETA PROSES BISNIS BPBD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019



Jombang, Oktober 2019
 KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN JOMBANG



Drs. ABDUL WAHAB
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670520 199403 1 009

PROSES BISNIS BPBD KAB. JOMBANG

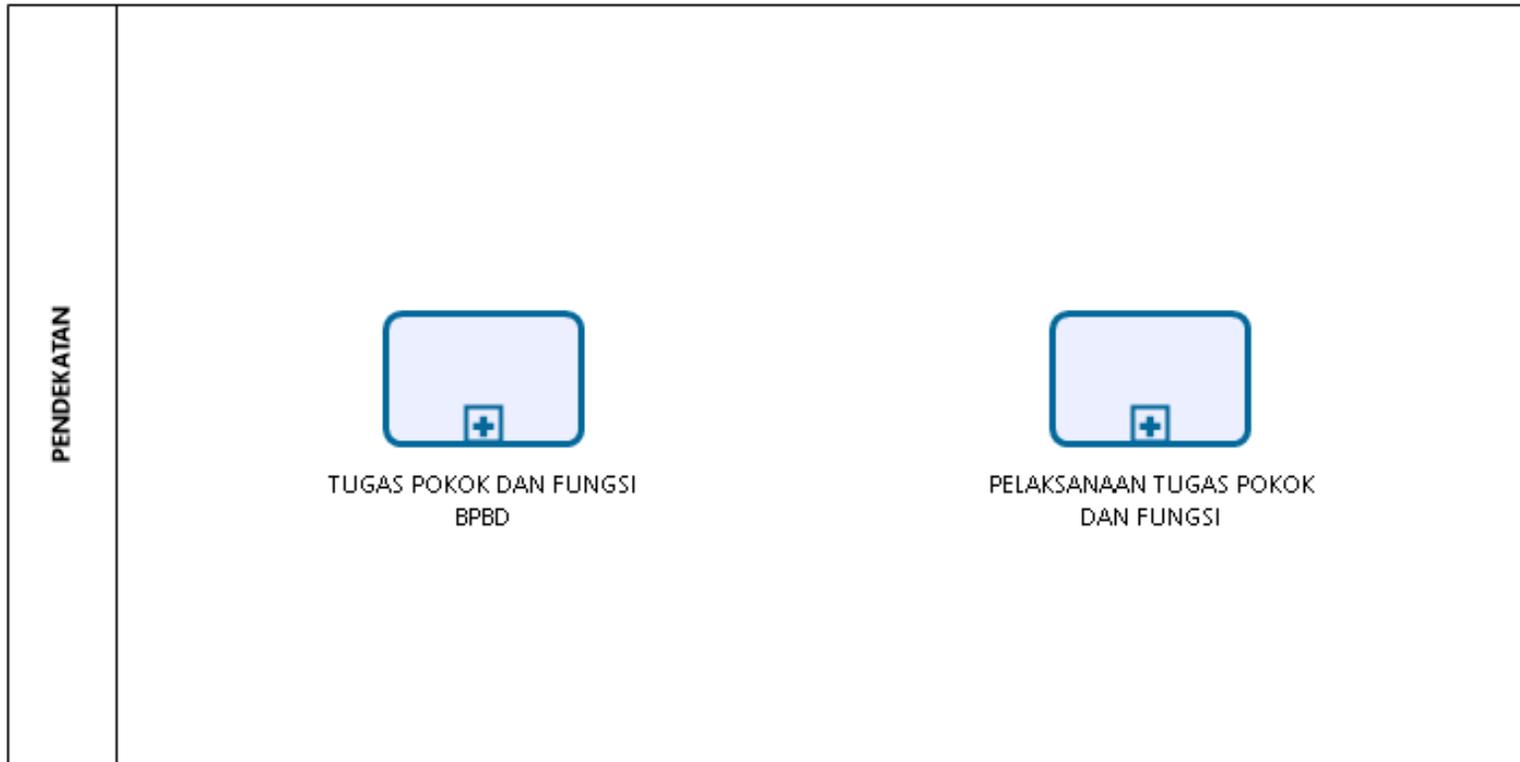
Bizagi Modeler

Table of Contents

PROSES BISNIS BPBD KAB. JOMBANG	1
BIZAGI MODELER	1
1 PROSES BISNIS BPBD	4
1.1 PENDEKATAN.....	5
1.1.1 Process Elements	5
1.1.1.1  PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
1.1.1.2 PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD - PETA RELASI BPBD  TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD	5
1.2 PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD - PETA RELASI BPBD	6
1.2.1 Process Elements	6
1.2.1.1  PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
1.2.1.2 PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD - PETA RELASI BPBD  TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD	6
1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD - MAIN PROCESS	7
1.3.1 Process Elements	7
1.3.1.1  PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	7
1.3.1.2 PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD - PETA RELASI BPBD  TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD	8
2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD	9
3 PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD.....	11
3.1 PETA RELASI BPBD	12
3.1.1 Process Elements	12
3.1.1.1  P.1. Program Penanggulangan Bencana	12
3.1.1.2  P.2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	12
3.1.1.3  P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12
3.2 P.1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - P.1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 13	13
3.2.1 Process Elements	13
3.2.1.1  P.1. Program Penanggulangan Bencana	13
3.2.1.2  P.2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	13
3.2.1.3  P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13
3.3 P.2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - PROCESS 1	14
3.3.1 Process Elements	14
3.3.1.1  P.1. Program Penanggulangan Bencana	14

3.3.1.2	☐P.2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	14
3.3.1.3	☐P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15
3.4	P. 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA - PROCESS 1	15
3.4.1	Process Elements	15
3.4.1.1	☐P.1. Program Penanggulangan Bencana	15
3.4.1.2	☐P.2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	16
3.4.1.3	☐P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16
4	P.1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	17
5	P.2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	19
6	P. 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	21

1 PROSES BISNIS BPBD



Version:

1.0

Author:

BPBD Jombang

1.1 P E N D E K A T A N

1.1.1 PROCESS ELEMENTS

1.1.1.1 PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

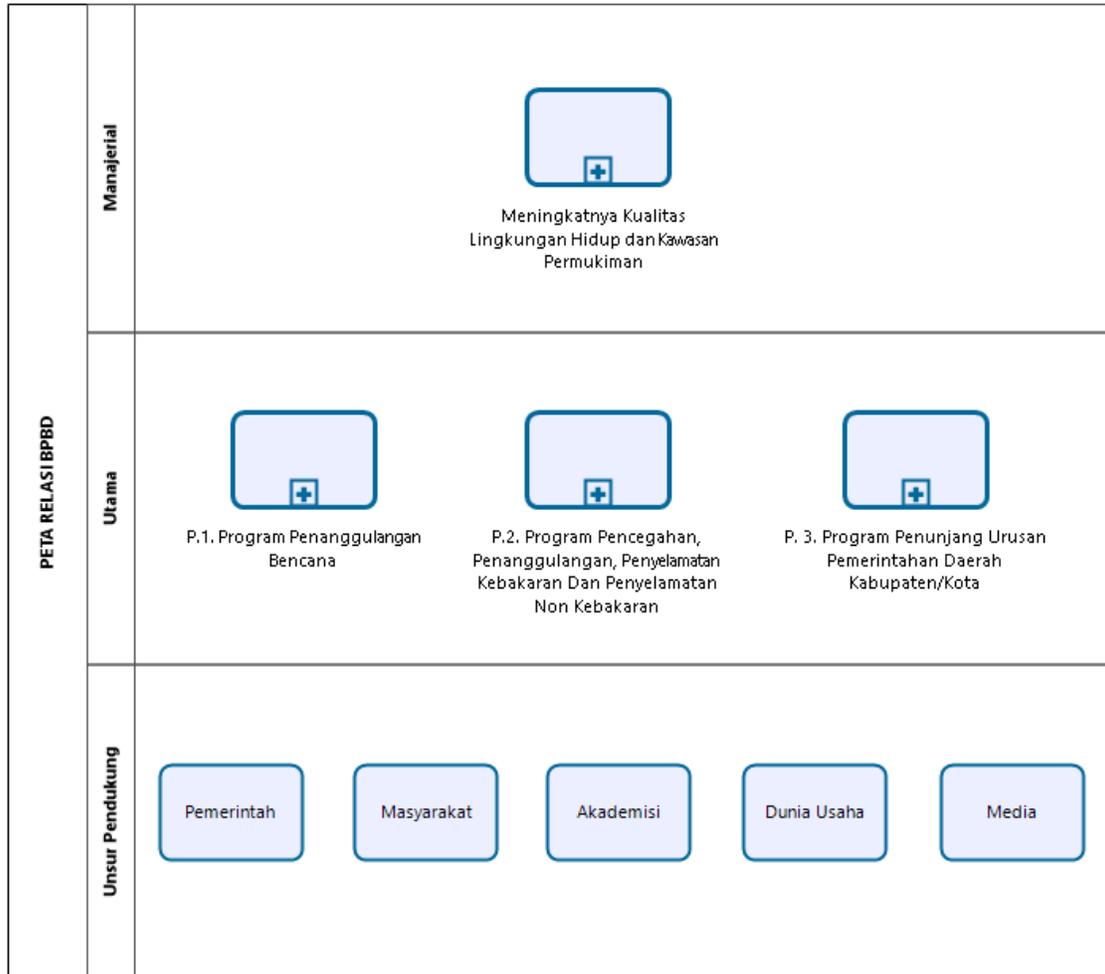
Process

1.1.1.2 [PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD - PETA RELASI BPBD TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD](#)

Process

[TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD - Main Process](#)

1.2 PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD - PETA RELASI BPBD



1.2.1 PROCESS ELEMENTS

1.2.1.1 PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

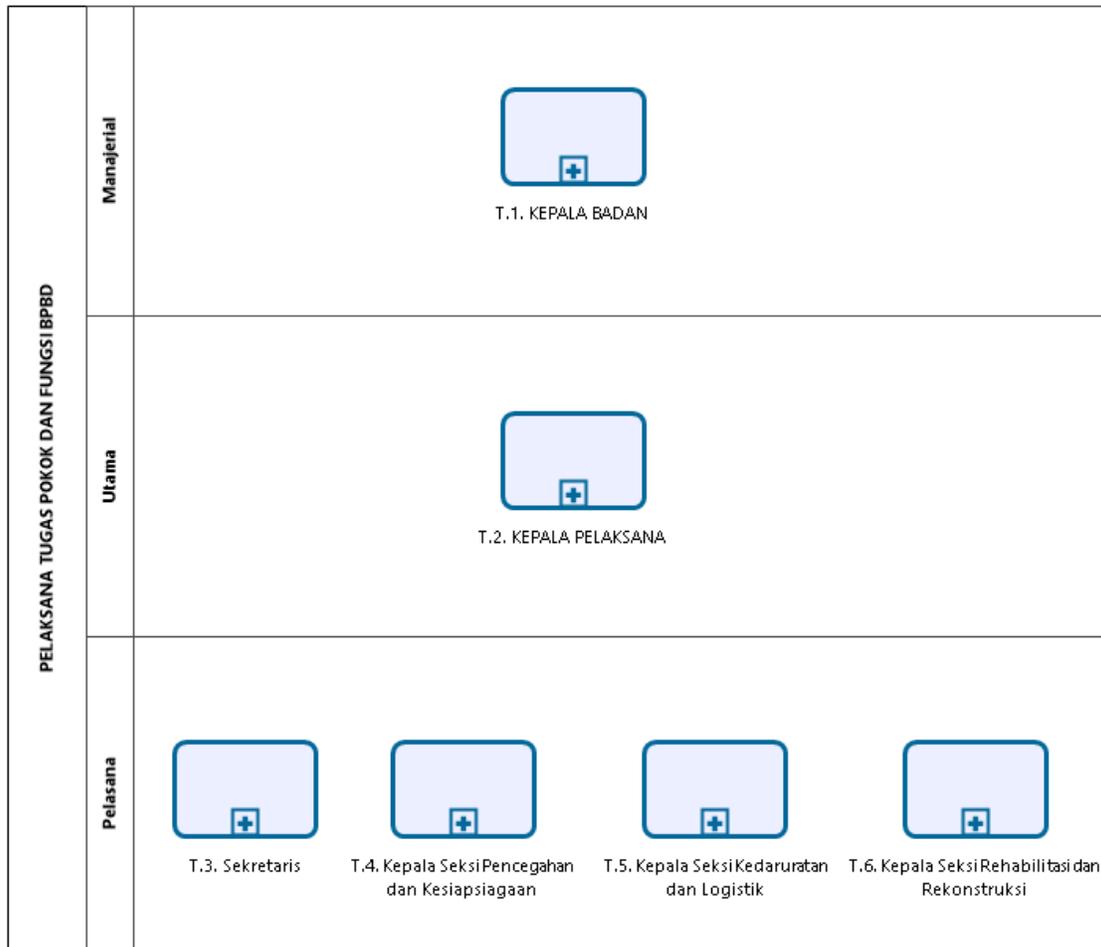
Process

1.2.1.2 [PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD - PETA RELASI BPBD](#) TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD

Process

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD - Main Process

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD - MAIN PROCESS



Powered by
bizagi
Modeler

1.3.1 PROCESS ELEMENTS

1.3.1.1 PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Process

1.3.1.2 [PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD - PETA RELASI BPBD](#)  TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD

Process

[TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD - Main Process](#)

2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD

PELAKSANA TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD	Manajerial	 T.1. KEPALA BADAN
	Utama	 T.2. KEPALA PELAKSANA
	Pelaksana	 T.3. Sekretaris  T.4. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan  T.5. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik  T.6. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

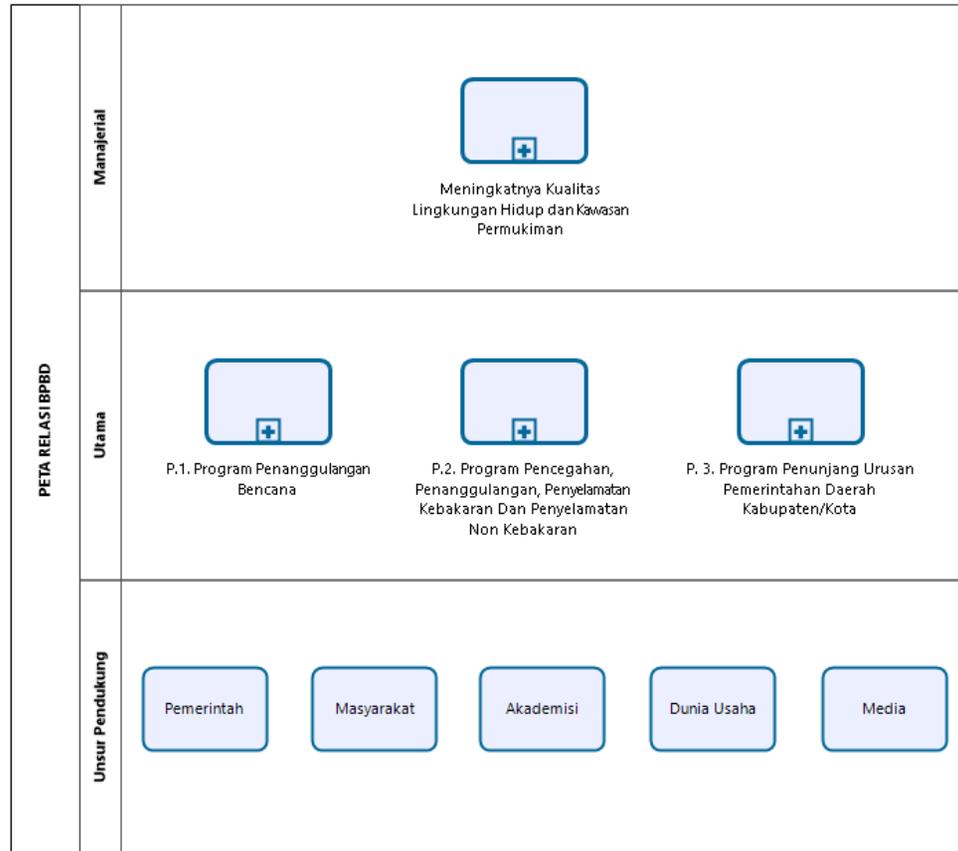
Version:

1.0

Author:

BPBD Jombang

3 PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD



Version:

1.0

Author:

BPBD Jombang

3.1 PETA RELASI BPBD

3.1.1 PROCESS ELEMENTS

3.1.1.1  P.1. Program Penanggulangan Bencana

Process

[P.1. Program Penanggulangan Bencana - P.1. Program Penanggulangan Bencana](#)

3.1.1.2  P.2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Process

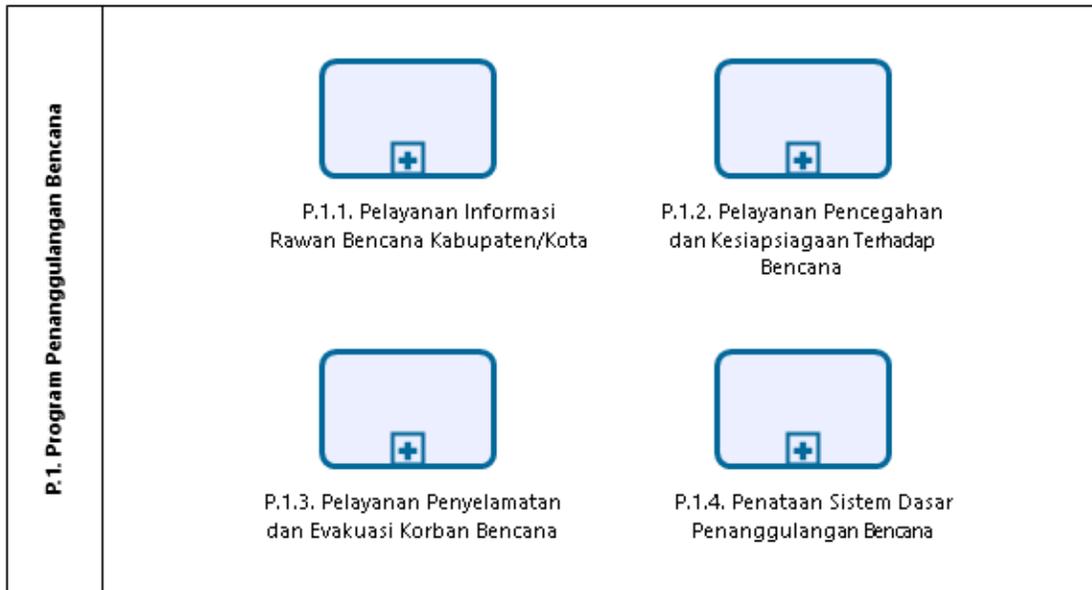
[P.2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran - P.2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran](#)

3.1.1.3  P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Process

[P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabupatenKota - P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota](#)

3.2 P.1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - P.1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA



Powered by
bizagi
Modeler

3.2.1 PROCESS ELEMENTS

3.2.1.1 P.1. Program Penanggulangan Bencana

Process

[P.1. Program Penanggulangan Bencana - P.1. Program Penanggulangan Bencana](#)

3.2.1.2 P.2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Process

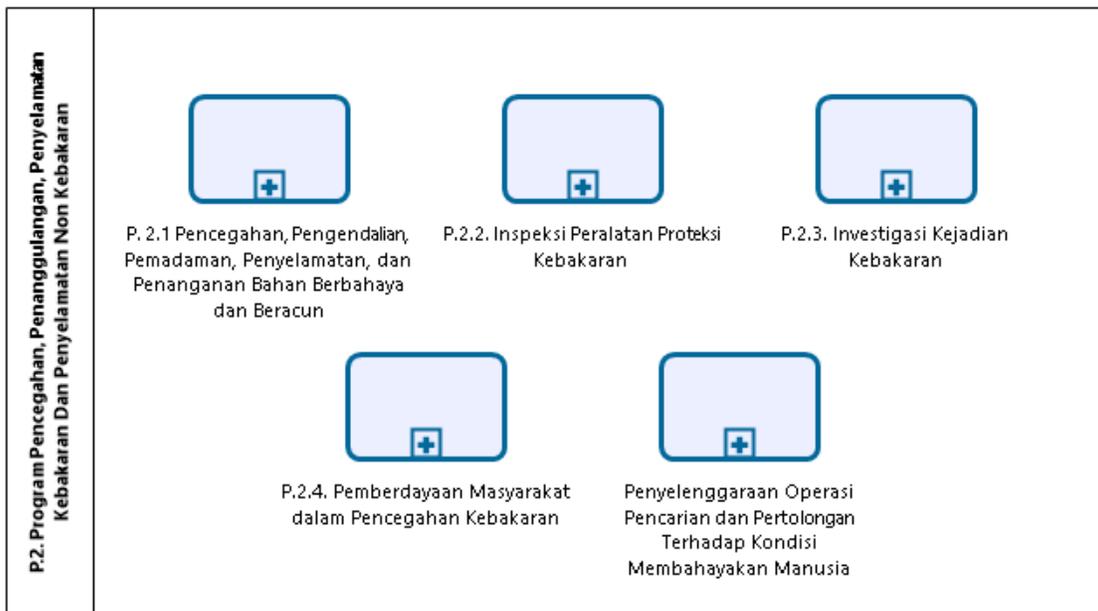
[P.2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran - P.2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran](#)

3.2.1.3 P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Process

[P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota](#)

3.3 P.2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - PROCESS 1



Powered by
bizagi
Modeler

3.3.1 PROCESS ELEMENTS

3.3.1.1 P.1. Program Penanggulangan Bencana

Process

[P.1. Program Penanggulangan Bencana - P.1. Program Penanggulangan Bencana](#)

3.3.1.2 P.2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Process

[P.2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran - P.2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran](#)

3.3.1.3  P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Process

[P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabupatenKota - P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota](#)

3.4 P. 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA - PROCESS 1

P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
---	--

Powered by
bizagi
Modeler

3.4.1 PROCESS ELEMENTS

3.4.1.1  P.1. Program Penanggulangan Bencana

Process

[P.1. Program Penanggulangan Bencana - P.1. Program Penanggulangan Bencana](#)

3.4.1.2  P.2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Process

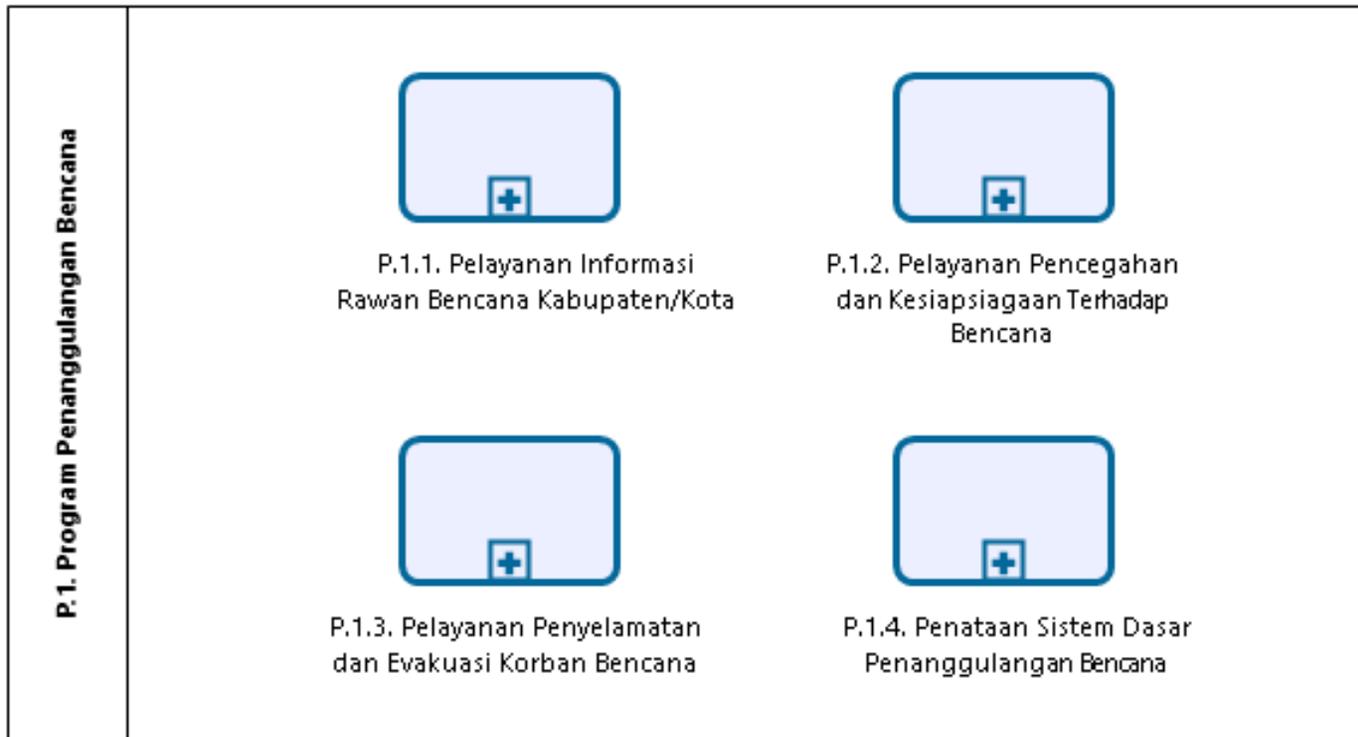
[P.2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran - P.2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran](#)

3.4.1.3  P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Process

[P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabupatenKota - P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota](#)

4 P.1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA



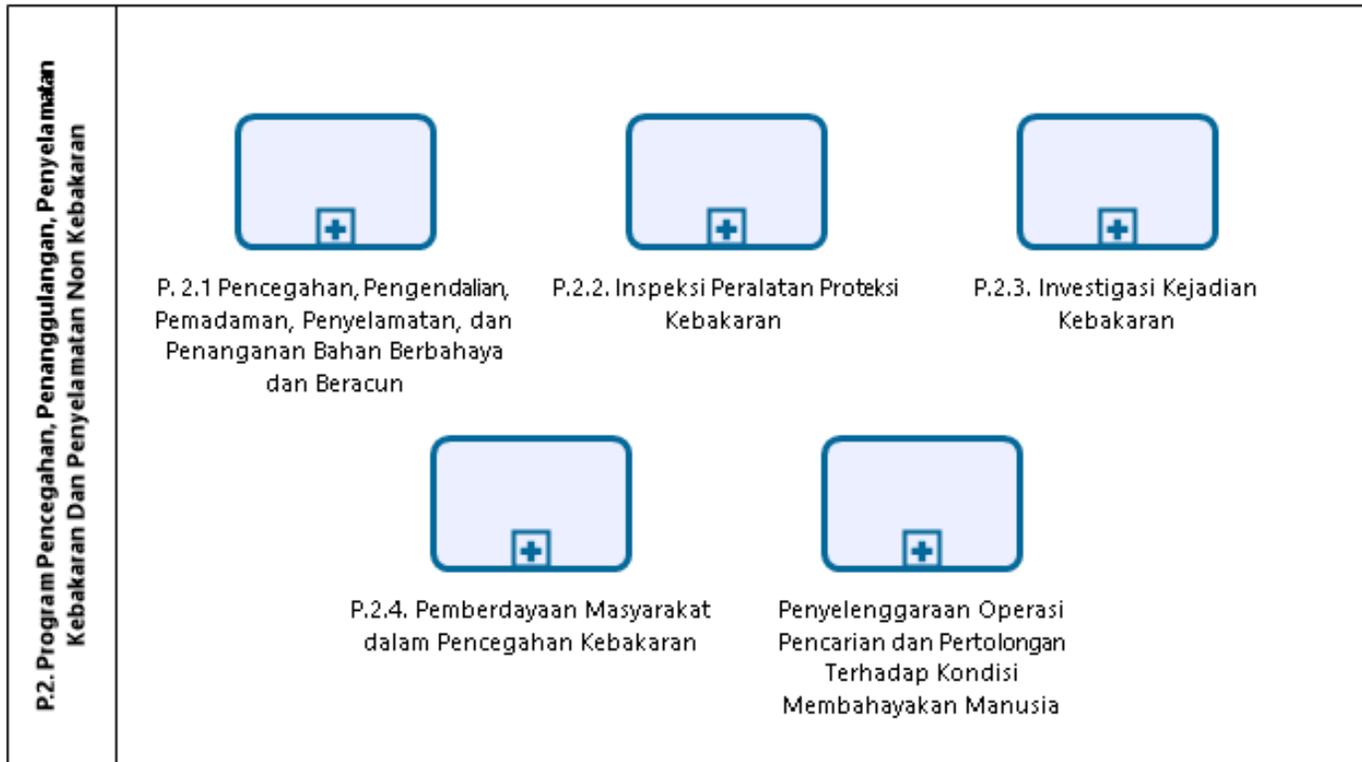
Version:

1.0

Author:

BPBD Jombang

5 P.2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN



Version:

1.0

Author:

BPBD Jombang

6 P. 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA

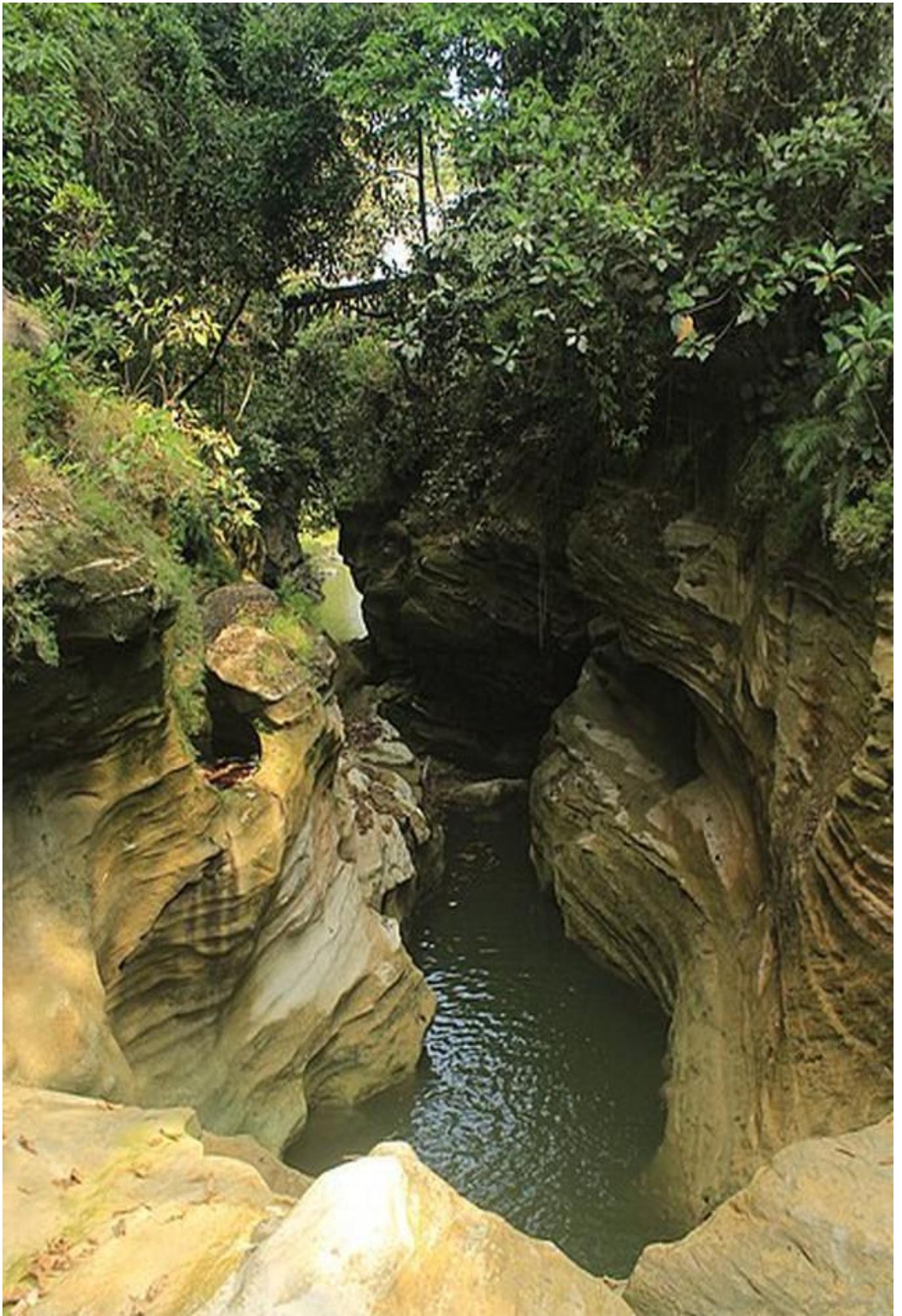
P. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
--	--

Version:

1.0

Author:

BPBD Jombang



Lampiran 99

Pendanaan Indikatif Renstra

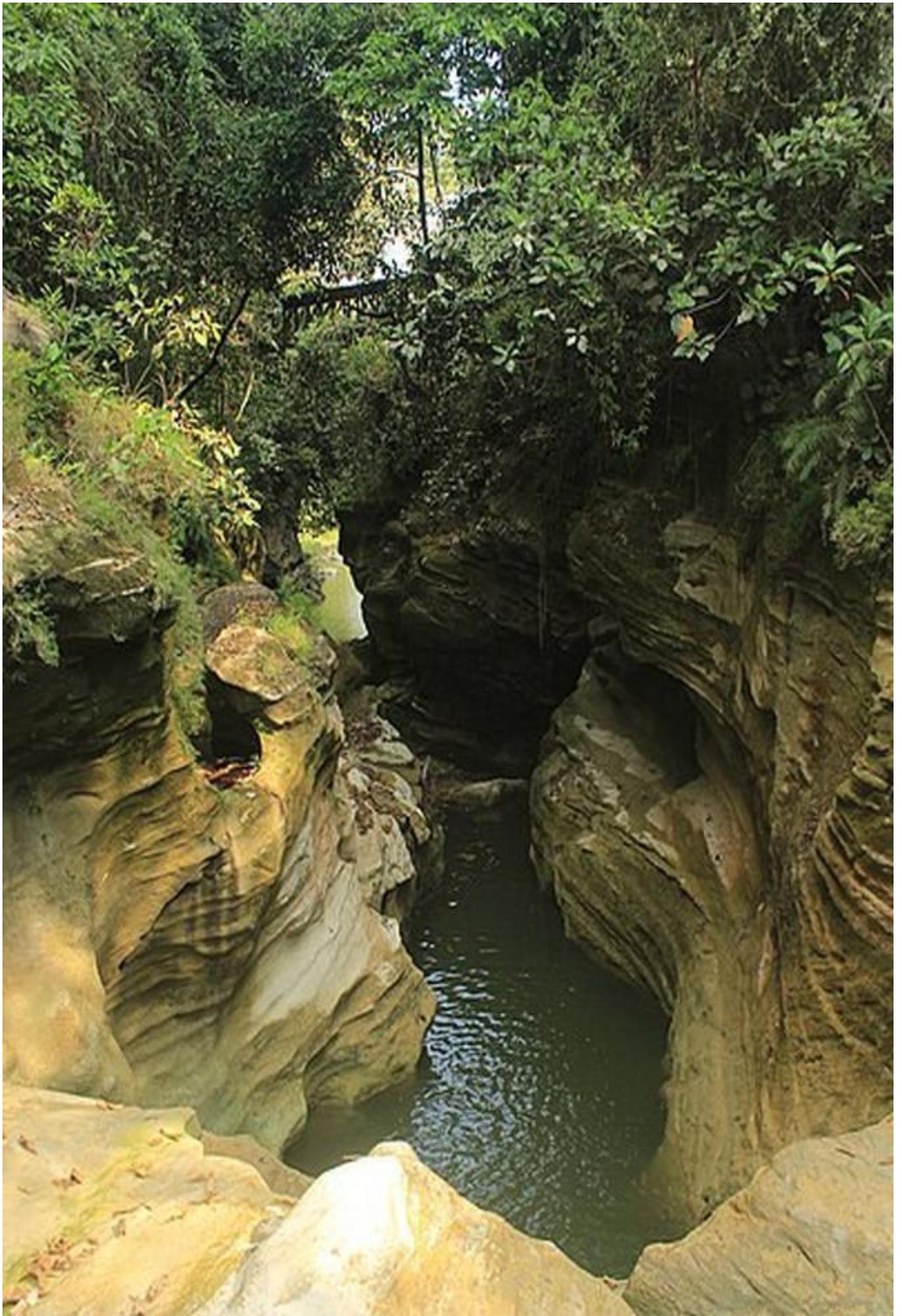


Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jombang

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Awal	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
Pengurangan Risiko Bencana dan Kebakaran	Indeks Risiko Bencana	Indeks	119,16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	7.240.781.028	100	7.240.781.028	BPBD	Kab. Jombang
Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persentase capaian Indikator Ketahanan Daerah	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	1.094.000.000	100	1.094.000.000	BPBD	Kab. Jombang
Program Penanggulangan Bencana	Persentase layanan penanggulangan bencana yang dipenuhi	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	1.094.000.000	100	1.094.000.000	BPBD	Kab. Jombang
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kerawanan Bencana yang diinformasikan	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	403.350.000	100	403.350.000	BPBD	Kab. Jombang
Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	241.550.000	1	241.550.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang
Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	875	161.800.000	875	161.800.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase layanan Pusdalops PB	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	550.000.000	100	550.000.000	BPBD	Kab. Jombang
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	365	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	365	450.000.000	365	450.000.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	100.000.000	2	100.000.000	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kab. Jombang
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kejadian bencana yang tertangani dalam masa tanggap darurat	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	544.000.000	100	544.000.000	BPBD	Kab. Jombang
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	294.000.000	2	294.000.000	Seksi Kedaruratan dan Logistik	Kab. Jombang
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	250	250.000.000	250	250.000.000	Seksi Kedaruratan dan Logistik	Kab. Jombang
Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	839.400.000	100	839.400.000	BPBD	Kab. Jombang
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dalam Waktu Tanggap (Respon Time)	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	839.400.000	100	839.400.000	BPBD	Kab. Jombang
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pemadaman kebakaran, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditangani dalam waktu tanggap	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	839.400.000	100	839.400.000	BPBD	Kab. Jombang

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0	N/A	12	839.400.000	12	839.400.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang							
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP	Nilai	BB	N/A	BB	5.307.381.028	BB	5.307.381.028	BPBD	Kab. Jombang							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	100	N/A	100	5.307.381.028	100	5.307.381.028	BPBD	Kab. Jombang							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	100	N/A	100	5.480.300	100	5.480.300	BPBD	Kab. Jombang							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	N/A	2	2.740.150	2	2.740.150	Sekretariat	Kab. Jombang							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	0	N/A	4	2.740.150	4	2.740.150	Sekretariat	Kab. Jombang							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan yang tersusun sesuai aturan	%	100	N/A	100	2.268.677.292	100	2.268.677.292	BPBD	Kab. Jombang							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15	N/A	11	2.135.952.292	11	2.135.952.292	Sekretariat	Kab. Jombang							
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	N/A	12	132.150.000	12	132.150.000	Sekretariat	Kab. Jombang							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	N/A	1	575.000	1	575.000	Sekretariat	Kab. Jombang							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	N/A	100	205.723.460	100	205.723.460	BPBD	Kab. Jombang							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	N/A	4	8.758.860	4	8.758.860	Sekretariat	Kab. Jombang							
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	46	N/A	46	21.663.900	46	21.663.900	Sekretariat	Kab. Jombang							
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	N/A	15	5.904.600	15	5.904.600	Sekretariat	Kab. Jombang							
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	N/A	25	8.515.000	25	8.515.000	Sekretariat	Kab. Jombang							
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	N/A	4	28.175.100	4	28.175.100	Sekretariat	Kab. Jombang							
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	4	N/A	4	8.220.000	4	8.220.000	Sekretariat	Kab. Jombang							
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	5	N/A	10	124.486.000	10	124.486.000	Sekretariat	Kab. Jombang							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	%	100	N/A	100	1.227.255.976	100	1.227.255.976	BPBD	Kab. Jombang							
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	N/A	2	1.119.062.976	6	1.119.062.976	Sekretariat	Kab. Jombang							
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	N/A	6	108.193.000		108.193.000	Sekretariat	Kab. Jombang							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	N/A	100	631.860.000	100	631.860.000	BPBD	Kab. Jombang							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	N/A	12	112.500.000	12	112.500.000	Sekretariat	Kab. Jombang							
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	N/A	12	519.360.000	12	519.360.000	Sekretariat	Kab. Jombang							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	N/A	100	968.384.000	100	968.384.000	BPBD	Kab. Jombang							

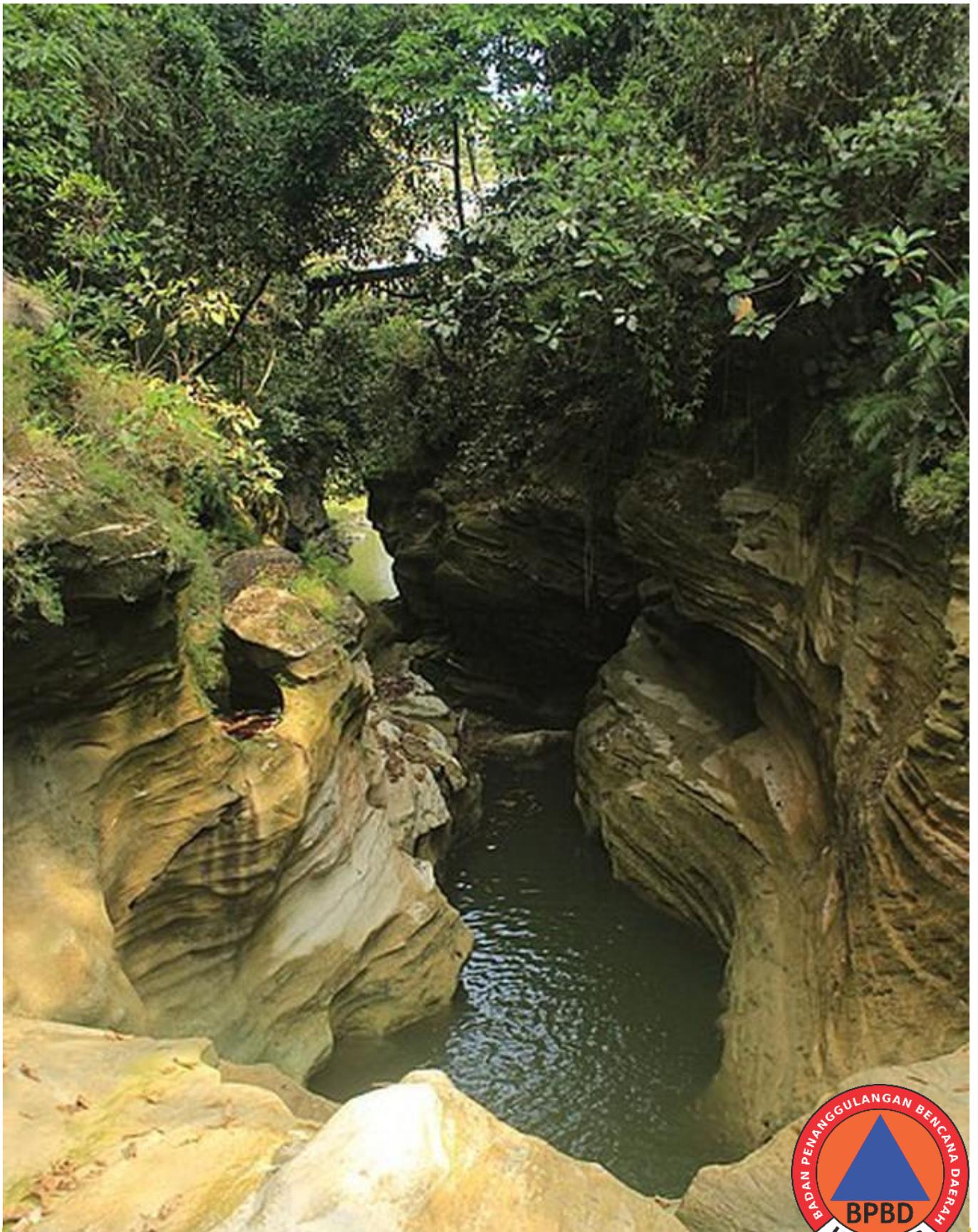
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	N/A	6	51.850.000	6	51.850.000	Sekretariat	Kab. Jombang							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	N/A	26	859.344.000	26	859.344.000	Sekretariat	Kab. Jombang							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	N/A	40	57.190.000	40	57.190.000	Sekretariat	Kab. Jombang							



Lampiran 999

Rencana Kerja 2023





PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2023

BPBD@2022 by fky



BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, sehingga dibentuklah Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh, sehingga upaya penanganan bencana harus bersifat cepat, tepat, terpadu, terkoordinasi dan akuntabel baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana. Sehingga paradigma penanganan bencana di Indonesia telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana.

Perubahan Rencana Kerja menjadi bagian terintegrasi dari keseluruhan proses pelayanan pada masyarakat yang terukur dan terpadu yang berbasis evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sampai dengan Triwulan II tahun berjalan yang disertai analisis kinerja pelayanan yang memungkinkan terjadinya perubahan Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan sebagaimana dijabarkan dalam bab-bab selanjutnya.

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (P-Renja BPBD) Tahun 2023 adalah dokumen tindak lanjut dari Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Renja BPBD) Tahun 2023 sebagai perubahan atas perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang periode 2023 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan bencana yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kejadian nyata yang pada umumnya berkaitan dengan penanggulangan bencana dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun serta akibat terjadinya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua sektor pembangunan dan berpengaruh pada perencanaannya.

Renja BPBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2024, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu BPBD harus mampu mengambil peran secara optimal, utamanya di dalam penanggulangan bencana, penanganan bahaya kebakaran dan musibah lainnya, maka disusunlah Perubahan Renja BPBD guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPJM Kabupaten Jombang dan sebagaimana telah dijabarkan kedalam Renstra BPBD yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Perubahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Provinsi Jawa Timur.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 18/D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 19/D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 21/D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 87/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 87/E);
29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 3/D);
30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 18/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18/D);
31. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 2/D);
32. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2023 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi BPBD Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2023 dapat tercapai;
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pelaksanaan penanggulangan bencana;
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2023;
4. Memberikan pedoman dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah untuk:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD didalam penanggulangan bencana, kebakaran dan musibah lainnya di Kabupaten Jombang;
2. Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebakaran dan musibah lainnya secara cepat, tepat, efektif dan efisien;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan bencana, kebakaran dan musibah lainnya;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholder.

1.4. SISTEMATIKA RENJA

Rencana Kerja Perubahan BPBD tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja PD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD

Dalam pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum pada DPA-SKPD BPBD Kabupaten Jombang belum seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik sehingga prosentase serapan belum maksimal, hal ini diakibatkan karena belum berakhirnya Pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga masih mempengaruhi konsentrasi perencanaan anggaran yang salah satu fokusnya adalah untuk pemulihan atas dampak yang diakibatkannya serta luasnya wilayah pelayanan bencana dan kebakaran yang tidak sebanding dengan jumlah personil penanggulangan bencana dan kebakaran yang tersedia di BPBD Jombang, akan tetapi pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana, musibah dan kebakaran tetap dapat dilakukan sehingga tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada tahun 2023 BPBD Kabupaten Jombang melaksanakan 3 (tiga) program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan dengan pencapaian realisasi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang terlaksana pada Tribulan I dan II Tahun 2023 (sampai dengan 31 Juni 2023), adalah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana dengan pencapaian target kinerja sebesar 43%;
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar 50%;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 58%.

Dalam pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2023 dihadapkan dengan beberapa kendala dan hambatan yang mengakibatkan munculnya beberapa penyesuaian anggaran pada kegiatan sehingga sangat mempengaruhi persentase capaian realisasi anggaran, kendala dan hambatan tersebut adalah:

1. Terbatasnya jumlah personil teknis penanggulangan bencana dan kebakaran yang tersedia di BPBD Jombang;
2. Adanya pelaksanaan penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Jombang yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2023 yang membutuhkan penyusunan Kesepakatan Kerja Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dan universitas sehingga diperlukan waktu untuk koordinasi;
3. Kegiatan diklat teknis penanggulangan bencana yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan BNPB dan belum dapat dilaksanakan karena harus menyesuaikan waktu tim BNPB;
4. Luasnya wilayah pelayanan proteksi kebakaran yang tidak berbanding dengan tersedianya Pos Pemadam Kebakaran.

Akibat dari munculnya kendala dan hambatan yang mempengaruhi serapan anggaran, adapun capaian serapan anggaran sampai dengan Tribulan I dan II Tahun 2023 (31 Juni 2023), adalah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana dengan pencapaian target kinerja sebesar Rp. 16,03%;
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar 34,37%;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 35,12%.

Untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat dalam rangka menindaklanjuti kendala dan hambatan yang dihadapi, BPBD Kabupaten Jombang mendorong peran serta masyarakat dalam penanganan bencana, kebakaran dan musibah lainnya sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Peran Serta Masyarakat pada Pelayanan BPBD Jombang Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Peran Serta Masyarakat
1	Penanganan Bencana Alam	a. Memberikan Informasi awal kejadian; b. Memberikan data awal dampak bencana Menjadi bagian dari semua klaster penanggulangan bencana yang dibentuk.
2	Pemadaman Kebakaran	a. Memberikan Informasi awal kejadian; b. Menjadi bagian dari tim pemadam kebakaran.
3	Penanganan Musibah Lainnya	a. Memberikan Informasi awal kejadian; b. Menjadi bagian dari tim pencarian, pertolongan dan evakuasi.
4	Keposkoan Tanggap Darurat Bencana	a. Menjadi bagian dari tim ; b. Melakukan pendataan terhadap masyarakat terdampak dan kebutuhannya; c. Memberikan bantuan baik berupa logistik maupun uang.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Jombang yang diampu oleh BPBD Kabupaten Jombang pada tahun 2023 praktis tidak dapat tercapai dengan maksimal karena fokus Pemerintah Kabupaten Jombang adalah pada pemulihan pasca Covid-19. Akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi pelayanan BPBD Kabupaten Jombang pada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana (Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota) dan Kebakaran (Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota) yaitu:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
2. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pelayanan sesuai dengan SPM diatas bertujuan untuk mengurangi resiko bencana yang dirancang dalam Program Penanggulangan Bencana, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan harapan agar kesadaran masyarakat Kabupaten Jombang atas resiko dan penanganan bencana, kebakaran dan musibah lainnya dapat ditumbuhkan sehingga pada saat terjadi bencana, korban dapat dikurangi. Akan tetapi pelaksanaan sub kegiatan pada BPBD Kabupaten Jombang masih memiliki kekurangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai kebutuhan penanganan;
2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah akan dilaksanakan Tribulan III sebagaimana perencanaan pada Anggaran Kas;
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dipengaruhi tidak maksimalnya serapan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena adanya rotasi pegawai (ASN);
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dipengaruhi tidak maksimalnya serapan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena pembiayaan Pos Pemadam Kebakaran tidak sesuai dengan perencanaan;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perbaikan kendaraan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penentuan isu – isu penting atau strategis pelayanan BPBD perlu indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, ada beberapa hal yang menjadi hambatan baik secara internal maupun eksternal dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang. Hambatan secara internal adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana pemantauan dan peralatan penanggulangan bencana pada Pusdalops PB BPBD sehingga dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana khususnya dalam hal pemantauan, pengolahan data dan informasi serta operasi pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana, kebakaran dan musibah lainnya menjadi kurang maksimal
2. Terbatasnya sumberdaya manusia dengan keahlian kebencanaan, sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana menjadi kurang optimal;
3. Kuantitas dan kualitas personil yang memiliki sertifikat penanggulangan kebakaran kurang memadai;

Adapun hambatan secara eksternal BPBD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta dokumen perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Jombang sehingga dalam pelaksanaan tupoksi BPBD belum mampu mengakomodir semua kegiatan secara komprehensif;
2. Penganggaran di tingkat Pemerintah Kabupaten kurang sesuai dengan hasil Musrenbang, sehingga usulan kegiatan mitigasi struktural dan non struktural kurang mendapat perhatian dan prioritas;
3. Adanya kondisi alam yang senantiasa berubah sehingga kesulitan dalam memprediksi kejadian bencana yang berdampak pada mitigasi;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, sehingga pelaksanaan dalam penanggulangan bencana terkadang kurang optimal walaupun penanggulangan bencana dapat teratasi;
5. Kurangnya sinkronisasi dan sinergitas antar OPD terkait diantaranya ketidaksesuaian hasil musrenbang dengan usulan program daerah rawan bencana sehingga seringkali usulan program kegiatan yang seharusnya dilaksanakan BPBD kurang mendapatkan respon positif, sehingga seringkali tidak terealisasi sebagai program yang diprioritaskan;
6. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang berakibat pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam rangka Penanggulangan Resiko Bencana (PRB), di harapkan nantinya dapat terbentuknya Desa Tangguh bencana di daerah rawan bencana di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan hambatan pada tugas dan fungsi BPBD terhadap dampak yang ditimbulkan pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang dapat disimpulkan secara garis besar adalah dengan tidak meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta tercukupinya kebutuhan unsur penanganan bencana dan kebakaran maka salah satu tolok ukur pencapaian Misi Bupati Jombang untuk Mewujudkan Masyarakat Jombang Yang Berkualitas, Religius dan berbudaya tidak dapat dicapai dengan baik sehingga Visi Bupati Jombang untuk Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing juga tidak dapat dicapai dengan baik.

Sepanjang pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan, BPBD Kabupaten Jombang juga menghadapi peluang dan tantangan sebagai berikut:

1. Peluang
 - a. Peningkatan Kelembagaan BPBD Kabupaten Jombang Menjadi Tipe A;
 - b. Berkembangnya teknologi di bidang kebencanaan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. Peningkatan kecepatan akses informasi;
 - d. Tingginya perhatian Lembaga pendidikan, LSM dan Ormas dalam bidang penanggulangan bencana.
2. Tantangan
 - a. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam kecepatan dan kualitas pelayanan bidang kebencanaan dan kebakaran.
 - b. Pengintegrasian pelaksanaan penanggulangan bencana dari dan bersama seluruh unsur *Pentahelix* di Kabupaten Jombang;
 - c. Penyusunan Rencana Kontijensi untuk Penanganan Dan Penanggulangan Bencana Non Alam dan Bencana Sosial.

Berdasarkan telaah kinerja pelayanan, permasalahan, hambatan tantangan dan peluang BPBD Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan pelayanan, maka dapat dirumuskan isu – isu strategis untuk di tindak lanjuti dalam perumusan perubahan program dan kegiatan prioritas Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Perlunya pendidikan aparatur dan masyarakat (Linmas, Karang Taruna, Perguruan Tinggi dan Organisasi Perempuan) dengan tujuan merubah paradigma dalam memandang kebencanaan dari penanggulangan bencana menjadi pra bencana/ mitigasi bencana dan sentralisasi menjadi desentralistik;
2. Perlunya penyusunan Rencana Kontijensi untuk Penanganan Dan Penanggulangan Bencana Non Alam dan Bencana Sosial sehingga Kabupaten Jombang lebih siap dalam menghadapi bencana non alam dan sosial sebagaimana Bencana Wabah Covid-19 yang saat ini sedang terjadi;
3. Konservasi Sumber Daya Alam di wilayah rawan bencana;
4. Memobilisasi kemampuan lembaga dan masyarakat terhadap bencana;
5. Mencukupi kebutuhan dasar 80 % korban bencana skala Kabupaten;
6. Memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikologis;
7. Memberikan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana;
8. Penguatan koordinasi antar SKPD Lingkup Kabupaten Jombang dan instansi vertikal (Kodim,Polres) antara instansi pemerintah Kabupaten Jombang dengan Provinsi dan Pusat, serta komponen masyarakat dan dunia usaha demi efektifitas penanggulangan bencana Alam, Non Alam dan Sosial pada semua fasenya termasuk dengan memobilisasi seluruh sumberdaya yang ada;
9. Pengembangan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) menjadi 4 yaitu WMK Jombang,WMK Mojoagung,WMK Ploso dan WMK Ngoro dengan pembangunan pos Pemadam Kebakaran

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan perubahan program dan kegiatan berdasar pada hasil evaluasi dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jombang dan hasil rapat koordinasi internal serta evaluasi dari pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah unsur Pentahelix Penanggulangan Bencana.

Selanjutnya semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Renstra serta isu-isu strategis pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan perubahan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Jombang. Yang diselaraskan dengan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan serta pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum OPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang serta Rencana Kerja BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2023 maka ditetapkan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang yang Tahun 2023 yang memuat 3 (tiga) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar

Rp.6.530.313.886,- (enam miliar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dari alokasi Dana APBD Kabupaten Jombang.

BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah: “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”. Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya dalam koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk dapat melaksanakan program kegiatan BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

Selanjutnya, telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Timur pada Bidang Kebencanaan relatif tidak ditemukan adanya perubahan yang signifikan yang dapat dijabarkan bahwa dengan berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi, maka disepakati untuk menetapkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance & Clean Governance) yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil,

Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong

” Didalam Visi tersebut terkandung keinginan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur sebagai instansi bersifat koordinatif, komando dan pelaksanaan yang menangani Penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan rasa aman dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang mampu menjadi faktor pendorong dan menarik (pull dan push factor) dalam mendukung pembangunan dan pergerakan perekonomian Provinsi Jawa Timur dimasa mendatang, dengan mengembangkan konsep, regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Protap, penanggulangan bencana mulai dari tahapan pencegahan sampai pada tahap pemulihan keadaan bencana, proses tanggap darurat sampai pada tahapan pemulihan keadaan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang mengalami kerusakan Dalam mewujudkan pencapaian Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka implementasinya dijabarkan melalui Misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak operasional organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dalam mewujudkan pencapaian visi yang telah dirumuskan tersebut, maka implementasinya dijabarkan melalui misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak operasional organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Misi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana; dan
3. Meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadinya bencana.

3.2. Perubahan Tujuan Dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasar rumusan perubahan isu-isu strategis sebagaimana dijabarkan sebelumnya, Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Jombang tidak mengalami perubahan karena pemenuhan kebutuhan masyarakat pada bidang kebencanaan dan kebakaran praktis tidak bisa dirubah, adapun Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Jombang:

- 1. Tujuan:**
Pengurangan Risiko Bencana dan Kebakaran
- 2. Sasaran:**
 - a. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana;
 - b. Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - c. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.3. Perubahan Program Dan Kegiatan

Dalam perumusan dan penetapan perubahan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang mempertimbangkan hal-hal yang bersifat penting dan mendesak untuk segera disesuaikan dalam tahun yang bersangkutan, menindaklanjuti Renstra SKPD, berdampak luas pada penyelesaian permasalahan daerah dan kebijakan pembangunan daerah periode selanjutnya sebagaimana penjabaran sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penting dan mendasar atas perubahan Program dan Kegiatan dari BPBD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
 - a. Capaian target kinerja pada tahun anggaran 2023 masih harus terus ditingkatkan dalam hal peningkatan kapasitas pelayanan penanggulangan bencana dan peningkatan mutu pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan
 - b. Dampak dari tidak tertanganinya kejadian bencana dan kebakaran akan sangat mempengaruhi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) terutama pada hampir keseluruhan dari 17 Indikator yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena dampak bencana berpengaruh secara luas dan menyeluruh;
 - c. Pada tataran pengentasan kemiskinan akan sangat sulit dicapai jika penanganan bencana dan kebakaran tidak menjadi prioritas, hal ini disebabkan karena akibat bencana yang berdampak pada manusia akan menjadikan seseorang tersebut menjadi miskin dan kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup;
 - d. Capaian SPM Kebencanaan dan Kebakaran yang menjadi prioritas BPBD Kabupaten Jombang harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan;
 - e. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh akan sangat membutuhkan penguatan keamanan dan ketangguhan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran untuk meminimilasi kerugian yang berdampak pada upaya pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh;
 - f. Pendekatan ketahanan daerah dalam bencana dan kebakaran menjadi salah satu upaya pendukung dalam pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Khususnya berbasis agribisnis;
 - g. Penanganan bencana dan kebakaran menjadi hal pokok yang dapat mendukung Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah dalam penanganan Wabah PMK, Percepatan Infrastruktur, peningkatan Daya Saing dan Pariwisata;
 - h. Hasil evaluasi pelaksanaan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sub Kegiatan	Capaian	
	K	Rp.
- Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0
- Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	700 Orang	45.275.000,-

- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	181 Laporan	191.617.498,-
- Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	23.503.300,-
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	75 Orang	89.980.000,-
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	418.389.242,-
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	455.000,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	0
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	520.858.725,-
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	20.758.500,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4.176.800,-
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	7.333.300,-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 Paket	2.448.000,-
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	9.334.250,-
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0 Paket	0
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	530.000,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	52.794.622,-
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 Laporan	40.628.960,-
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Laporan	40.628.960,-
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2.570.250,-
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit	57.307.014,-
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	10.225.806,00

2. Secara garis besar, pada Tahun Anggaran 2023, Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada BPBD Kabupaten Jombang menjadi sejumlah 3 (tiga) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan dengan Total Pagu indikatif sejumlah **Rp.6.530.313.886,-** (enam miliar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dari alokasi Dana APBD Kabupaten Jombang).

1	05	01	208	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang direncanakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	93.600.009	6,00 Laporan	40.628.960	12 Laporan	26.600.000	12 Laporan	120.200.009	Penambahan berasal dari: 1. Belanja Belanja Tagihan Telepon 3 bulan x 1.500.000,-=Rp.4.500.000,- 2. Belanja Tagihan Listrik 3 bulan x Rp.4.900.000,-=Rp.14.700.000,-
1	05	01	208	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa pelayanan umum kantor yang direncanakan	12 Bulan	12 Bulan	48 Laporan	389.520.000	6,00 Laporan	166.670.283	48 Laporan	121.440.000	48 Laporan	510.960.000	Penambahan diperuntukkan: 1. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp.51.300.000,- 2. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp.53.100.000,- 3. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp.8.040.000,- 4. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp.6.300.000,- 5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp.1.740.000
1	05	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	254.565.388	44,57 %	70.103.070	100 %	(13.740.000)	100 %	240.825.388	
1	05	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	16 Unit	16 Unit	40.900.000	2,00 Unit	2.570.250	16 Unit	-	16 Unit	40.900.000	
1	05	01	209	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	16 Unit	16 Unit	111.610.000	17,00 Unit	57.307.014	16 Unit	3.650.000	16 Unit	115.260.000	Penambahan diperuntukkan: Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 1 Unit x Rp.3.650.000,-
1	05	01	209	11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	20,00 Unit	0 Unit	102.055.388	14,00 Unit	10.225.806	0 Unit	(17.390.000)	0 Unit	84.665.388	Pengurangan berasal dari: Belanja Bahan Bakar Minyak Rp.22.750.000,- Penambahan diperuntukkan: 1. Belanja Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp.2.440.000,- 2. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp.2.920.000,-
1	05	03			Program Penganggulangan Bencana	Persentase layanan penganggulangan bencana yang dipenuhi	100 %	100 %	100 %	2.186.117.801	43 %	350.375.798	100 %	184.451.600	100 %	2.370.569.401	
1	05	03	201		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	N/A N/A	100 %	403.350.000	40 %	45.275.000	100 %	6.000.000	100 %	409.350.000	
1	05	03	201	01	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	N/A N/A	1 Dokumen	241.550.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	247.550.000	
1	05	03	201	02	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	875 Orang	N/A N/A	100 Orang	161.800.000	700 Orang	45.275.000	0 Orang	-	0	161.800.000	
1	05	03	202		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase layanan PUSDALOPS PB	100 %	100 %	100 %	1.431.417.800	25 %	191.617.498	100 %	251.371.600	100 %	1.682.789.400	
1	05	03	202	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100 %	365 Dokumen	365 Dokumen	1.429.567.800	181 Dokumen	191.617.498	365 Dokumen	252.721.600	365 Dokumen	1.682.289.400	Penambahan diperuntukkan: 1. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 29 org x 22 hari x 2 bulan x Rp.10.000,- = Rp.12.760.000,- 2. Insentif Resiko Tinggi PUSDALOPS (35 Orang x 3 Bulan x Rp.500.000,- = Rp.52.500.000,- 3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 29 orang x 3 bulan x Rp.175.000,- = Rp.15.225.000,- 4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 29 orang x 3 bulan x Rp.20.000,- = Rp.1.740.000,- 5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Biaya Transport piket Tenaga Relawan BPBD 29 org x 22 Hari x 3 bln x Rp.75.000,- = Rp.143.550.000,- - Uang Harian D.K.I. JAKARTA, Non ASN 25 org x 2 hari x Rp.350.000,-=Rp.17.500.000,- 6. Belanja Modal Alat Pendingin 2 unit x Rp.7.426.000,-=Rp.14.852.000,- 7. Belanja Modal Personal Computer (Laptop Core I7) Rp.24.901.500,- Pengurangan berasal dari: 1. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp.1.250.000,- 2. Makanan dan Minuman Rapat Rp.14.250.000,- 3. Belanja Modal Personal Computer (Laptop Core I3) Rp.6.106.900,-
1	05	03	202	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	100 %	100 %	2 Dokumen	1.850.000	0 Dokumen	-	2 Dokumen	(1.350.000)	2 Dokumen	500.000	Pengurangan berasal dari: 1. Makanan dan Minuman Rapat Rp.350.000,- 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp.1.000.000,-

1	05	03	203		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kejadian bencana yang tertangani dalam masa tanggap darurat	100 %	100 %	100 %	351.350.001	65 %	113.483.300	100 %	(72.920.000)	100 %	278.430.001	
1	05	03	203	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	100 %	100 %	2 Dokumen	82.000.001	2 Dokumen	23.503.300	2 Dokumen	2.700.000	2 Dokumen	84.700.001	Penambahan diperuntukkan: Biaya Transport Operasi/Penugasan Pusdalops-PB Rp.2.700.000,-
1	05	03	203	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	250 Orang	269.350.000	75 Orang	89.980.000	250 Orang	(75.620.000)	250 Orang	193.730.000	Penambahan diperuntukkan: Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga - Belanja bahan bangunan dan konstruksi pengendalian banjir dan tanah longsor Rp.150.000,- Pengurangan berasal dari: Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga - Belanja bahan material bangunan terdampak bencana dan kebakaran Rp.75.770.000,-
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dalam Waktu Tanggap (Respon Time)	100 %	100 %	100 %	1.217.422.200	50 %	418.389.242	100 %	214.475.000	100 %	1.431.897.200	
1	05	04	201		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pemadaman kebakaran, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditangani dalam waktu tanggap	100 %	100 %	100 %	1.217.422.200	50 %	418.389.242	100 %	214.475.000	100 %	1.431.897.200	
1	05	04	201	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	12 Laporan	1.217.422.200	6 Laporan	418.389.242	12 Laporan	214.475.000	12 Laporan	1.431.897.200	Penambahan diperuntukkan: 1. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 27 Org x 22 hari x 3 bulan Rp.10.000,- = Rp.11.800.000,- 2. Insentif Resiko Tinggi Petugas Pemadam Kebakaran (40 Orang x 3 Bulan x Rp.500.000,- = Rp.60.000.000,- 3. Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 27 orang x 3 bulan x Rp.175.000,- = Rp.14.175.000,- 4. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 27 orang x 3 bulan x Rp.20.000,- = Rp.1.620.000,- 5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Biaya Transport piket Tenaga Relawan BPBD 27 org x 22 Hari x 3 bln x Rp.75.000,- = Rp.133.650.000,- Pengurangan berasal dari: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp.14.250.000,-

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam kurun waktu Tahun 2023, sehingga upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Perubahan Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang.

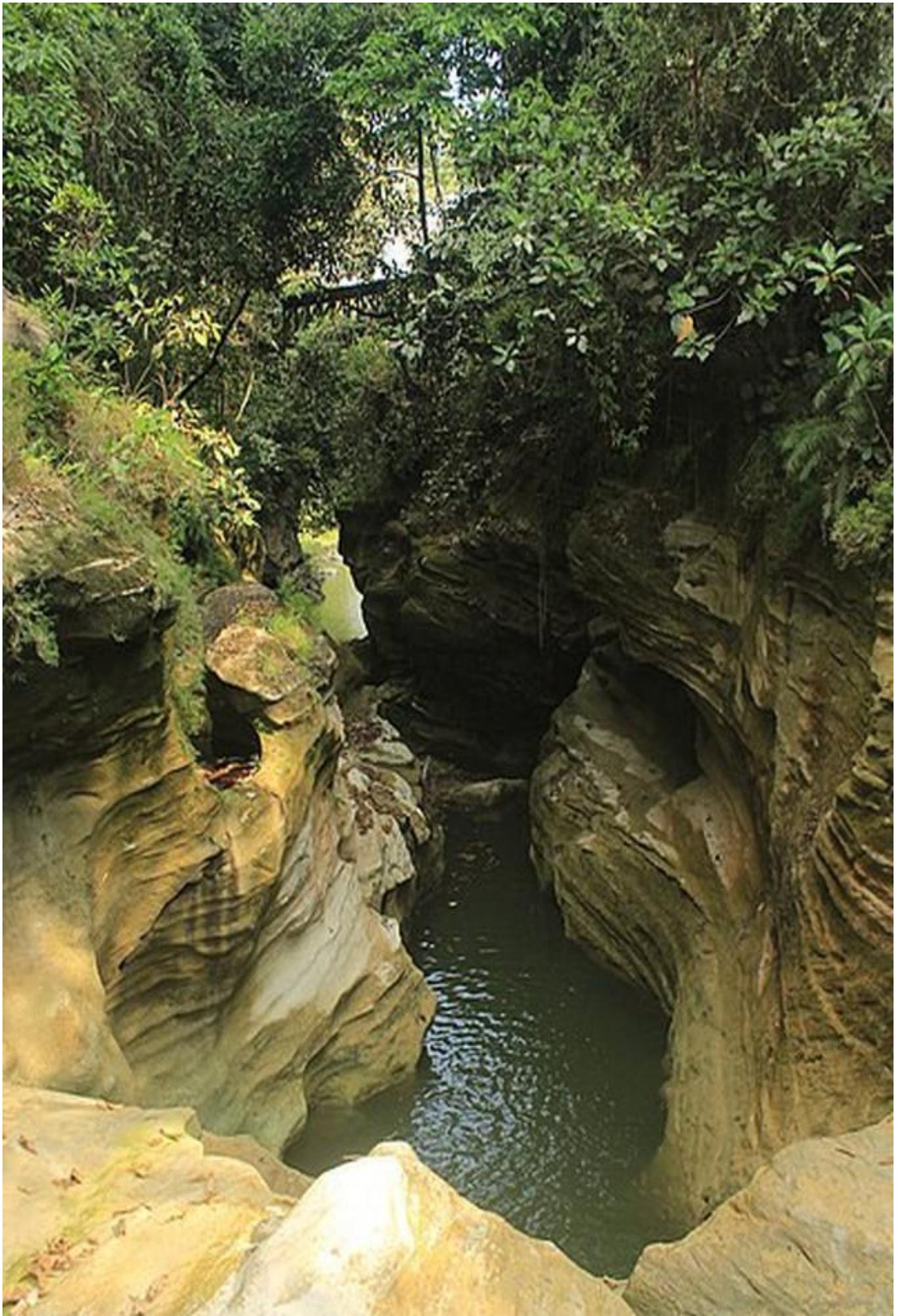
Jombang, 1 Agustus 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jombang



BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660531 199703 1 002



Lampiran IV

Perjanjian Kerja 2023





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

Nomor : 060.1/711/415.01/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.**
Jabatan : **Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**
Jabatan : **Pj. Bupati Jombang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 5 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Ditandatangani secara elektronik



BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.
NIP. 196605311997031002

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persentase capaian Indikator Ketahanan Daerah	100%
2.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Tahun N	BB

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1.	Terpenuhinya pelayanan dasar penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah jenis layanan penanggulangan bencana yang dipenuhi	100%	2.370.569.401,-
2.	Terpenuhinya pelayanan dasar penanggulangan bahaya kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dalam Waktu Tanggap (Respon Time)	100%	1.431.897.200,-
3.	Terpenuhinya Unsur-Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.760.607.285,-
Jumlah					6.563.073.886,-

Jombang, 5 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Ditandatangani secara elektronik



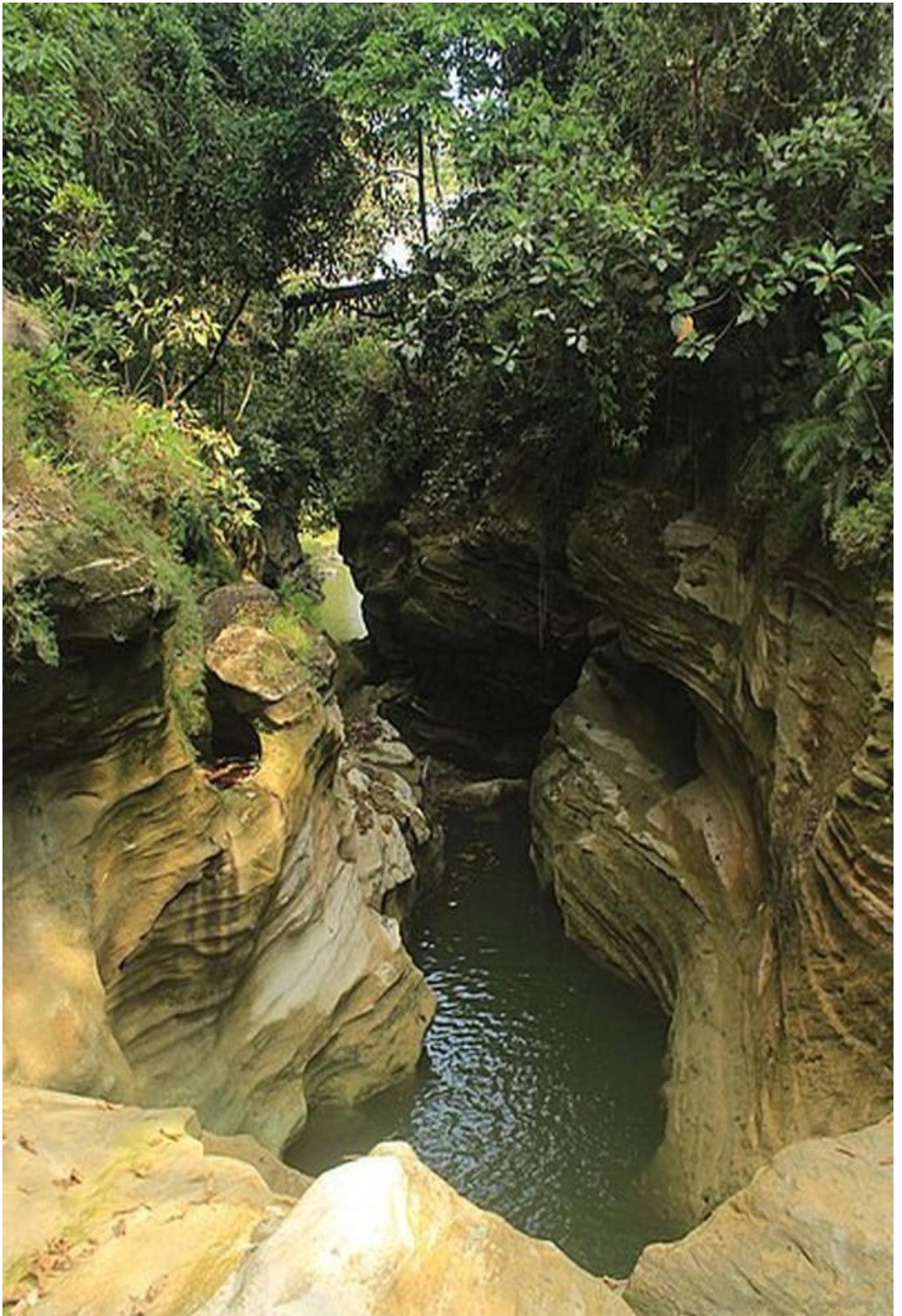
BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.
NIP. 196605311997031002

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.



Lampiran V

Pengukuran Kinerja 2023



**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : **BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.**
 2 NIP : 19660531 199703 1 002
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tingkat I (IV/b)
 4 JABATAN : Kepala Pelaksana
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI		
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	IKI. 1 Persentase capaian Indikator Ketahanan Daerah	100%	100%	100%	1	Program Penanggulangan Bencana	2.370.569.401	2.229.908.621	94,07%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Memaksimalkan pengawasan serapan
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	IKI. 2 Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	100%	100%	100%	2	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	409.350.000	407.870.000	99,64%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Memaksimalkan pengawasan serapan
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IKI. 3 Nilai AKIP	100%	100%	100%	3	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.682.789.400	1.543.619.886	91,73%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Memaksimalkan pengawasan serapan
4	Terpenuhinya pelayanan dasar penanggulangan bencana	IKI. 4 Persentase jumlah jenis layanan penanggulangan bencana yang dipenuhi	100%	100%	100%	4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	278.430.001	278.418.735	100,00%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Memaksimalkan pengawasan serapan
5	Terpenuhinya pelayanan dasar penanggulangan bahaya kebakaran	IKI. 5 Persentase Penanganan Kebakaran dalam Waktu Tanggap (Respon Time)	100%	100%	100%	5	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.431.897.200	1.317.646.073	92,02%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Memaksimalkan pengawasan serapan
6	Terpenuhinya Unsur-Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKI. 6 Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	6	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.431.897.200	1.317.646.073	92,02%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Memaksimalkan pengawasan serapan
7	Meningkatnya antisipasi dan kesiapsiagaan kejadian bencana	IKI. 7 Persentase layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.760.607.285	2.535.620.922	91,85%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Memaksimalkan pengawasan serapan
8	Meningkatnya antisipasi dan kesiapsiagaan kejadian bencana	IKI. 8 Persentase layanan PUSDALOPS PB	100%	100%	100%	8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.140.000	5.752.000	93,68%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Memaksimalkan pengawasan serapan
9	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	IKI. 9 Persentase kejadian bencana yang tertangani dalam masa tanggap darurat	100%	100%	100%	9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.605.920.100	1.424.200.974	88,68%	Sesuai dengan kebutuhan real	Mengkoordinasikan PPTK dalam pelaksanaan kegiatan
10	Meningkatnya layanan pemadaman kebakaran, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	IKI. 10 Persentase layanan pemadaman kebakaran, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditangani dalam waktu tanggap	100%	100%	100%	10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.561.788	261.925.588	94,71%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Memaksimalkan pengawasan serapan
11	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKI. 11 Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.160.009	603.488.288	95,62%	Sesuai dengan kebutuhan real	Mengkoordinasikan PPTK dalam pelaksanaan kegiatan

12	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKI. 12 Persentase dokumen keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.825.388	240.254.072	99,76%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Memaksimalkan pengawasan serapan
13	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	IKI. 13 Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	Jumlah		6.563.073.886	6.083.175.616	92,65%	X	
14	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKI. 14 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%							
15	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKI. 15 Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%							

Atasan Langsung

AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.
 NIP.19720710 199803 1 010

Jombang, 12 Januari 2024
 Bupati Kabupaten
 BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH
BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.
 NIP.19660531 199703 1 002



**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : MISDI, S.Sos., M.M.
 2 NIP : 19651210 199403 1 003
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina (IV/a)
 4 JABATAN : Sekretaris
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X			1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.510.000	3.392.000	96,64%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Akan dimaksimalkan untuk penyusunan Perubahan Renja
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.630.000	2.360.000	89,73%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang	10 Orang	100%	3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.503.467.350	1.329.310.974	88,42%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
4	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.262.500	93.125.000	92,88%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	X			5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.190.250	1.765.000	80,58%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Akan digunakan untuk penyusunan laproan keuangan akhir tahun
6	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket	100%	6	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.018.888	10.018.800	100,00%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
7	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Paket	11 Paket	100%	7	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.050.900	22.048.500	99,99%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
8	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	15 Paket	15 Paket	100%	8	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.237.000	10.181.350	99,46%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
9	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	47 Orang	47 Orang	100%	9	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.182.500	117.295.230	90,80%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
10	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	100%	10	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.580.500	12.495.550	99,32%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
11	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	11	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000	1.860.000	83,78%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
12	Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100%	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.272.000	88.026.158	97,51%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

13	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan	100%	13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.200.009	107.571.440	89,49%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
14	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	3 Laporan	100%	14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510.960.000	495.916.848	97,06%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
15	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	X			15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.900.000	40.849.975	99,88%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
16	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	X			16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.260.000	115.255.214	100,00%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
17	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	100%	17	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.665.388	84.148.883	99,39%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
Jumlah							2.760.607.285	2.535.620.922	94,41%			

Atasan Langsung

BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.
NIP. 19660531 199703 1 002

Jombang, 12 Januari 2024
Pemilik Kinerja

MISDI, S.Sos., M.M.
NIP.19651210 199403 1 003

**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : **MOH. SYAMSUL BAHRI S.Sos**
 2 NIP : 19690802 199703 1 007
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Penata Tingkat I (III/d)
 4 JABATAN : Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
1	Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	100%	100%	100%	1	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	247.550.000	246.320.000	99,50%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
2	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	X			2	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	161.800.000	161.550.000	99,85%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
3	Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	91 Laporan	91 Laporan	100%	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.682.298.400	1.543.119.886	91,73%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
4	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	100%	4	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.431.897.200	1.317.646.073	92,02%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
Jumlah								3.523.545.600	3.268.635.959	95,77%		

Atasan Langsung

BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.
NIP. 19660531 199703 1 002

Jombang, 12 Januari 2024
Pemilik Kinerja

MOH. SYAMSUL BAHRI S.Sos
NIP. 19690802 199703 1 007

**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

- 1 NAMA : **HERI SETYOBUDI, SP., MM.**
 2 NIP : 19741212 199803 1 007
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tingkat I (IV/b)
 4 JABATAN : Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
1	Tersedianya SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	82.000.001	35.175.208	43%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
2	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	50 Orang	100%	3	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	269.350.000	89.980.000	33%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil

Atasan Langsung

BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.
NIP. 19660531 199703 1 002

Jombang, 12 Januari 2024
Pemilik Kinerja

HERI SETYOBUDI, SP., MM.
NIP.19741212 199803 1 007

**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : **NURPUJI SUBAGYO, S.Sos.**
 2 NIP : 19710607 200901 1 002
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Penata Tingkat I (III/d)
 4 JABATAN : Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
1	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1	Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	500.000	500.000	100%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
			1 Laporan	1 Laporan	100%		Jumlah	500.000	500.000,00	100%		

Atasan Langsung

BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.
NIP.19660531 199703 1 002

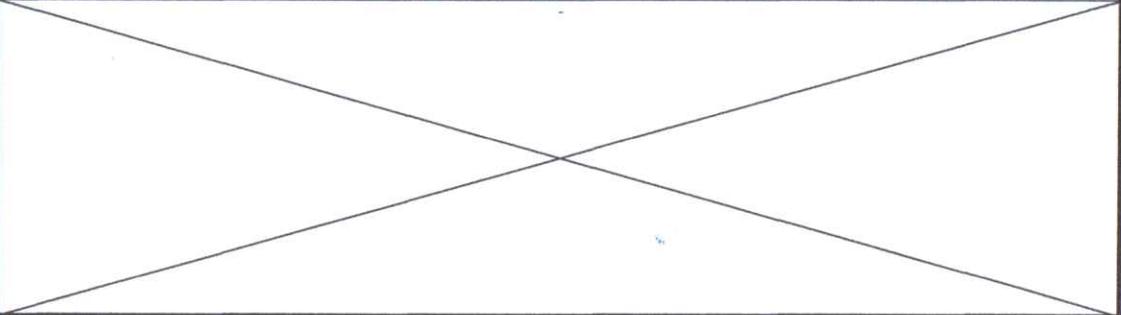
Jombang, 12 Januari 2024

Pemilik Kinerja

NURPUJI SUBAGYO, S.Sos.
NIP.19710607 200901 1 002

**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : **MAYA WULANDARI, A.Md.**
 2 NIP : 19861110 202012 2 004
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pengatur (II/c)
 4 JABATAN : Pengadministrasi Keuangan
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	Tersedianya Laporan dan dokumen kelengkapan berkas pengajuan gaji pegawai, rapel gaji dan uang makan pegawai	Jumlah laporan dan dokumen kelengkapan berkas pengajuan gaji pegawai, rapel gaji dan uang makan pegawai	3 Laporan/ Dokumen	3 Laporan/ Dokumen	100%						
2	Tersedianya Laporan dan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran	Jumlah laporan dan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran	3 Laporan/ Dokumen	3 Laporan/ Dokumen	100%						
3	Tersedianya Laporan dan dokumen kelengkapan berkas pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan UP, GU, TU dan LS	Jumlah laporan dan dokumen kelengkapan berkas pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan UP, GU, TU dan LS	3 Laporan/ Dokumen	3 Laporan/ Dokumen	100%						
4	Tersedianya Laporan dan dokumen kelengkapan administrasi yang terkait dengan perjalanan dinas pegawai	Jumlah laporan dan dokumen kelengkapan administrasi yang terkait dengan perjalanan dinas pegawai	3 Laporan/ Dokumen	3 Laporan/ Dokumen	100%						

Atasan Langsung

MISDI, S.Sos., M.M.

NIP. 19651210 199403 1 003

Jombang, 12 Januari 2024
Pemilik Kinerja

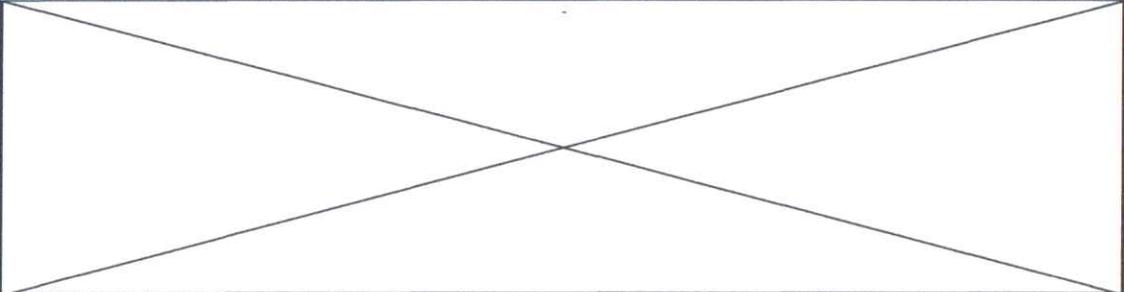


MAYA WULANDARI, A.Md.

NIP.19861110 202012 2 004

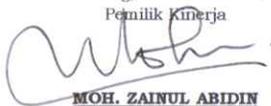
**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : **MOH. ZAINUL ABIDIN**
 2 NIP : 19830722 201001 1 004
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pengatur (II/c)
 4 JABATAN : Pengelola Logistik
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	Tersedianya data barang logistik baik jumlah dan kualitas barang logistik untuk kebutuhan penanganan bencana	Jumlah Laporan dan Dokumen barang logistik baik jumlah dan kualitas barang logistik untuk kebutuhan penanganan bencana	3 Laporan	3 Laporan	100%						
2	Tersedianya tempat penyimpanan barang logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Jumlah Laporan dan Dokumen tempat penyimpanan barang logistik dan peralatan penanggulangan bencana	3 Laporan dan dokumen	3 Laporan dan dokumen	100%						
3	Terlaksananya pengiriman dan pengambilan barang logistik kebutuhan penanganan bencana	Jumlah Laporan dan Dokumen pengiriman dan pengambilan barang logistik kebutuhan penanganan bencana	2 Laporan dan dokumen	2 Laporan dan dokumen	100%						
4	Tersedianya informasi barang logistik dan peralatan penanganan bencana	Jumlah Laporan dan Dokumen informasi barang logistik dan peralatan penanganan bencana	3 Laporan dan dokumen	3 Laporan dan dokumen	100%						

Atasan Langsung

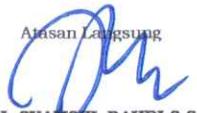
HERI SETYOBUDI, SP., MM.
 NIP.19741212 199803 1 007

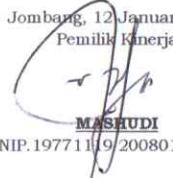
Jombang, 12 Januari 2024
 Pemilik Kinerja

MOH. ZAINUL ABIDIN
 NIP.19830722 201001 1 004

**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : **MASHUDI**
 2 NIP : 19771119 200801 1 008
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pengatur Tingkat I (II/d)
 4 JABATAN : Pranata Pemadam Kebakaran
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	Terlaksananya tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	Jumlah Laporan pelaksanaan tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	3 Laporan	3 Laporan	100%						
2	Terlaksananya pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	Jumlah Laporan pelaksanaan pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	3 Laporan	3 Laporan	100%						
3	Terlaksananya pemadaman kebakaran	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan pemadaman kebakaran	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
4	Terlaksananya evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran;	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
5	Terlaksananya inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
6	Terlaksananya sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						

Atasan Langsung

MOH. SYAMSUL BAHRI S.Sos
 NIP. 19690802 199703 1 007

Jombang, 12 Januari 2024
 Pemilik Kinerja

MASHUDI
 NIP. 19771119 200801 1 008

**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : **SAMIDI**
 2 NIP : 19721111 200801 1 007
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pengatur Tingkat I (II/d)
 4 JABATAN : Pranata Pemadam Kebakaran
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	Terlaksananya tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	Jumlah Laporan pelaksanaan tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	3 Laporan	3 Laporan	100%	X					
2	Terlaksananya pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	Jumlah Laporan pelaksanaan pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	3 Laporan	3 Laporan	100%						
3	Terlaksananya pemadaman kebakaran	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan pemadaman kebakaran	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
4	Terlaksananya evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran;	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
5	Terlaksananya inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
6	Terlaksananya sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						

Atasan Langsung

MOH. SYAMSUL BAHRI S.Sos
 NIP. 19690802 199703 1 007

Jombang, 12 Januari 2024
 Pemilik Kinerja

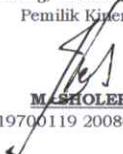
SAMIDI
 NIP.19721111 200801 1 007

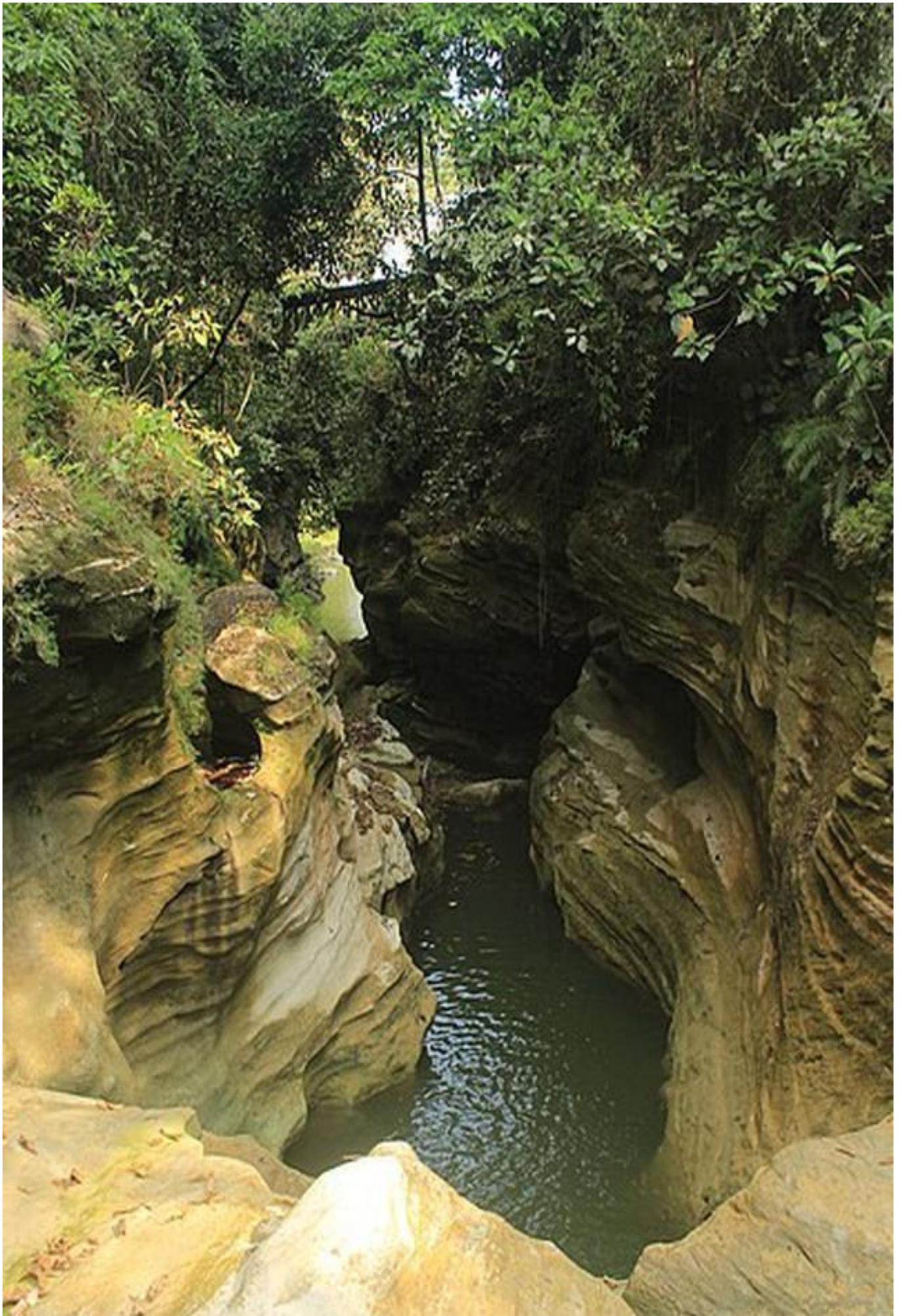
**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : **M. SHOLEH**
 2 NIP : 19700119 200801 1 005
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
 4 JABATAN : Pranata Pemadam Kebakaran
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	Terlaksananya tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	Jumlah Laporan pelaksanaan tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	3 Laporan	3 Laporan	100%	X					
2	Terlaksananya pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	Jumlah Laporan pelaksanaan pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	3 Laporan	3 Laporan	100%						
3	Terlaksananya pemadaman kebakaran	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan pemadaman kebakaran	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
4	Terlaksananya evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
5	Terlaksananya inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
6	Terlaksananya sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						


 Atasan Langsung
MOH. SYAMSUL BAHRI S.Sos
 NIP. 19690802 199703 1 007

Jombang, 12 Januari 2024
 Pemilik Kinerja

M. SHOLEH
 NIP. 19700119 200801 1 005



Lampiran V

Pengukuran Kinerja 2023



**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.
 2 NIP : 19660531 199703 1 002
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tingkat I (IV/b)
 4 JABATAN : Kepala Pelaksana
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI		
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	IKI. 1 Persentase capaian Indikator Ketahanan Daerah	100%	100%	100%	1	Program Penanggulangan Bencana	2.370.569.401	2.229.908.621	94,07%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Memaksimalkan pengawasan serapan
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	IKI. 2 Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	100%	100%	100%	2	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	409.350.000	407.870.000	99,64%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Memaksimalkan pengawasan serapan
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IKI. 3 Nilai AKIP	100%	100%	100%	3	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.682.789.400	1.543.619.886	91,73%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Memaksimalkan pengawasan serapan
4	Terpenuhinya pelayanan dasar penanggulangan bencana	IKI. 4 Persentase jumlah jenis layanan penanggulangan bencana yang dipenuhi	100%	100%	100%	4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	278.430.001	278.418.735	100,00%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Memaksimalkan pengawasan serapan
5	Terpenuhinya pelayanan dasar penanggulangan bahaya kebakaran	IKI. 5 Persentase Penanganan Kebakaran dalam Waktu Tanggap (Respon Time)	100%	100%	100%	5	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.431.897.200	1.317.646.073	92,02%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Memaksimalkan pengawasan serapan
6	Terpenuhinya Unsur-Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKI. 6 Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	6	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.431.897.200	1.317.646.073	92,02%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Memaksimalkan pengawasan serapan
7	Meningkatnya antisipasi dan kesiapsiagaan kejadian bencana	IKI. 7 Persentase layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.760.607.285	2.535.620.922	91,85%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Memaksimalkan pengawasan serapan
8	Meningkatnya antisipasi dan kesiapsiagaan kejadian bencana	IKI. 8 Persentase layanan PUSDALOPS PB	100%	100%	100%	8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.140.000	5.752.000	93,68%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Memaksimalkan pengawasan serapan
9	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	IKI. 9 Persentase kejadian bencana yang tertangani dalam masa tanggap darurat	100%	100%	100%	9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.605.920.100	1.424.200.974	88,68%	Sesuai dengan kebutuhan real	Mengkoordinasikan PPTK dalam pelaksanaan kegiatan
10	Meningkatnya layanan pemadaman kebakaran, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	IKI. 10 Persentase layanan pemadaman kebakaran, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditangani dalam waktu tanggap	100%	100%	100%	10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.561.788	261.925.588	94,71%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Memaksimalkan pengawasan serapan
11	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKI. 11 Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.160.009	603.488.288	95,62%	Sesuai dengan kebutuhan real	Mengkoordinasikan PPTK dalam pelaksanaan kegiatan

12	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKI. 12 Persentase dokumen keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.825.388	240.254.072	99,76%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Memaksimalkan pengawasan serapan
13	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	IKI. 13 Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	Jumlah		6.563.073.886	6.083.175.616	92,65%	X	
14	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKI. 14 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%							
15	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKI. 15 Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%							

Atasan Langsung

AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.
 NIP.19720710 199803 1 010

Jombang, 12 Januari 2024
 Bupati Kabupaten
 BANGKALAN
 BANGKALAN
 BANGKALAN
BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.
 NIP.19660531 199703 1 002



**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : MISDI, S.Sos., M.M.
 2 NIP : 19651210 199403 1 003
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina (IV/a)
 4 JABATAN : Sekretaris
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X			1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.510.000	3.392.000	96,64%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Akan dimaksimalkan untuk penyusunan Perubahan Renja
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.630.000	2.360.000	89,73%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang	10 Orang	100%	3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.503.467.350	1.329.310.974	88,42%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
4	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.262.500	93.125.000	92,88%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	X			5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.190.250	1.765.000	80,58%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Akan digunakan untuk penyusunan laproan keuangan akhir tahun
6	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket	100%	6	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.018.888	10.018.800	100,00%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
7	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Paket	11 Paket	100%	7	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.050.900	22.048.500	99,99%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
8	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	15 Paket	15 Paket	100%	8	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.237.000	10.181.350	99,46%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
9	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	47 Orang	47 Orang	100%	9	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.182.500	117.295.230	90,80%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
10	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	100%	10	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.580.500	12.495.550	99,32%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
11	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	11	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000	1.860.000	83,78%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
12	Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100%	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.272.000	88.026.158	97,51%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

13	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan	100%	13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.200.009	107.571.440	89,49%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
14	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	3 Laporan	100%	14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510.960.000	495.916.848	97,06%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
15	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	X			15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.900.000	40.849.975	99,88%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
16	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	X			16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.260.000	115.255.214	100,00%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
17	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	100%	17	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.665.388	84.148.883	99,39%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
Jumlah							2.760.607.285	2.535.620.922	94,41%			

Atasan Langsung

BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.
NIP. 19660531 199703 1 002

Jombang, 12 Januari 2024
Pemilik Kinerja

MISDI, S.Sos., M.M.
NIP. 19651210 199403 1 003

**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : **MOH. SYAMSUL BAHRI S.Sos**
 2 NIP : 19690802 199703 1 007
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Penata Tingkat I (III/d)
 4 JABATAN : Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
1	Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	100%	100%	100%	1	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	247.550.000	246.320.000	99,50%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
2	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	X			2	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	161.800.000	161.550.000	99,85%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
3	Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	91 Laporan	91 Laporan	100%	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.682.298.400	1.543.119.886	91,73%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
4	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	100%	4	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.431.897.200	1.317.646.073	92,02%	Sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
Jumlah								3.523.545.600	3.268.635.959	95,77%		

Atasan Langsung

BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.
NIP. 19660531 199703 1 002

Jombang, 12 Januari 2024
Pemilik Kinerja

MOH. SYAMSUL BAHRI S.Sos
NIP. 19690802 199703 1 007

**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

- 1 NAMA : **HERI SETYOBUDI, SP., MM.**
 2 NIP : 19741212 199803 1 007
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tingkat I (IV/b)
 4 JABATAN : Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
1	Tersedianya SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	82.000.001	35.175.208	43%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
2	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	50 Orang	100%	3	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	269.350.000	89.980.000	33%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil

Atasan Langsung

BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.
NIP. 19660531 199703 1 002

Jombang, 12 Januari 2024
Pemilik Kinerja

HERI SETYOBUDI, SP., MM.
NIP.19741212 199803 1 007

**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : **NURPUJI SUBAGYO, S.Sos.**
 2 NIP : 19710607 200901 1 002
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Penata Tingkat I (III/d)
 4 JABATAN : Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
1	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1	Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	500.000	500.000	100%	Sesuai dengan kebutuhan riil	Melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan riil
			1 Laporan	1 Laporan	100%		Jumlah	500.000	500.000,00	100%		

Atasan Langsung

BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.
NIP.19660531 199703 1 002

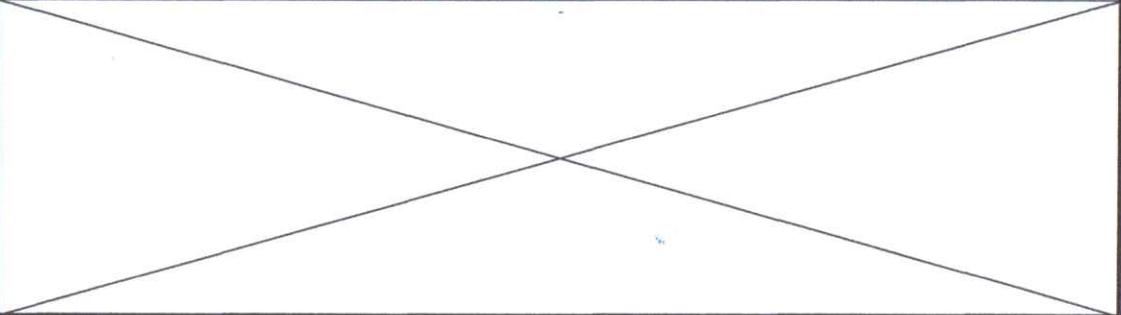
Jombang, 12 Januari 2024

Pemilik Kinerja

NURPUJI SUBAGYO, S.Sos.
NIP.19710607 200901 1 002

**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : **MAYA WULANDARI, A.Md.**
 2 NIP : 19861110 202012 2 004
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pengatur (II/c)
 4 JABATAN : Pengadministrasi Keuangan
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	Tersedianya Laporan dan dokumen kelengkapan berkas pengajuan gaji pegawai, rapel gaji dan uang makan pegawai	Jumlah laporan dan dokumen kelengkapan berkas pengajuan gaji pegawai, rapel gaji dan uang makan pegawai	3 Laporan/ Dokumen	3 Laporan/ Dokumen	100%						
2	Tersedianya Laporan dan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran	Jumlah laporan dan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran	3 Laporan/ Dokumen	3 Laporan/ Dokumen	100%						
3	Tersedianya Laporan dan dokumen kelengkapan berkas pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan UP, GU, TU dan LS	Jumlah laporan dan dokumen kelengkapan berkas pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan UP, GU, TU dan LS	3 Laporan/ Dokumen	3 Laporan/ Dokumen	100%						
4	Tersedianya Laporan dan dokumen kelengkapan administrasi yang terkait dengan perjalanan dinas pegawai	Jumlah laporan dan dokumen kelengkapan administrasi yang terkait dengan perjalanan dinas pegawai	3 Laporan/ Dokumen	3 Laporan/ Dokumen	100%						

Atasan Langsung

MISDI, S.Sos., M.M.

NIP. 19651210 199403 1 003

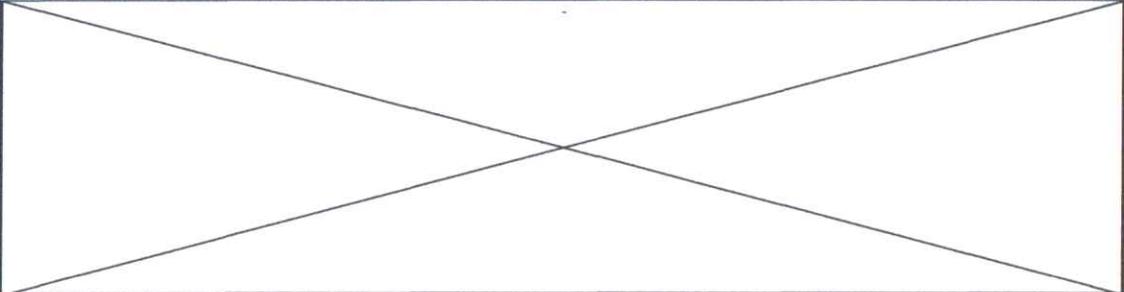
Jombang, 12 Januari 2024
Pemilik Kinerja

MAYA WULANDARI, A.Md.

NIP.19861110 202012 2 004

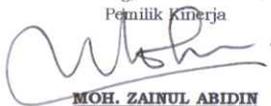
**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : **MOH. ZAINUL ABIDIN**
 2 NIP : 19830722 201001 1 004
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pengatur (II/c)
 4 JABATAN : Pengelola Logistik
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	Tersedianya data barang logistik baik jumlah dan kualitas barang logistik untuk kebutuhan penanganan bencana	Jumlah Laporan dan Dokumen barang logistik baik jumlah dan kualitas barang logistik untuk kebutuhan penanganan bencana	3 Laporan	3 Laporan	100%						
2	Tersedianya tempat penyimpanan barang logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Jumlah Laporan dan Dokumen tempat penyimpanan barang logistik dan peralatan penanggulangan bencana	3 Laporan dan dokumen	3 Laporan dan dokumen	100%						
3	Terlaksananya pengiriman dan pengambilan barang logistik kebutuhan penanganan bencana	Jumlah Laporan dan Dokumen pengiriman dan pengambilan barang logistik kebutuhan penanganan bencana	2 Laporan dan dokumen	2 Laporan dan dokumen	100%						
4	Tersedianya informasi barang logistik dan peralatan penanganan bencana	Jumlah Laporan dan Dokumen informasi barang logistik dan peralatan penanganan bencana	3 Laporan dan dokumen	3 Laporan dan dokumen	100%						

Atasan Langsung

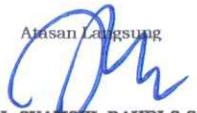
HERI SETYOBUDI, SP., MM.
 NIP.19741212 199803 1 007

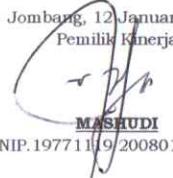
Jombang, 12 Januari 2024
 Pemilik Kinerja

MOH. ZAINUL ABIDIN
 NIP.19830722 201001 1 004

**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : **MASHUDI**
 2 NIP : 19771119 200801 1 008
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pengatur Tingkat I (II/d)
 4 JABATAN : Pranata Pemadam Kebakaran
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	Terlaksananya tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	Jumlah Laporan pelaksanaan tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	3 Laporan	3 Laporan	100%						
2	Terlaksananya pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	Jumlah Laporan pelaksanaan pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	3 Laporan	3 Laporan	100%						
3	Terlaksananya pemadaman kebakaran	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan pemadaman kebakaran	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
4	Terlaksananya evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran;	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
5	Terlaksananya inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
6	Terlaksananya sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						

Atasan Langsung

MOH. SYAMSUL BAHRI S.Sos
 NIP. 19690802 199703 1 007

Jombang, 12 Januari 2024
 Pemilik Kinerja

MASHUDI
 NIP. 19771119 200801 1 008

**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : **SAMIDI**
 2 NIP : 19721111 200801 1 007
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pengatur Tingkat I (II/d)
 4 JABATAN : Pranata Pemadam Kebakaran
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	Terlaksananya tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	Jumlah Laporan pelaksanaan tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	3 Laporan	3 Laporan	100%						
2	Terlaksananya pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	Jumlah Laporan pelaksanaan pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	3 Laporan	3 Laporan	100%						
3	Terlaksananya pemadaman kebakaran	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan pemadaman kebakaran	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
4	Terlaksananya evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran;	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
5	Terlaksananya inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
6	Terlaksananya sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						

Atasan Langsung

MOH. SYAMSUL BAHRI S.Sos
 NIP. 19690802 199703 1 007

Jombang, 12 Januari 2024
 Pemilik Kinerja

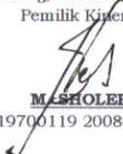
SAMIDI
 NIP.19721111 200801 1 007

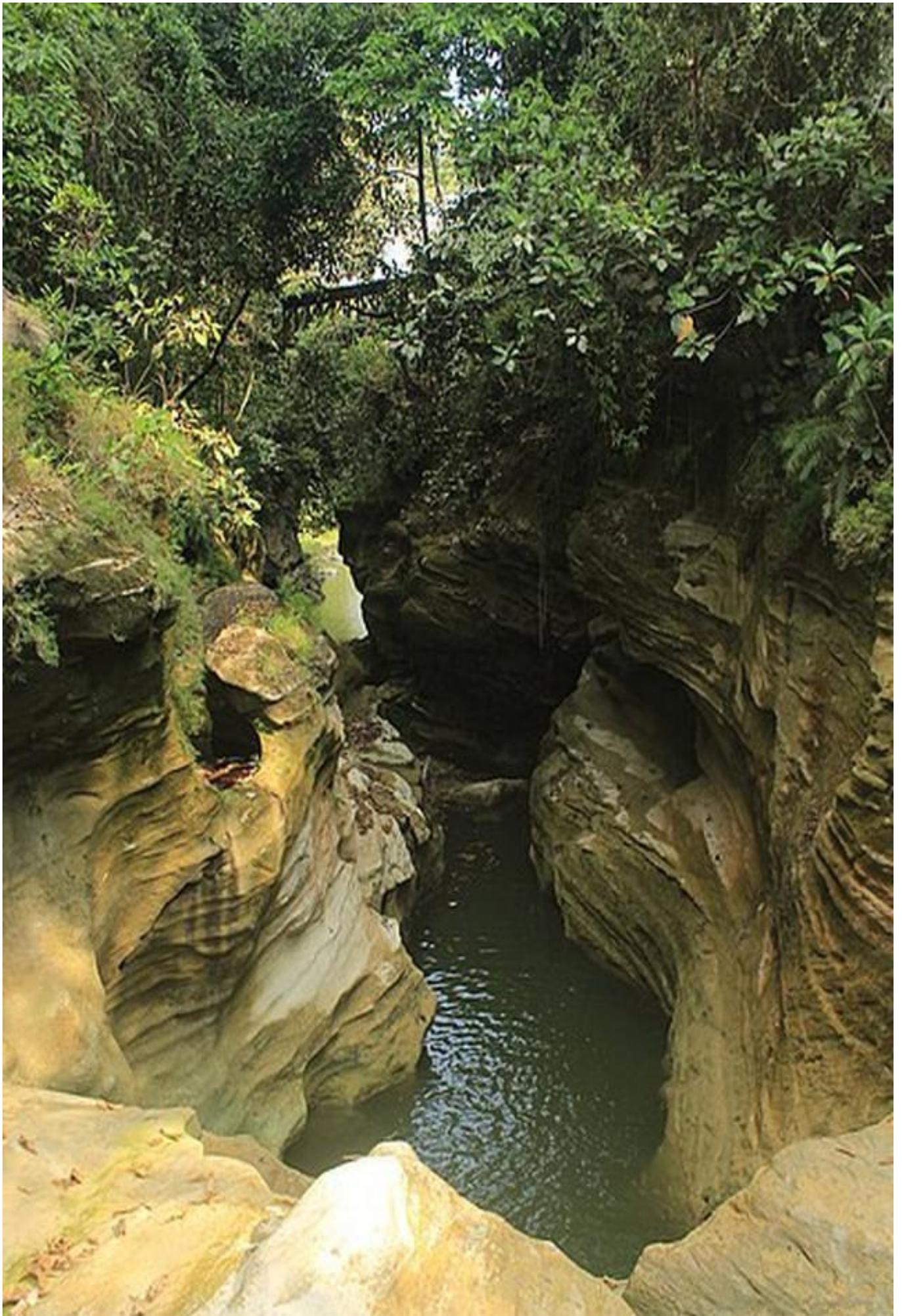
**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : **M. SHOLEH**
 2 NIP : 19700119 200801 1 005
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
 4 JABATAN : Pranata Pemadam Kebakaran
 5 UNIT KERJA : BPBD Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	Terlaksananya tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	Jumlah Laporan pelaksanaan tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	3 Laporan	3 Laporan	100%	X					
2	Terlaksananya pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	Jumlah Laporan pelaksanaan pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	3 Laporan	3 Laporan	100%						
3	Terlaksananya pemadaman kebakaran	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan pemadaman kebakaran	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
4	Terlaksananya evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
5	Terlaksananya inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						
6	Terlaksananya sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	3 Laporan dan Dokumen	3 Laporan dan Dokumen	100%						


 Atasan Langsung
MOH. SYAMSUL BAHRI S.Sos
 NIP. 19690802 199703 1 007

Jombang, 12 Januari 2024
 Pemilik Kinerja

M. SHOLEH
 NIP. 19700119 200801 1 005



Lampiran VI

Bukti Dukung Capaian Kinerja Sasaran





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Letjend. S. Parman No. 55 Waru Telp. / Fax (031) 8550222 (031) 8550101
SIDOARJO – 61256

Sidoarjo, 10 Januari 2024

Nomor : 360/ 0128 /208.2/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Nilai Indeks
Kapasitas Daerah (IKD)
dan Indeks Risiko
Bencana (IRB) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2023

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Pelaksana BPBD se-Jawa Timur
di-
Tempat

Dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, BPBD Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan Pengukuran IKD dan IRB 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui surat ini disampaikan nilai IKD dan IRB 38 Kabupaten/Kota serta nilai IKD dan IRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



GATOT SOEBROTO, SE. M. PSDM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19750525 199903 1 010

LAMPIRAN : Surat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur
NOMOR : 360/ 0128 /208.2/2024
TANGGAL : 10 Januari 2024

A. HASIL PENGUKURAN IKD 38 KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR TAHUN 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	IKD OPD KAB/KOTA	KELAS IKD KAB/KOTA
1	PACITAN	0,86	0,90	0,81	0,83	0,56	0,64	0,80	0,71	SEDANG
2	PONOROGO	0,63	0,53	0,72	0,93	0,40	0,42	0,68	0,55	SEDANG
3	TRENGGALEK	0,84	1,00	0,74	0,76	0,59	0,56	0,50	0,63	SEDANG
4	TULUNGAGUNG	0,95	1,00	0,74	0,64	0,75	0,55	0,47	0,65	SEDANG
5	BLITAR	0,90	1,00	0,77	0,88	0,51	0,51	0,40	0,60	SEDANG
6	KEDIRI	0,92	1,00	0,76	0,70	0,55	0,58	0,49	0,63	SEDANG
7	MALANG	0,96	0,80	0,83	0,76	0,39	0,64	0,61	0,64	SEDANG
8	LUMAJANG	1,00	0,90	0,93	0,97	0,91	0,63	0,57	0,78	SEDANG
9	JEMBER	0,85	0,80	0,74	0,53	0,38	0,42	0,84	0,55	SEDANG
10	BANYUWANGI	0,93	1,00	0,71	0,83	0,78	0,50	0,75	0,70	SEDANG
11	BONDOWOSO	0,78	0,80	0,81	0,54	0,38	0,56	0,81	0,60	SEDANG
12	SITUBONDO	0,90	0,80	0,94	0,81	0,67	0,61	0,86	0,73	SEDANG
13	PROBOLINGGO	0,74	0,80	0,70	0,68	0,62	0,48	0,50	0,59	SEDANG
14	PASURUAN	0,77	1,00	0,94	0,81	0,80	0,62	0,65	0,74	SEDANG
15	SIDOARJO	0,97	0,97	0,89	0,85	0,70	0,72	0,85	0,79	SEDANG
16	MOJOKERTO	0,93	0,80	0,74	0,85	0,75	0,74	0,64	0,76	SEDANG
17	JOMBANG	0,88	0,33	0,58	0,51	0,18	0,50	0,20	0,41	SEDANG
18	NGANJUK	0,78	0,90	0,49	0,97	0,60	0,54	0,62	0,64	SEDANG
19	MADIUN	0,49	0,20	0,28	0,51	0,42	0,27	0,40	0,35	RENDAH
20	MAGETAN	1,00	0,90	0,73	1,00	0,62	0,53	0,47	0,66	SEDANG
21	NGAWI	0,66	0,43	0,60	0,73	0,53	0,43	0,38	0,50	SEDANG
22	BOJONEGORO	0,82	0,80	0,76	0,65	0,53	0,55	0,42	0,59	SEDANG
23	TUBAN	0,81	0,77	0,77	0,59	0,40	0,47	0,32	0,51	SEDANG
24	LAMONGAN	0,85	1,00	0,91	0,75	0,76	0,46	0,51	0,65	SEDANG
25	GRESIK	0,79	0,80	0,85	0,60	0,83	0,51	0,54	0,65	SEDANG
26	BANGKALAN	0,72	0,53	0,56	0,75	0,53	0,57	0,54	0,58	SEDANG
27	SAMPANG	0,80	0,77	0,50	0,70	0,75	0,47	0,66	0,62	SEDANG
28	PAMEKASAN	0,94	0,80	0,76	0,76	0,59	0,90	0,81	0,79	SEDANG
29	SUMENEP	0,64	0,53	0,86	1,00	0,56	0,61	0,40	0,63	SEDANG
30	KOTA KEDIRI	0,75	0,77	0,86	0,85	0,85	0,69	0,73	0,77	SEDANG
31	KOTA BLITAR	0,84	0,80	0,81	0,55	0,27	0,38	0,21	0,43	SEDANG
32	KOTA MALANG	0,79	0,80	0,75	0,90	0,35	0,57	0,65	0,61	SEDANG
33	KOTA PROBOLINGGO	0,67	0,20	0,53	0,97	0,47	0,23	0,29	0,41	SEDANG
34	KOTA PASURUAN	0,68	0,80	0,51	0,81	0,36	0,36	0,48	0,48	SEDANG
35	KOTA MOJOKERTO	0,36	0,23	0,55	0,57	0,48	0,44	0,20	0,42	SEDANG
36	KOTA MADIUN	0,78	0,80	0,63	0,44	0,35	0,45	0,26	0,46	SEDANG
37	KOTA SURABAYA	0,73	0,60	0,67	0,70	0,65	0,47	0,40	0,56	SEDANG
38	KOTA BATU	0,96	1,00	0,88	0,91	0,47	0,55	0,47	0,64	SEDANG
	IKD OPD KAB/KOTA	0,81	0,76	0,73	0,75	0,56	0,53	0,54	0,61	SEDANG

-----ooo0ooo-----

LAMPIRAN : Surat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur
NOMOR : 360/ /208.2/2024
TANGGAL : Januari 2024

**B. HASIL PENGUKURAN IKD 38 KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PACITAN	0,70	0,57	0,55	0,66	0,71	0,71
2	PONOROGO	0,47	0,45	0,50	0,54	0,53	0,55
3	TRENGGALEK	0,59	0,58	0,58	0,56	0,60	0,63
4	TULUNGAGUNG	0,67	0,57	0,58	0,65	0,64	0,65
5	BLITAR	0,40	0,43	0,52	0,56	0,58	0,60
6	KEDIRI	0,45	0,52	0,50	0,54	0,59	0,63
7	MALANG	0,63	0,51	0,51	0,55	0,58	0,64
8	LUMAJANG	0,57	0,70	0,76	0,75	0,75	0,78
9	JEMBER	0,46	0,40	0,71	0,55	0,56	0,55
10	BANYUWANGI	0,77	0,61	0,68	0,69	0,69	0,70
11	BONDOWOSO	0,32	0,34	0,72	0,76	0,55	0,60
12	SITUBONDO	0,32	0,44	0,70	0,71	0,72	0,73
13	PROBOLINGGO	0,71	0,30	0,55	0,60	0,60	0,59
14	PASURUAN	0,32	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74
15	SIDOARJO	0,67	0,67	0,66	0,73	0,78	0,79
16	MOJOKERTO	0,32	0,57	0,61	0,69	0,70	0,76
17	JOMBANG	0,32	0,40	0,35	0,42	0,47	0,41
18	NGANJUK	0,32	0,52	0,54	0,54	0,56	0,64
19	MADIUN	0,32	0,53	0,26	0,39	0,42	0,35
20	MAGETAN	0,32	0,43	0,24	0,59	0,64	0,66
21	NGAWI	0,32	0,32	0,38	0,38	0,44	0,50
22	BOJONEGORO	0,46	0,51	0,53	0,56	0,59	0,59
23	TUBAN	0,32	0,32	0,42	0,46	0,48	0,51
24	LAMONGAN	0,51	0,59	0,56	0,62	0,70	0,65
25	GRESIK	0,55	0,57	0,57	0,61	0,57	0,65
26	BANGKALAN	0,43	0,40	0,51	0,56	0,58	0,58
27	SAMPANG	0,32	0,35	0,43	0,47	0,55	0,62
28	PAMEKASAN	0,32	0,20	0,30	0,63	0,79	0,79
29	SUMENEP	0,32	0,37	0,62	0,53	0,61	0,63
30	KOTA KEDIRI	0,32	0,51	0,52	0,65	0,76	0,77
31	KOTA BLITAR	0,32	0,38	0,49	0,31	0,40	0,43
32	KOTA MALANG	0,32	0,44	0,44	0,56	0,72	0,61
33	KOTA PROBOLINGGO	0,32	0,50	0,59	0,55	0,38	0,41
34	KOTA PASURUAN	0,32	0,58	0,46	0,45	0,47	0,48
35	KOTA MOJOKERTO	0,32	0,25	0,42	0,42	0,42	0,42
36	KOTA MADIUN	0,32	0,41	0,25	0,25	0,35	0,46
37	KOTA SURABAYA	0,32	0,37	0,37	0,42	0,45	0,56
38	KOTA BATU	0,32	0,56	0,51	0,53	0,56	0,64
	IKD KAB/KOTA	0,42	0,47	0,52	0,56	0,58	0,61

-----ooo0ooo-----

LAMPIRAN : Surat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur
NOMOR : 360/ /208.2/2024
TANGGAL : Januari 2024

**C. HASIL PERHITUNGAN IRB 38 KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR
TAHUN 2015-2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PACITAN	215,20	215,20	192,03	126,21	123,14	121,27	116,39	111,05	106,98
2	PONOROGO	155,20	155,20	155,20	140,77	127,14	115,60	106,50	99,83	94,24
3	TRENGGALEK	198,00	198,00	198,00	170,91	151,25	151,25	151,25	136,02	123,99
4	TULUNGAGUNG	201,20	201,20	201,20	169,75	151,42	137,68	126,28	118,03	111,34
5	BLITAR	210,00	210,00	210,00	198,06	178,37	160,26	146,14	134,86	125,76
6	KEDIRI	178,00	178,00	178,00	163,09	144,43	131,50	121,46	112,47	104,53
7	MALANG	219,20	219,20	199,81	142,10	137,09	133,20	128,84	124,34	118,63
8	LUMAJANG	231,20	231,20	200,76	129,74	123,84	117,76	113,78	110,47	107,00
9	JEMBER	219,20	219,20	219,07	198,80	182,18	158,19	146,30	137,23	130,23
10	BANYUWANGI	219,20	208,71	206,44	168,29	151,91	137,92	127,80	120,26	114,14
11	BONDOWOSO	166,00	166,00	166,00	166,00	150,96	128,75	112,39	105,17	98,38
12	SITUBONDO	168,40	168,40	168,40	168,40	149,35	128,39	113,48	102,44	94,11
13	PROBOLINGGO	194,00	194,00	194,00	162,29	156,70	141,16	128,87	119,66	113,01
14	PASURUAN	214,00	214,00	214,00	214,00	180,34	156,26	139,18	126,32	116,77
15	SIDOARJO	149,60	149,60	132,02	85,29	81,62	79,15	75,95	72,69	69,88
16	MOJOKERTO	163,60	163,60	163,60	163,60	140,94	123,74	110,06	99,84	91,17
17	JOMBANG	154,80	154,80	154,80	154,80	138,40	128,55	119,16	110,18	105,17
18	NGANJUK	152,80	152,80	152,80	152,80	132,87	118,22	107,88	99,67	91,75
19	MADIUN	155,20	155,20	155,20	155,20	134,81	130,18	121,35	113,47	109,42
20	MAGETAN	152,80	152,80	152,80	152,80	135,80	131,26	115,72	103,51	94,17
21	NGAWI	143,20	143,20	143,20	143,20	131,06	119,98	119,98	109,72	100,32
22	BOJONEGORO	150,00	104,65	101,38	96,93	93,63	90,44	87,55	84,39	81,79
23	TUBAN	175,20	175,20	175,20	175,20	160,38	145,00	133,04	123,10	114,78
24	LAMONGAN	174,00	174,00	167,36	139,55	125,33	115,86	107,52	99,50	94,48
25	GRESIK	175,20	137,79	126,77	101,35	99,29	99,29	96,50	94,89	91,42
26	BANGKALAN	164,40	164,40	158,66	139,01	129,50	118,71	109,55	102,13	96,45
27	SAMPANG	154,80	154,80	154,80	154,80	140,63	127,19	116,36	106,15	97,01
28	PAMEKASAN	180,40	180,40	180,40	180,40	172,53	160,19	139,45	120,85	107,44
29	SUMENEP	204,80	204,80	204,80	204,80	184,62	160,35	146,19	133,27	123,13
30	KOTA KEDIRI	140,80	140,80	140,80	140,80	122,79	109,69	97,63	86,98	79,10
31	KOTA BLITAR	132,00	132,00	132,00	132,00	118,79	106,06	102,65	96,75	91,12
32	KOTA MALANG	113,60	113,60	113,60	113,60	100,77	91,26	82,25	73,13	68,00
33	KOTA PROBOLINGGO	148,40	148,40	148,40	148,40	129,83	114,16	104,10	101,33	97,72
34	KOTA PASURUAN	158,40	158,40	158,40	158,40	136,22	123,69	115,23	108,09	102,25
35	KOTA MOJOKERTO	142,80	142,80	142,80	142,80	133,95	120,57	120,57	110,59	103,02
36	KOTA MADIUN	136,00	136,00	136,00	136,00	121,28	116,73	116,73	108,85	99,64
37	KOTA SURABAYA	166,80	166,80	166,80	166,80	150,34	150,34	136,36	124,93	113,31
38	KOTA BATU	134,40	134,40	134,40	134,40	116,06	104,09	95,31	88,04	81,05
		171,39	168,94	165,79	152,40	137,88	126,42	117,26	108,69	101,65

Keterangan :

NILAI IRB	KASLIFIKASI IRB
< 13	Rendah
13 – 144	Sedang
> 144	Tinggi

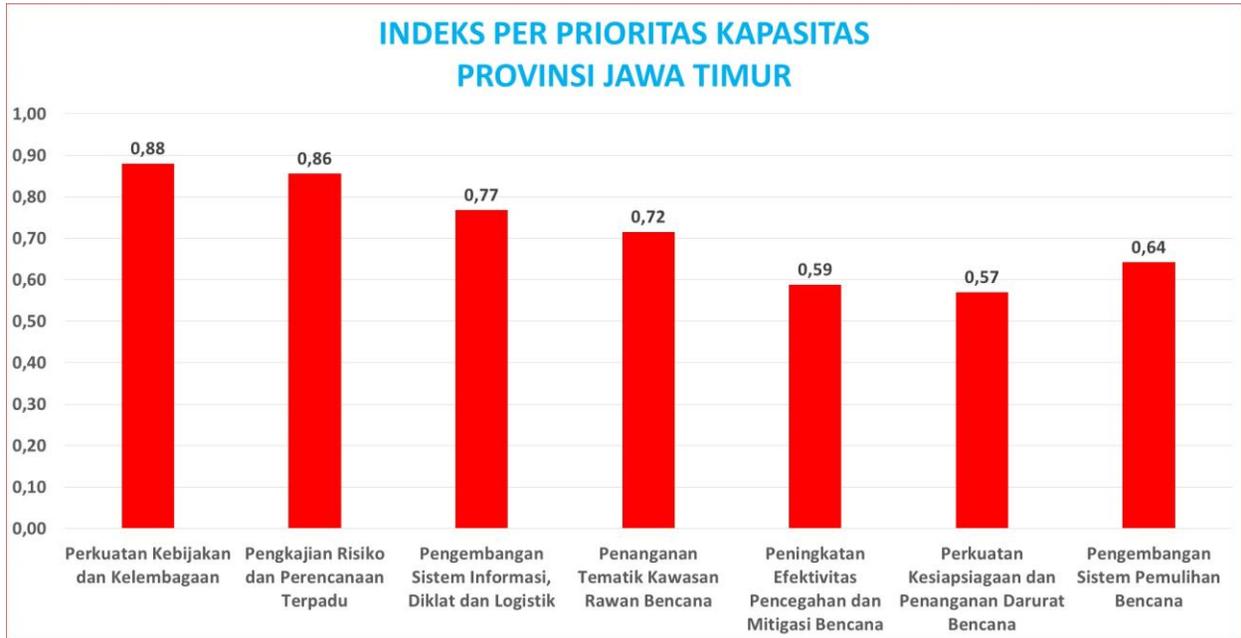
-----ooo0ooo-----

LAMPIRAN : Surat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur
NOMOR : 360/ /208.2/2024
TANGGAL : Januari 2024

D. HASIL PENGUKURAN IKD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

PROVINSI	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	IKD	KELAS
JAWA TIMUR	0,88	0,86	0,77	0,72	0,59	0,57	0,64	0,65	SEDANG

E. HASIL PERHITUNGAN IRB PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2023



Keterangan :

NILAI IRB	KASLIFIKASI IRB
< 13	Rendah
13 – 144	Sedang
> 144	Tinggi

-----ooo0ooo-----



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 137 Telp. (0321) 861292 Fax. (0321) 865468
JOMBANG

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : 364/ 714 /415.46.05/2024

HARI : Selasa
TANGGAL : 9 April 2024
WAKTU : 02.21 WIB
KEJADIAN : Kebakaran Tempat Usaha (Kandang Ayam)
TEMPAT : Dsn. Bangle Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang.
(-7.697750,112.253327)
DESKRIPSI : 1. Pkl. 02.19 WIB : Pemilik mendengar gemuruan petir berselang beberapa menit kobaran api udah membesar dan merabat dengan cepat;
2. Pkl. 02.21 WIB : karyawan melaporkan kejadian kebakaran ke Pos Damakr Ngoro.
DAMPAK : Kandang ayam Seluas 8X114m dan 1 unit motor.
UPAYA YANG DILAKUKAN : 1. Pkl. 02.21 WIB : Pos Damkar Ngoro menerima laporan dan dilanjutkan ke pimpinan;
2. Pkl. 02.23 WIB : Pos Damkar Ngoro beserta tim menuju lokasi;
3. Pkl. 02.30 WIB : Tim tiba dilokasi melakukan pemadaman;
4. Pkl. 05.30 WIB : Penanganan selesai, Tim kembali ke markas.
KONDISI TERKINI : Api berhasil di padamkan.
PERSONIL TERLIBAT : 1. Pos Damkar Ngoro;
2. Pos Damkar Jombang;
3. Pemilik;
4. Karyawan;
5. Warga.
PERALATAN : 1. Satu unit fire pumper truck beserta peralatannya;
2. Satu unit supply truck beserta peralatannya.

Mengetahui,
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
Koordinator Pemadam Kebakaran,

MOH. SYAMSUL BAHRI, S.Sos.

Penata Tingkat I

NIP. 19690802 199703 1 007

Pos Pemadam Kebakaran Ngoro
Koordinator,

M. SHOLEH.

Pengatur Muda Tingkat I

NIP. 19700119 200801 1 005

DOKUMENTASI





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 137 Telp. (0321) 861292 Fax. (0321) 865468
JOMBANG

LAPORAN INVESTIGASI KEBAKARAN

Nomor: 364/ 115 /415.46.05/2023

HARI : Selasa
TANGGAL : 9 April 2024
WAKTU : 02.21 WIB
TEMPAT : Dsn. Bangle Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang.
(-7.697750,112.253327)
DESKRIPSI : 1. Melakukan investigasi;
2. Di duga api berasal dari Sambaran Petir;
3. Penanganan dan investigasi selesai, tim kembali ke markas.
PROSES INVESTIGASI : Melakukan investigasi penyebab kebakaran;
HASIL INVESTIGASI : Kebakaran di perkirakan berasal dari Sambaran Petir.
REKOMENDASI : Memiliki dan melakukan pengecekan berkala pada apar.

Mengetahui,
**KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIGAN**
Koordinator Pemadam Kebakaran,

MOH. SAMSUL BAHRI, S.Sos.

Penata Tingkat I

NIP. 19690802 199703 1 007

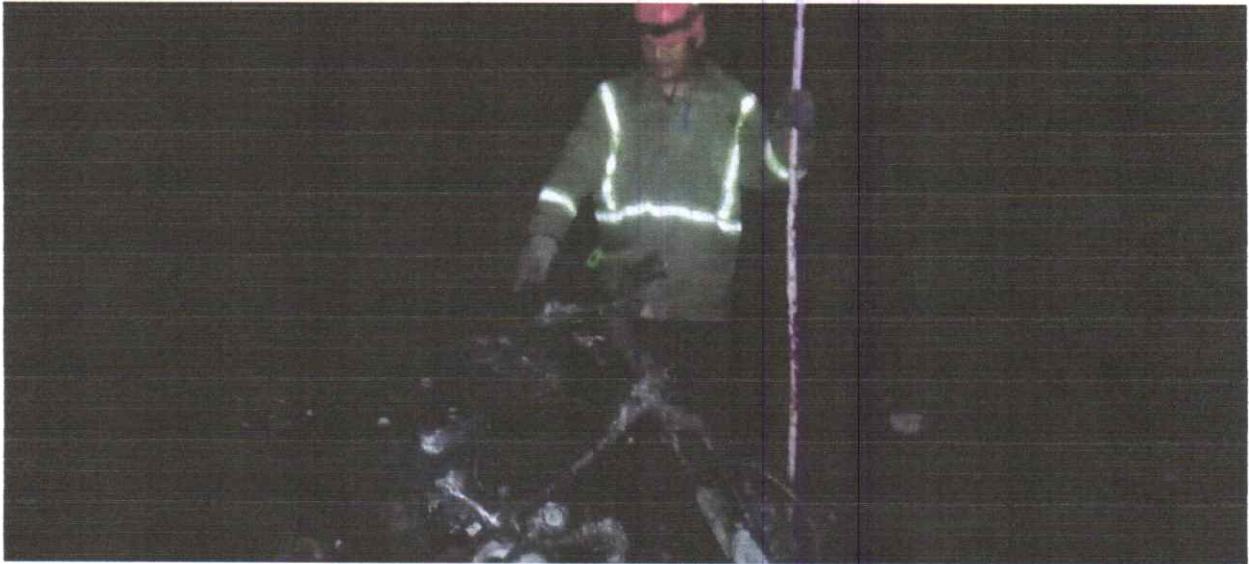
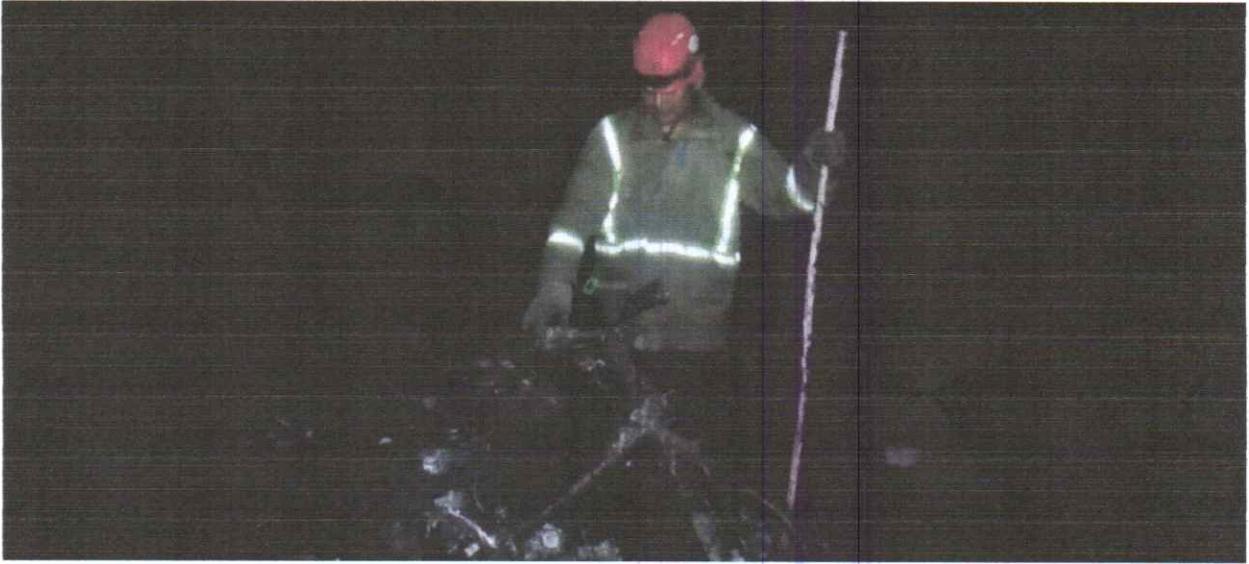
Pos Pemadam Kebakaran Ngoro
Koordinator,

M. SHOLEH.

Pengatur Muda tingkat I

NIP. 19700119 200801 1 005

DOKUMENTASI





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
INSPEKTORAT

Jl. Gatot Subroto 169 Jombang Tlp. (0321) 861424 Faks. (0321) 861424
JOMBANG

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR LHE : X.700/ 575 /415.15/2023

TANGGAL 23 AGUSTUS 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Dasar Hukum Evaluasi	1
II. Latar Belakang Evaluasi	2
III. Tujuan Evaluasi	3
IV. Ruang Lingkup Evaluasi	3
V. Metodologi Evaluasi	3
VI. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja	3
VII. Gambaran Umum Implementasi SAKIP	4
VIII. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	5
IX. Gambaran Hasil Evaluasi	5
X. Penutup	8



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
INSPEKTORAT

Jl. Gatot Subroto No. 169 Jelakombo Tlp. (0321) 861424 Faks. (0321) 861424
JOMBANG

Jombang, 23 Agustus 2023

Kepada

Nomor	: X.700/575/415.15/2023	Yth. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan
Sifat	: Penting	Bencana Daerah
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kabupaten Jombang
Hal	: Laporan Hasil Evaluasi atas	di
	Implementasi SAKIP pada	JOMBANG
	Badan Penanggulangan Bencana	
	Daerah Kabupaten Jombang	
	Tahun 2023	

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

- h. Peraturan Bupati Jombang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang.
- i. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
- j. Keputusan Bupati Jombang Tanggal 30 Desember 2022 Nomor : 188.4.45/445/415.10.1.3/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023.
- k. Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Tanggal 03 April 2023 Nomor: 188/0462/415.15/2023 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: 188/2537/415.15/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jombang Tahun 2023
- l. Surat Tugas Bupati Jombang Nomor: 094/0652/415.15/2023 tanggal 31 Mei 2023.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi SAKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi SAKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sedangkan secara khusus tujuan evaluasi SAKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antara lain :

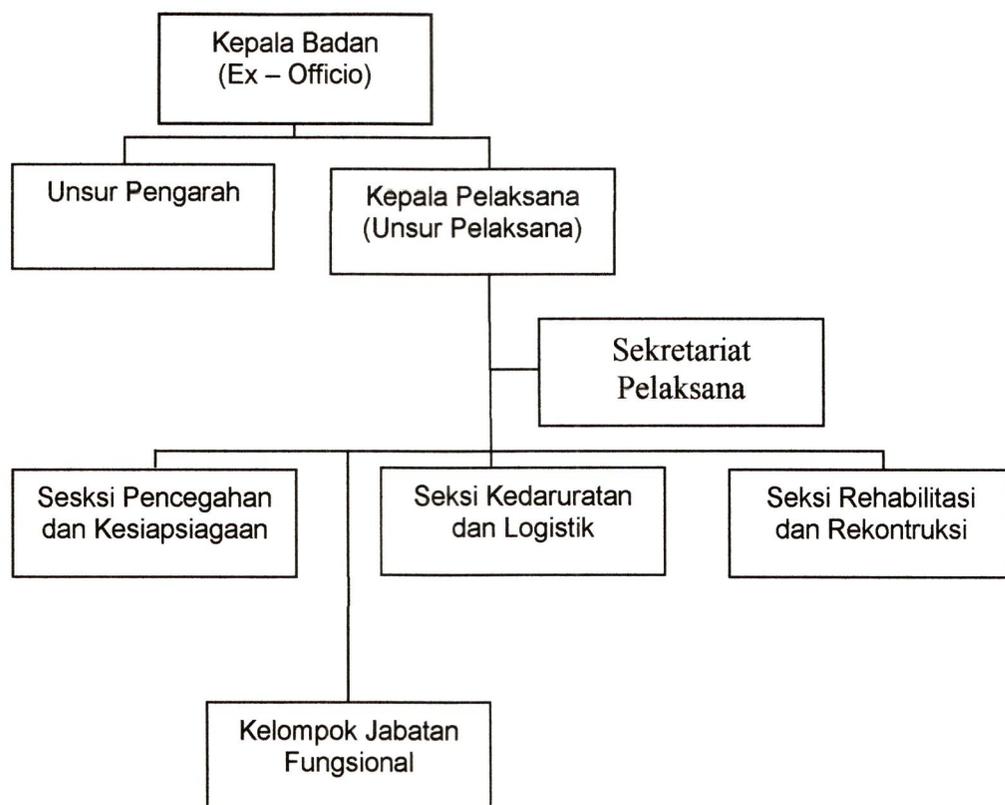
- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang termasuk di dalamnya adalah penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk menyelenggarakan Sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pencegahan, penanggulangan bencana, kedaruratan logistik serta rehabilitasi akibat bencana. Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, perumusan rencana program dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, memperoleh nilai sebesar **71,01** dengan kategori **(BB) Sangat Baik**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor per komponen*)
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,17	77,23	B
2	Pengukuran Kinerja	30%	22,52	75,08	B
3	Pelaporan Kinerja	15%	6,88	45,83	D
4	Evaluasi Kinerja	25%	18,44	73,75	B
Total		100%	71,01		

*) Skor per komponen merupakan predikat berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021

(Dalam poin 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas Kinerja Instansi)

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya telah seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, namun perbaikan-perbaikan yang dilakukan belum memberikan peningkatan yang signifikan dalam implementasi SAKIP Tahun 2023.

9. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kondisi Evaluasi (2.03.04)

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 23,17 dari bobot 30% atau dengan capaian 77,23% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%) namun terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

- a. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana belum memenuhi kriteria SMART pada aspek Spesifik karena belum menggambarkan parameter kinerja secara khusus.
- b. Target Kinerja yang ditetapkan pada Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana belum cukup menantang karena menggunakan formulasi/ perhitungan yang kurang sesuai.
- c. Atas penetapan target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya namun hanya menganalisa capaian pada Tahun 2022, sedangkan realisasi tahunan tidak disajikan pada Berita Acara Monitoring maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022.
- d. Telah terdapat Standar Operasional Prosedur monitoring capaian target jangka menengah namun jadwal pelaksanaan monitoring belum tersaji.
- e. Upaya perbaikan yang disajikan pada Berita Acara Reviu Renstra belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 22,52 dari bobot 30% atau dengan capaian 75,08% (B) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%), namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan sebagaimana penggunaan aplikasi TPP melalui e-office kabupaten, namun berdasarkan rekapitulasi penilaian kinerja pegawai yang dilampirkan dalam rangka pemberian reward dan punishment tidak didapati standar yang jelas dalam pengukuran kualitas kinerja yang dihasilkan oleh individu pegawai sebagai salah satu parameter dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan.
- b. Pengukuran Kinerja yang telah dilakukan sampai dengan tribulan II belum didapati bukti yang cukup bahwa hasil evaluasi atas pengukuran kinerja berdampak secara maksimal atas penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja pada periode berikutnya.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 6,88 dari bobot 15% atau dengan capaian 45,83% (D) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>0% - 25%), yang berarti kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

- a. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan yaitu belum menyajikan efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang menjelaskan kondisi perbandingan antara kebutuhan standar SDM dan sarana dan prasarana dengan kondisi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang.
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk dasar dilakukan penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja sebagai contoh dalam melakukan penyesuaian anggaran hanya didasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah, adanya

target kinerja yang telah tercapai diawal tidak dijadikan dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 18,44 dari bobot 25% atau dengan capaian 73,75% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%), sehingga masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja.

b. Rekomendasi (06)

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, agar:

- a. Melakukan evaluasi kembali dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang atas indikator kinerja, formulasi, dan target yang digunakan pada sasaran Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dengan indikator Persentase Capaian Indikator Ketahanan Daerah untuk selanjutnya ditetapkan pada Renstra periode selanjutnya.
- b. Menyusun mekanisme Monitoring Target Jangka menengah meliputi proses evaluasi dan jadwal monitoring sebagai pedoman untuk monitoring pada periode selanjutnya sehingga hasil monitoring dapat menyajikan secara detail hambatan, upaya, dan rekomendasi yang dapat memberikan perbaikan.
- c. Menyusun mekanisme *reward and punishment* dengan menyajikan parameter hasil pengukuran kinerja untuk memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja, serta menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu kondisi atau keadaan.
- d. Mengusulkan kepada BKPSDM Kabupaten Jombang agar menambahkan parameter standar atas kinerja sebagai kriteria pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- e. Meningkatkan kualitas evaluasi pengukuran kinerja untuk selanjutnya memanfaatkan hasil evaluasi pengukuran kinerja sebagai bahan untuk

penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja

- f. Menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja.
- g. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran, maupun perencanaan kinerja.
- h. Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja.

10. Penutup

a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang yang meliputi 4 (empat) komponen penilaian diketahui masih terdapat skor per komponen yang masih kurang yaitu pada Pelaporan Kinerja dengan skor D yang berarti bahwa kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

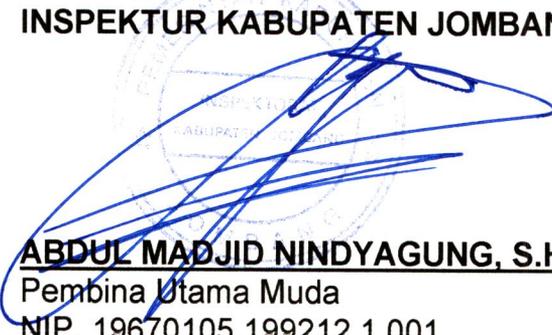
Berdasarkan simpulan di atas maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP pada periode berikutnya khususnya pada komponen evaluasi dan pelaporan kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan koreksi.

Kami menghargai upaya dari seluruh jajaran pegawai dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang.

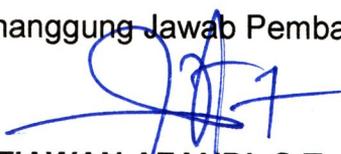
Mengetahui,

INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG


ABDUL MADJID NINDYAGUNG, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670105 199212 1 001

Tim Evaluasi,

Penanggung Jawab Pembantu


SETIAWAN AFANDI, S.T., M.T.

Pengendali Teknis,

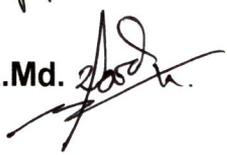

ABD. WAHID, S.E.

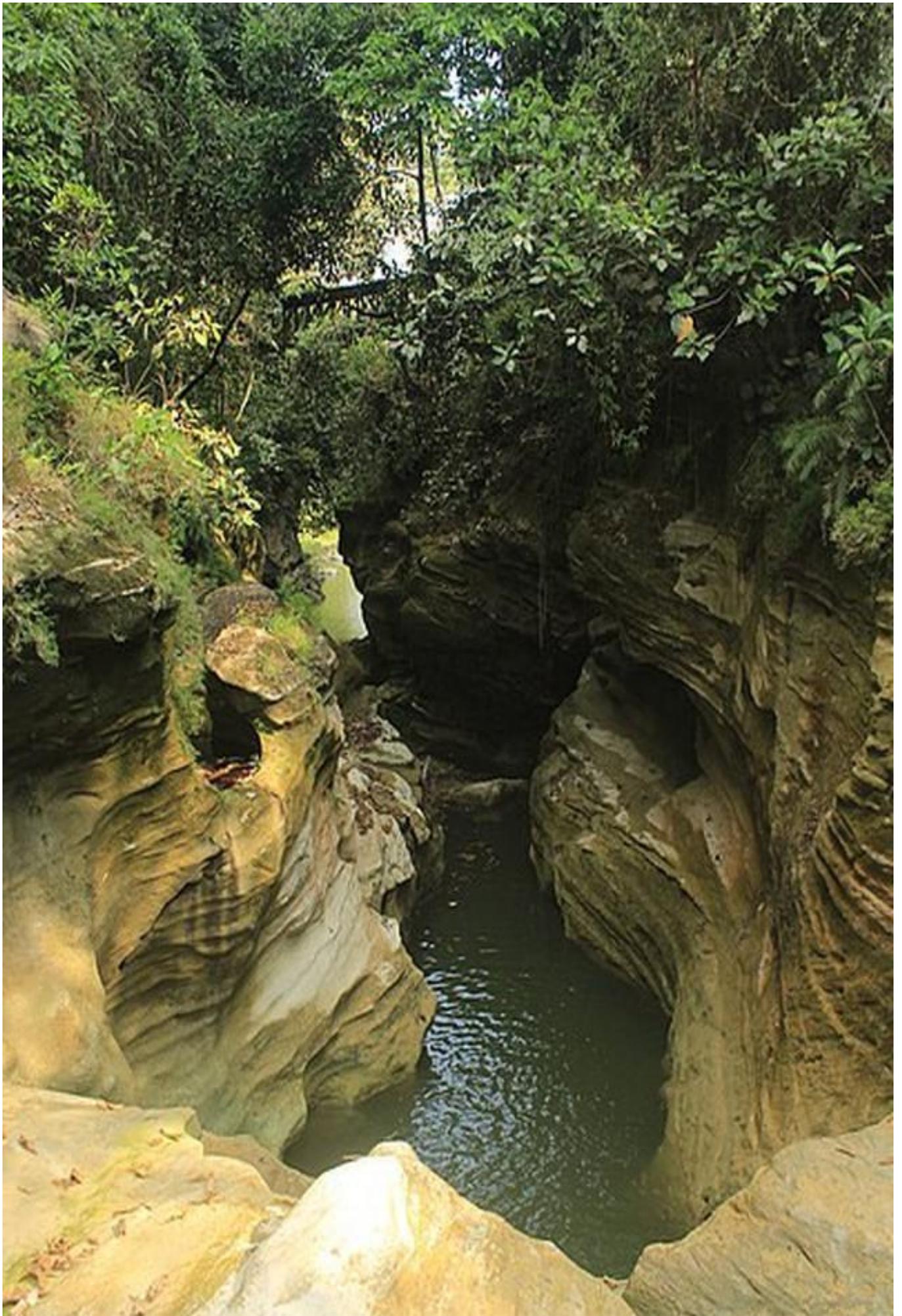
Ketua Tim,


RANGGA KUSUMA, S.A.B.

Anggota Tim,

1. **LINA TRI JAYANTI, S.E.** 

2. **AKHIB ARDIANSYAH, A.Md.** 



Lampiran 099

Bukti Dukung Capaian Kinerja Program





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 137 Telp. (0321) 861292 Fax. (0321) 865468
JOMBANG

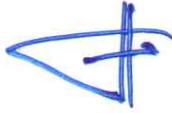
LAPORAN KEJADIAN

Nomor : 362/423 /415.46.05/2024

- HARI** : Sabtu
- TANGGAL** : 09 Maret 2024
- WAKTU** : 12.30 WIB
- KEJADIAN** : Tanah Longsor
- TEMPAT** : Dsn. Ngampungan, RT./RW. 004/004, Ds. Ngampungan, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang ;
- DESKRIPSI** : **Kamis, 07 Maret 2024**
1. Pkl. 01.00 WIB : Terjadi hujan deras di wilayah Bareng;
 2. Pkl.01.30 WIB : Warga mengetahui adanya Tanah Longsor di Dsn. Ngampungan, RT./RW. 004/004
- Jumat, 08 Maret 2024**
3. Pkl. 11.00 WIB : Perangkat Desa Ngampungan melaporkan kejadian tersebut ke PUSDALOPS - PB BPBD Kab. Jombang
- DAMPAK** : Merusak perkebunan durian, serta persawahan dengan luasan sekitar 4Ha.
- UPAYA YANG DILAKUKAN** : 1. Pkl. 11.00 WIB : PUSDALOPS -PB BPBD Kab. Jombang menerima laporan dan dilanjutkan ke Pimpinan;
2. Pkl. 11.15 WIB : PUSDALOPS - PB BPBD Kab. Jombang memberangkatkan tim menuju lokasi;
 3. Pkl. 11.45 WIB : Tim tiba di lokasi, melakukan pengumpulan data dan kaji cepat pada titik kejadian Tanah Longsor di Dsn. Ngampungan, RT./RW. 004/004;
 4. Pkl. 15.00 WIB : Pengumpulan data dan kaji cepat selesai, tim kembali ke markas.
- KONDISI TERKINI** : 1. Tanah Longsor pada Dsn. Ngampungan, RT./RW. 004/004, Ds. Ngampungan menimpa dan merusak perkebunan durian, serta persawahan dan menutup sebagian aliran Sungai;
2. Masih dimungkinkan ada longsor susulan karena kondisi tanah yang masih basah, labil dan terdapat retakan pada tanah yg longsor.
- PERSONIL TERLIBAT** : 1. Unit Operasi PUSDALOPS - PB Kab. Jombang;
2. Perangkat Desa Ngampungan;
 3. BABINSA Desa Ngampungan;
 4. Mahasiswi KKN UNHASY Tebuireng.

PERALATAN : Satu unit *motor trail* beserta peralatannya.

Mengetahui,
**KEPALA SEKSI KEDARURATAN DAN
LOGISTIK**
Manager,



 **HERY SETYOBUDI, SP., MM.**
Pembina Tingkat I
NIP. 19741212 199803 1 007

Operator,



BAGUS KURNIAWAN

DOKUMENTASI





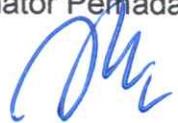
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 137 Telp. (0321) 861292 Fax. (0321) 865468
JOMBANG

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : 364/ 714 /415.46.05/2024

HARI : Selasa
TANGGAL : 9 April 2024
WAKTU : 02.21 WIB
KEJADIAN : Kebakaran Tempat Usaha (Kandang Ayam)
TEMPAT : Dsn. Bangle Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang.
(-7.697750,112.253327)
DESKRIPSI : 1. Pkl. 02.19 WIB : Pemilik mendengar gemuruan petir berselang beberapa menit kobaran api udah membesar dan merabat dengan cepat;
2. Pkl. 02.21 WIB : karyawan melaporkan kejadian kebakaran ke Pos Damakr Ngoro.
DAMPAK : Kandang ayam Seluas 8X114m dan 1 unit motor.
UPAYA YANG DILAKUKAN : 1. Pkl. 02.21 WIB : Pos Damkar Ngoro menerima laporan dan dilanjutkan ke pimpinan;
2. .Pkl. 02.23 WIB : Pos Damkar Ngoro beserta tim menuju lokasi;
3. Pkl. 02.30 WIB : Tim tiba dilokasi melakukan pemadaman;
4. Pkl. 05.30 WIB : Penanganan selesai, Tim kembali ke markas.
KONDISI TERKINI : Api berhasil di padamkan.
PERSONIL TERLIBAT : 1. Pos Damkar Ngoro;
2. Pos Damkar Jombang;
3. Pemilik;
4. Karyawan;
5. Warga.
PERALATAN : 1. Satu unit fire pumper truck beserta peralatannya;
2. Satu unit supply truck beserta peralatannya.

Mengetahui,
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
Koordinator Pemadam Kebakaran,


MOH. SYAMSUL BAHRI, S.Sos.

Penata Tingkat I

NIP. 19690802 199703 1 007

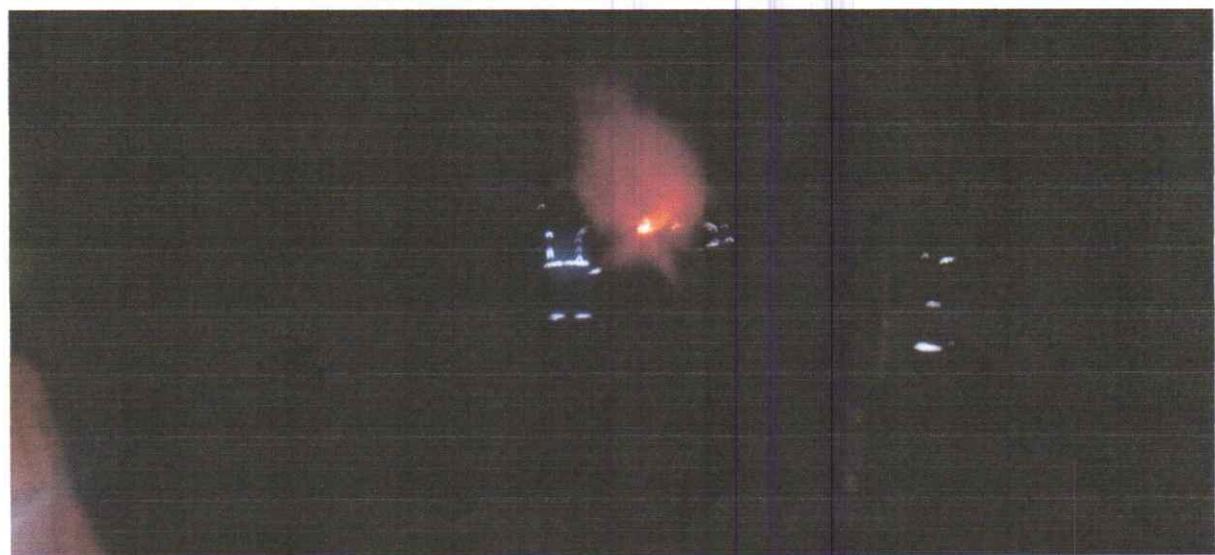
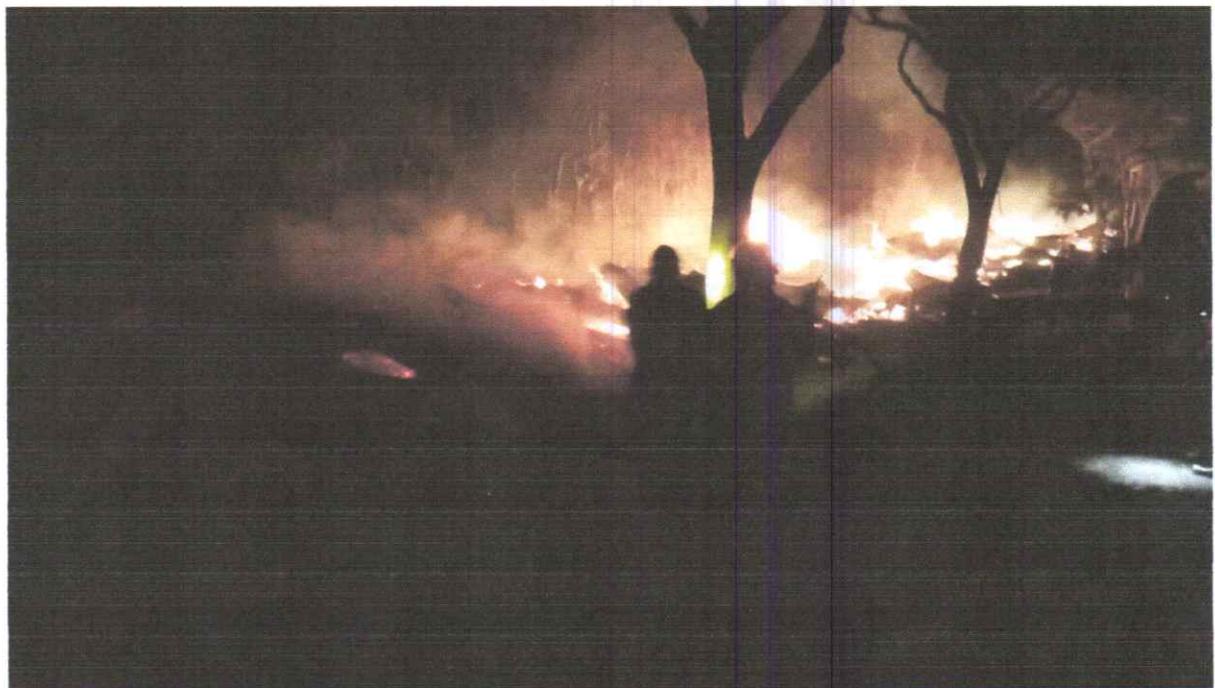
Pos Pemadam Kebakaran Ngoro
Koordinator,


M. SHOLEH.

Pengatur Muda Tingkat I

NIP. 19700119 200801 1 005

DOKUMENTASI





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 137 Telp. (0321) 861292 Fax. (0321) 865468
JOMBANG

LAPORAN INVESTIGASI KEBAKARAN

Nomor: 364/ 115 /415.46.05/2023

HARI : Selasa
TANGGAL : 9 April 2024
WAKTU : 02.21 WIB
TEMPAT : Dsn. Bangle Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang.
(-7.697750,112.253327)
DESKRIPSI : 1. Melakukan investigasi;
2. Di duga api berasal dari Sambaran Petir;
3. Penanganan dan investigasi selesai, tim kembali ke markas.
PROSES INVESTIGASI : Melakukan investigasi penyebab kebakaran;
HASIL INVESTIGASI : Kebakaran di perkirakan berasal dari Sambaran Petir.
REKOMENDASI : Memiliki dan melakukan pengecekan berkala pada apar.

Mengetahui,
**KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIGAN**
Koordinator Pemadam Kebakaran,

MOH. SAMSUL BAHRI, S.Sos.

Penata Tingkat I

NIP. 19690802 199703 1 007

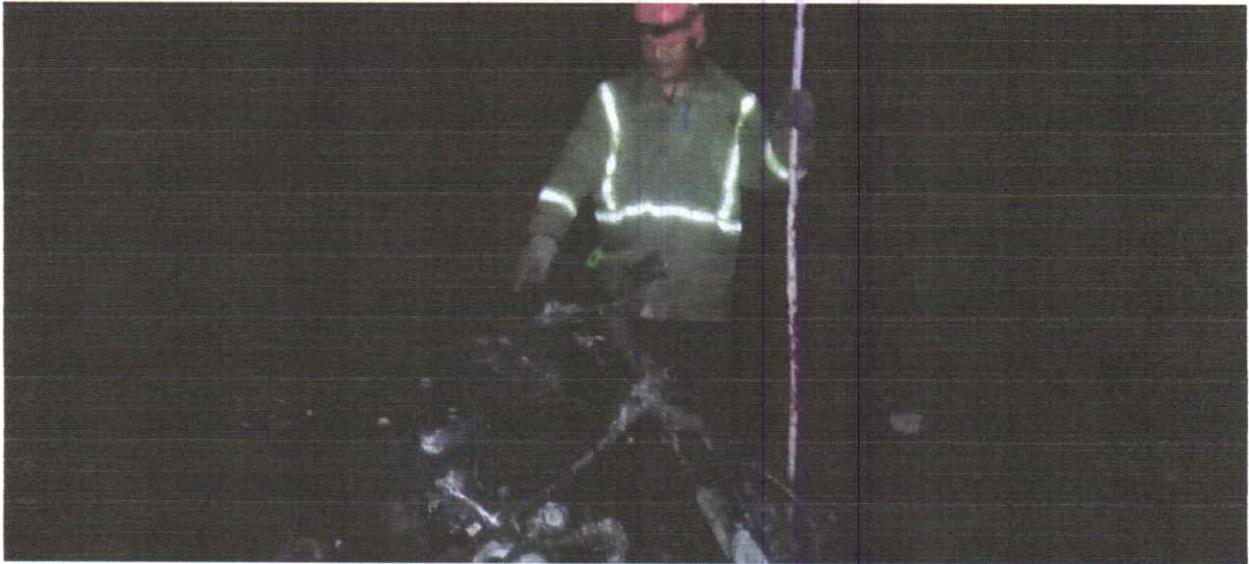
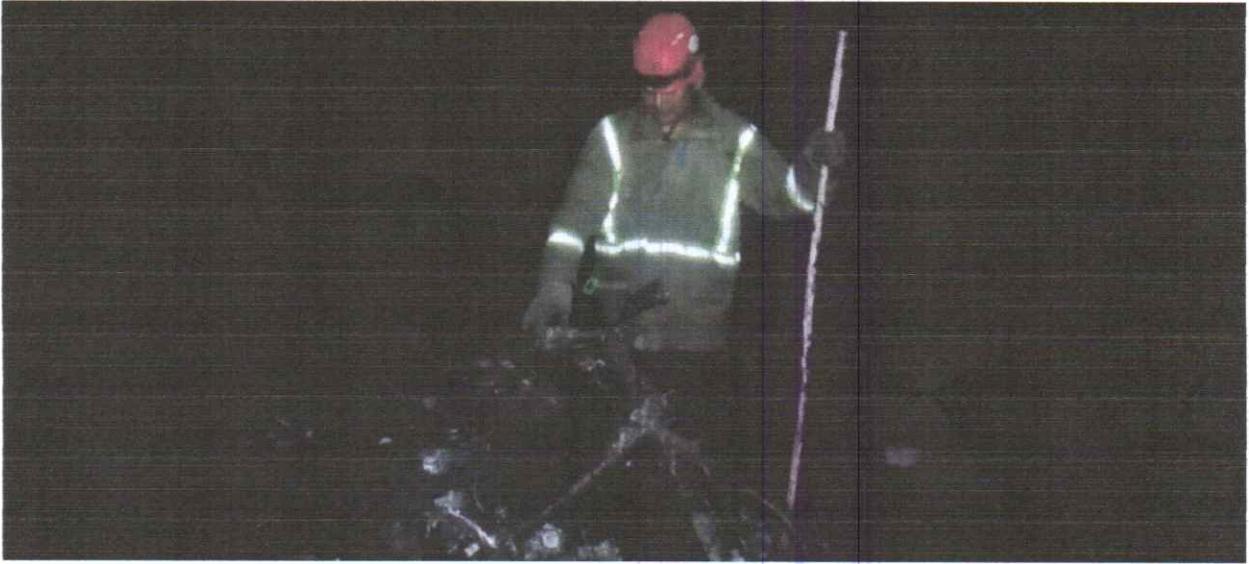
Pos Pemadam Kebakaran Ngoro
Koordinator,

M. SHOLEH.

Pengatur Muda tingkat I

NIP. 19700119 200801 1 005

DOKUMENTASI



EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: Penilaian SKP 1 Tahun

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST.,MT	1	NAMA	SUGIAT
2	NIP	196605311997031002	2	NIP	-
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	
4	JABATAN	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	JABATAN	Pj. Bupati Jombang
5	UNIT KERJA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	UNIT KERJA	Pemerintah Kabupaten Jombang

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
BAIK

POLA DISTRIBUSI:

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGE T	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

UTAMA

1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persentase capaian Indikator Ketahanan Daerah	100%	Penerima Layanan	100% berdasarkan Pusdalops PB BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	100%	Penerima Layanan	100% berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP	B	Penguatan Internal	BB berdasarkan Sekretariat BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱

HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGE T	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Terpenuhinya pelayanan dasar penanggulangan bencana	Persentase jumlah jenis layanan penanggulangan bencana yang dipenuhi	100%	Penerima Layanan	100% berdasarkan Pusdalops PB BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱
5	Terpenuhinya pelayanan dasar penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dalam Waktu Tanggap (Respon Time)	100%	Penerima Layanan	100% berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱
6	Terpenuhinya Unsur-Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparaturnya	100%	Penguatan Internal	100% berdasarkan Sekretariat BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱
7	Meningkatnya layanan informasi rawan bencana	Persentase layanan Informasi Rawan Bencana	100%	Penerima Layanan	100% berdasarkan Pusdalops PB BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱
8	Meningkatnya antisipasi dan kesiapsiagaan kejadian bencana	Persentase layanan Pusdalops PB	100%	Penerima Layanan	100% berdasarkan Pusdalops PB BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱
9	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kejadian bencana yang tertangani dalam masa tanggap darurat	100%	Penerima Layanan	100% berdasarkan Pusdalops PB BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱
10	Meningkatnya layanan pemadaman kebakaran, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase layanan pemadaman kebakaran, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditangani dalam waktu tanggap	100%	Penerima Layanan	100% berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱
11	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	Penguatan Internal	100% berdasarkan Sekretariat BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱
12	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Penguatan Internal	100% berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 🖱
13	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Penguatan Internal	100% berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 🖱
14	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Penguatan Internal	100% berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 🖱

HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGE T	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Penguatan Internal	100% berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 📌
16	Melaksanakan direktif pimpinan sesuai dengan ekspektasi pimpinan	Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	100%	Penguatan Internal	100% berdasarkan Sekretariat BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 📌
TAMBAHAN						
RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI						
PERILAKU KERJA						UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi Pelayanan					
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: ramah dan solutif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat			Pimpinan: 📌	
2	Akuntabel					
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/panutan dalam menunjang komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya			Pimpinan: 📌	
3	Kompeten					
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berupaya untuk meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain, bersedia untuk mengajarkan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki kepada orang lain dan melakukan perbaikan untuk memenuhi			Pimpinan: 📌	
4	Harmonis					
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder			Pimpinan: 📌	

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan Negara Pimpinan: 🖱
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: dapat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, mengikuti perubahan peraturan perundangan yang berlaku dan bertindak proaktif atas perubahan peraturan perundang yang terkait dengan tupoksi Pimpinan: 🖱
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah, berpikiran terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah serta dapat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama Pimpinan: 🖱
RATING PERILAKU KERJA		
SESUAI EKSPEKTASI		
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI		
BAIK		

Pegawai yang Dinilai

Jombang, 19 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST.,MT
196605311997031002

SUGIAT

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: Penilaian SKP 1 Tahun

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA			
1	NAMA	MISDI, S.Sos.MM.	1	NAMA	BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST.,MT		
2	NIP	196512101994031003	2	NIP	196605311997031002		
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b		
4	JABATAN	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	JABATAN	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI							
BAIK							
POLA DISTRIBUSI:							
HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPERIMENTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAH BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kuantitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen berdasarkan Sekretariat BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: ☛

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPETAKSI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAH BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kuantitas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 dokumen berdasarkan Sekretariat BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
3	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator : Persentase dokumen keuangan yang tersusun sesuai aturan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kuantitas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang	10 Orang berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 
4	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator : Persentase dokumen keuangan yang tersusun sesuai aturan	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kuantitas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 
5	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator : Persentase dokumen keuangan yang tersusun sesuai aturan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kuantitas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan berdasarkan Sekretariat BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
6	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Indikator : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kuantitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPERIMENTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAH BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Indikator : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kuantitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 Paket	46 Paket berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 
8	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Indikator : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kuantitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 
9	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Indikator : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kuantitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 
10	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Indikator : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kuantitas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 
11	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Indikator : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kuantitas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Paket berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 
12	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Indikator : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kuantitas	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPETAKSI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAH BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kuantitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 
14	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kuantitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 
15	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kuantitas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 
16	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kuantitas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 
17	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Indikator : Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kuantitas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	Melaksanakan direktif pimpinan sesuai dengan ekspektasi pimpinan Indikator : Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	Terlaksanannya direktif pimpinan sesuai dengan ekspektasi pimpinan	Kuantitas	Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	100 %	100% berdasarkan Sekretariat BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
TAMBAHAN							
RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI							
PERILAKU KERJA						UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	
1	Berorientasi Pelayanan						
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan layanan yang cepat dan ramah			Pimpinan: 	
2	Akuntabel						
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerja			Pimpinan: 	
3	Kompeten						
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan.			Pimpinan: 	
4	Harmonis						
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan teman kerja			Pimpinan: 	

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan institusi Pimpinan: 🖱
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia mengikuti kegiatan, pembinaan dan kebiasaan baik yang diterapkan di BPBD Pimpinan: 🖱
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: "Memberikan kesempatan kepada semua bawahan untuk menyampaikan ide atau ,gagasan yang produktif " Pimpinan: 🖱
RATING PERILAKU KERJA		
SESUAI EKSPEKTASI		
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI		
BAIK		

Pegawai yang Dinilai

MISDI, S.Sos.MM.
196512101994031003

Jombang, 19 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST.,MT
196605311997031002

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: Penilaian SKP 1 Tahun

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	MOH SYAMSUL BAHRI, S SOS	1	NAMA	BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST.,MT
2	NIP	196908021997031007	2	NIP	196605311997031002
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Kepala Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	4	JABATAN	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	UNIT KERJA	Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	5	UNIT KERJA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
BAIK

POLA DISTRIBUSI:

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUA I EKSPEK TASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELAN JUTAN BERDASAR KAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

UTAMA

1	Meningkatnya layanan informasi rawan bencana Indikator : Persentase layanan Informasi Rawan Bencana	Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana	Kuantitas	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen berdasarkan Pusdalops PB BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 👉
---	--	---	-----------	--	-----------	--	----------------

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkatnya layanan informasi rawan bencana Indikator : Persentase layanan Informasi Rawan Bencana	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Kuantitas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	875 Orang	875 Orang berdasarkan Pusdalops PB BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
3	Meningkatnya antisipasi dan kesiapsiagaan kejadian bencana Indikator : Persentase layanan Pusdalops PB	Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kuantitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	365 Dokumen	365 Dokumen berdasarkan Pusdalops PB BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
4	Meningkatnya layanan pemadaman kebakaran, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Indikator : Persentase layanan pemadaman kebakaran, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditangani dalam waktu tanggap	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kuantitas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
5	Melaksanakan direktif pimpinan sesuai dengan ekspektasi pimpinan Indikator : Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ekspektasi pimpinan	Kuantitas	Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	100%	100% berdasarkan Pusdalops PB BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
TAMBAHAN							
RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI							

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi Pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan layanan yang cepat dan ramah Pimpinan: 📌
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerja Pimpinan: 📌
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan. Pimpinan: 📌
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan teman kerja Pimpinan: 📌
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan meBersedia mengikuti kegiatan, pembinaan dan kebiasaan baik yang diterapkan di BPBD mbahayakan institusi Pimpinan: 📌
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia mengikuti kegiatan, pembinaan dan kebiasaan baik yang diterapkan di BPBD Pimpinan: 📌
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: "Memberikan kesempatan kepada semua bawahan untuk menyampaikan ide atau ,gagasan yang produktif " Pimpinan: 📌

RATING PERILAKU KERJA
SESUAI EKSPEKTASI

PREDIKAT KINERJA PEGAWAI
BAIK

Pegawai yang Dinilai

MOH SYAMSUL BAHRI, S SOS
196908021997031007

Jombang, 19 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST.,MT
196605311997031002

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: Penilaian SKP 1 Tahun

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	HERI SETYO BUDI, SP, SP.MM.	1	NAMA	BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST.,MT
2	NIP	197412121998031007	2	NIP	196605311997031002
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	4	JABATAN	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	UNIT KERJA	Seksi Kedaruratan Dan Logistik	5	UNIT KERJA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
BAIK

POLA DISTRIBUSI:

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPA BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

UTAMA

1	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator : Persentase kejadian bencana yang tertangani dalam masa tanggap darurat	Tersedianya SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kuantitas	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	2 Dokumen berdasarkan Pusdalops PB BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱
---	---	---	-----------	---	-----------	--	-------------

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator : Persentase kejadian bencana yang tertangani dalam masa tanggap darurat	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kuantitas	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250 Orang	250 Orang berdasarkan Pusdalops PB BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱
3	Melaksanakan direktif pimpinan sesuai dengan ekspektasi pimpinan Indikator : Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kuantitas	Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	100%	100% berdasarkan Pusdalops PB BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱
TAMBAHAN							
RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI							
PERILAKU KERJA						UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	
1	Berorientasi Pelayanan						
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan layanan yang cepat dan ramah			Pimpinan: 🖱	
2	Akuntabel						
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerja			Pimpinan: 🖱	
3	Kompeten						
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan.			Pimpinan: 🖱	

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan teman kerja Pimpinan: 🖱️
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan institusi Pimpinan: 🖱️
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia mengikuti kegiatan, pembinaan dan kebiasaan baik yang diterapkan di BPBD Pimpinan: 🖱️
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: "Memberikan kesempatan kepada semua bawahan untuk menyampaikan ide atau ,gagasan yang produktif " Pimpinan: 🖱️
RATING PERILAKU KERJA		
SESUAI EKSPEKTASI		
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI		
BAIK		

Pegawai yang Dinilai

HERI SETYO BUDI, SP, SP.MM.
197412121998031007

Jombang, 19 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST.,MT
196605311997031002

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: Penilaian SKP 1 Tahun

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO		PEGAWAI YANG DINILAI		NO		PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	NURPUJI SUBAGYO, S.Sos		1	NAMA	BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST.,MT	
2	NIP	197106072009011002		2	NIP	196605311997031002	
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d		3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	
4	JABATAN	Kepala Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		4	JABATAN	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
5	UNIT KERJA	Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		5	UNIT KERJA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI							
BAIK							
POLA DISTRIBUSI:							
HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
1	Meningkatnya antisipasi dan kesiapsiagaan kejadian bencana Indikator : Persentase layanan Pusdalops PB	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Kuantitas	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2 Dokumen	2 Dokumen berdasarkan Pusdalops PB BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 📌
2	Melaksanakan direktif pimpinan sesuai dengan ekspektasi pimpinan Indikator : Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ekspektasi pimpinan	Kuantitas	Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	100%	100% berdasarkan Pusdalops PB BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 📌
TAMBAHAN							

RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI			
PERILAKU KERJA			UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi Pelayanan		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan layanan yang cepat dan ramah	Pimpinan: 👉
2	Akuntabel		
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerja	Pimpinan: 👉
3	Kompeten		
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan.	Pimpinan: 👉
4	Harmonis		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan teman kerja	Pimpinan: 👉
5	Loyal		
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan institusi	Pimpinan: 👉
6	Adaptif		
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia mengikuti kegiatan, pembinaan dan kebiasaan baik yang diterapkan di BPBD	Pimpinan: 👉
7	Kolaboratif		
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: "Memberikan kesempatan kepada semua bawahan untuk menyampaikan ide atau ,gagasan yang produktif "	Pimpinan: 👉

RATING PERILAKU KERJA
SESUAI EKSPEKTASI

PREDIKAT KINERJA PEGAWAI
BAIK

Pegawai yang Dinilai

NURPUJI SUBAGYO, S.Sos
197106072009011002

Jombang, 19 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST.,MT
196605311997031002

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: Penilaian SKP 1 Tahun

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	MAYA WULANDARI, A.Md	1	NAMA	HERI SETYO BUDI, SP, SP.MM.
2	NIP	198611102020122004	2	NIP	197412121998031007
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pengatur / II/c	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	4	JABATAN	Plt. Sekretaris Badan Penganggulangan Bencana Daerah
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
BAIK

POLA DISTRIBUSI:

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJ UTAN BERDASAR KAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

UTAMA

1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Laporan dan dokumen kelengkapan berkas pengajuan gaji pegawai, rapel gaji dan uang makan pegawai	Kuantitas	Jumlah laporan dan dokumen kelengkapan berkas pengajuan gaji pegawai, rapel gaji dan uang makan pegawai	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 👉
2	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan dan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran	Kuantitas	Jumlah laporan dan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 👉

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan dan dokumen kelengkapan berkas pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan UP, GU, TU dan LS	Kuantitas	Tersedianya Laporan dan dokumen kelengkapan berkas pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan UP, GU, TU dan LS	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 
4	Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan dan dokumen kelengkapan administrasi yang terkait dengan perjalanan dinas pegawai	Kuantitas	Jumlah laporan dan dokumen kelengkapan administrasi yang terkait dengan perjalanan dinas pegawai	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 
5	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ekspektasi pimpinan	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai ekspektasi pimpinan	Kuantitas	Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	100%	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan	Pimpinan: 
TAMBAHAN							
RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI							
PERILAKU KERJA						UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	
1	Berorientasi Pelayanan						
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan layanan yang cepat dan ramah			Pimpinan: 	
2	Akuntabel						
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerja			Pimpinan: 	
3	Kompeten						

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan.
4	Harmonis	Pimpinan: 🖐️
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan teman kerja
5	Loyal	Pimpinan: 🖐️
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan institusi
6	Adaptif	Pimpinan: 🖐️
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia mengikuti kegiatan, pembinaan dan kebiasaan baik yang diterapkan di BPBD
7	Kolaboratif	Pimpinan: 🖐️
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu mengelola dan melibatkan seluruh pihak sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama
RATING PERILAKU KERJA		
SESUAI EKSPEKTASI		
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI		
BAIK		

Pegawai yang Dinilai

MAYA WULANDARI, A.Md
198611102020122004

Jombang, 19 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

HERI SETYO BUDI, SP, SP.MM.
197412121998031007

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: Penilaian SKP 1 Tahun

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO	PEGAWAI YANG DINILAI			NO	PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	MOH. ZAINUL ABIDIN		1	NAMA	HERI SETYO BUDI, SP, SP.MM.	
2	NIP	198307222010011004		2	NIP	197412121998031007	
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pengatur / II/c		3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	
4	JABATAN	PENGELOLA LOGISTIK		4	JABATAN	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	
5	UNIT KERJA	Seksi Kedaruratan Dan Logistik		5	UNIT KERJA	Seksi Kedaruratan Dan Logistik	
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI							
BAIK							
POLA DISTRIBUSI:							
HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJ UTAN BERDASARK AN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
1	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data barang logistik baik jumlah dan kualitas barang logistik untuk kebutuhan penanganan bencana	Kuantitas	Jumlah Laporan dan Dokumen barang logistik baik jumlah dan kualitas barang logistik untuk kebutuhan penanganan bencana	12 Laporan	12 Laporan berdasarkan Sekretariat BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱
2	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya tempat penyimpanan barang logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Kuantitas	Jumlah Laporan dan Dokumen tempat penyimpanan barang logistik dan peralatan penanggulangan bencana	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Sekretariat BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya pengiriman dan pengambilan barang logistik kebutuhan penanganan bencana	Kuantitas	Jumlah Laporan dan Dokumen pengiriman dan pengambilan barang logistik kebutuhan penanganan bencana	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Sekretariat BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱
4	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya informasi barang logistik dan peralatan penanganan bencana	Kuantitas	Jumlah Laporan dan Dokumen informasi barang logistik dan peralatan penanganan bencana	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Sekretariat BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱
5	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	Kuantitas	Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	100%	100% berdasarkan Sekretariat BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 🖱
TAMBAHAN							
RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI							
PERILAKU KERJA						UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	
1	Berorientasi Pelayanan						
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan layanan yang cepat dan ramah			Pimpinan: 🖱	
2	Akuntabel						
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerja			Pimpinan: 🖱	
3	Kompeten						

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan.</p> <p>Pimpinan: 🖐️</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan teman kerja</p> <p>Pimpinan: 🖐️</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan institusi</p> <p>Pimpinan: 🖐️</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia mengikuti kegiatan, pembinaan dan kebiasaan baik yang diterapkan di BPBD</p> <p>Pimpinan: 🖐️</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu mengelola dan melibatkan seluruh pihak sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama</p> <p>Pimpinan: 🖐️</p>
RATING PERILAKU KERJA		
SESUAI EKSPEKTASI		
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI		
BAIK		

Pegawai yang Dinilai

MOH. ZAINUL ABIDIN
198307222010011004

Jombang, 19 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

HERI SETYO BUDI, SP, SP.MM.
197412121998031007

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: Penilaian SKP 1 Tahun

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO		PEGAWAI YANG DINILAI		NO		PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	MASHUDI		1	NAMA	MOH SYAMSUL BAHRI, S SOS	
2	NIP	197711192008011008		2	NIP	196908021997031007	
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pengatur Tingkat I / II/d		3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	
4	JABATAN	PRANATA PEMADAM KEBAKARAN		4	JABATAN	Kepala Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	
5	UNIT KERJA	Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan		5	UNIT KERJA	Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI							
BAIK							
POLA DISTRIBUSI:							
HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAK BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
1	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	Kuantitas	Jumlah Laporan pelaksanaan tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	12 Laporan	12 Laporan berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
2	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	Kuantitas	Jumlah Laporan pelaksanaan pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	12 Laporan	12 Laporan berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemadaman kebakaran	Kuantitas	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan pemadaman kebakaran	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
4	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran	Kuantitas	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran;	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
5	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	Kuantitas	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
6	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	Kuantitas	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
7	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ekspektasi pimpinan	Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	Kuantitas	Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	100%	100% berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
TAMBAHAN							
RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI							

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi Pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan layanan yang cepat dan ramah Pimpinan: 🖱️
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerja Pimpinan: 🖱️
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan. Pimpinan: 🖱️
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan teman kerja Pimpinan: 🖱️
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan institusi Pimpinan: 🖱️
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia mengikuti kegiatan, pembinaan dan kebiasaan baik yang diterapkan di BPBD Pimpinan: 🖱️
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu mengelola dan melibatkan seluruh pihak sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama Pimpinan: 🖱️

RATING PERILAKU KERJA
SESUAI EKSPEKTASI

PREDIKAT KINERJA PEGAWAI
BAIK

Pegawai yang Dinilai

MASHUDI
197711192008011008

Jombang, 19 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

MOH SYAMSUL BAHRI, S SOS
196908021997031007

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: Penilaian SKP 1 Tahun

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO	PEGAWAI YANG DINILAI			NO	PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	SAMIDI		1	NAMA	MOH SYAMSUL BAHRI, S SOS	
2	NIP	197211112008011007		2	NIP	196908021997031007	
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pengatur Tingkat I / II/d		3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	
4	JABATAN	PRANATA PEMADAM KEBAKARAN		4	JABATAN	Kepala Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	
5	UNIT KERJA	Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan		5	UNIT KERJA	Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI							
BAIK							
POLA DISTRIBUSI:							
HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAK BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
1	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	Kuantitas	Jumlah Laporan pelaksanaan tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	12 Laporan	12 Laporan berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: ☛
2	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	Kuantitas	Jumlah Laporan pelaksanaan pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	12 Laporan	12 Laporan berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: ☛

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemadaman kebakaran	Kuantitas	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan pemadaman kebakaran	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
4	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran	Kuantitas	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran;	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
5	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	Kuantitas	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
6	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	Kuantitas	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
7	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ekspektasi pimpinan	Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	Kuantitas	Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	100%	100% berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
TAMBAHAN							
RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI							

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi Pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan layanan yang cepat dan ramah Pimpinan: 🖱
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerja Pimpinan: 🖱
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan. Pimpinan: 🖱
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan teman kerja Pimpinan: 🖱
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan institusi Pimpinan: 🖱
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia mengikuti kegiatan, pembinaan dan kebiasaan baik yang diterapkan di BPBD Pimpinan: 🖱
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu mengelola dan melibatkan seluruh pihak sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama Pimpinan: 🖱

RATING PERILAKU KERJA
SESUAI EKSPEKTASI

PREDIKAT KINERJA PEGAWAI
BAIK

Pegawai yang Dinilai

SAMIDI
197211112008011007

Jombang, 19 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

MOH SYAMSUL BAHRI, S SOS
196908021997031007

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: Penilaian SKP 1 Tahun

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO		PEGAWAI YANG DINILAI		NO		PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	M. SHOLEH		1	NAMA	MOH SYAMSUL BAHRI, S SOS	
2	NIP	197001192008011005		2	NIP	196908021997031007	
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pengatur Muda Tingkat I / II/b		3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	
4	JABATAN	PRANATA PEMADAM KEBAKARAN		4	JABATAN	Kepala Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	
5	UNIT KERJA	Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan		5	UNIT KERJA	Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI							
BAIK							
POLA DISTRIBUSI:							
HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAK BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
1	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	Kuantitas	Jumlah Laporan pelaksanaan tugas piket jaga posko kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran	12 Laporan	12 Laporan berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
2	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	Kuantitas	Jumlah Laporan pelaksanaan pemeriksaan peralatan pemadam dan kendaraan mobil pemadam kebakaran	12 Laporan	12 Laporan berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemadaman kebakaran	Kuantitas	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan pemadaman kebakaran	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
4	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran	Kuantitas	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan evakuasi dan pertolongan kepada korban kebakaran;	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
5	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	Kuantitas	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan inspeksi peralatan pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, pabrik dan perusahaan serta tempat-tempat fasilitas umum (Sekolah dan rumah sakit)	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
6	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	Kuantitas	Jumlah Laporan dan Dokumen pelaksanaan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha	12 Laporan dan dokumen	12 Laporan dan Dokumen berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
7	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ekspektasi pimpinan	Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	Kuantitas	Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan	100%	100% berdasarkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat pada BPBD Kab. Jombang	Pimpinan: 
TAMBAHAN							
RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI							

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi Pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan layanan yang cepat dan ramah Pimpinan: 🖱
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerja Pimpinan: 🖱
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan. Pimpinan: 🖱
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan teman kerja Pimpinan: 🖱
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan institusi Pimpinan: 🖱
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia mengikuti kegiatan, pembinaan dan kebiasaan baik yang diterapkan di BPBD Pimpinan: 🖱
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu mengelola dan melibatkan seluruh pihak sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama Pimpinan: 🖱

RATING PERILAKU KERJA
SESUAI EKSPEKTASI

PREDIKAT KINERJA PEGAWAI
BAIK

Pegawai yang Dinilai

M. SHOLEH
197001192008011005

Jombang, 19 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

MOH SYAMSUL BAHRI, S SOS
196908021997031007